



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PROYEK PERUBAHAN

**IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN
STRATEGI AKSELERASI PENGEMBANGAN KORPORASI PETANI**

DISUSUN OLEH :

NAMA : Dr. Hermanto, SP, MP
NDH : 20
INSTANSI : BIRO PERENCANAAN - SEKRETARIATJENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGGARAN XX
PUSBANGKOM PIMNAS DAN MANAJERIAL ASN
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI
JAKARTA, NOVEMBER 2021**



KEMENTERIAN
PERTANIAN

IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

STRATEGI AKSELERASI PENGEMBANGAN KORPORASI PETANI



Project Leader : Dr. Hermanto, SP, MP
NDH : 20
Coach : Ir. BRISMA RENALDI, MM
Mentor : Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc

**BIRO PERENCANAAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL II ANGGARAN XVIII
TAHUN 2021**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN
NASIONAL TINGKAT II ANGGARAN XVIII TAHUN 2021

JUDUL : STRATEGI AKSELERASI PENGEMBANGAN KORPORASI PETANI
NAMA : HERMANTO
NIP : 197108141999031002
UNIT KERJA : BIRO PERENCANAAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

DISEMINARKAN PADA :

HARI : SELASA
TANGGAL : 2 NOVEMBER 2021
TEMPAT : PPMKP CIAWI

MENTOR

COACH



Dr. Ir. Kasdi Subagyono, M.Sc
NIP. 19640521 199003 1001



Ir. Brisma Renaldi, M.M
NIP. 196806131993091001

SURAT PERNYATAAN
PKN TINGKAT II ANGKATAN XVIII TAHUN 2021

1. Peserta Pelatihan

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. Hermanto M.P.
Jabatan : Fungsional Perencana Madya
(Koordinator Substansi Perencanaan Wilayah)
Unit Kerja : Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal–Kementerian Pertanian

Adalah peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Pertanian, Kementerian Pertanian.

2. Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang Ditunjuk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc
Jabatan : Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
Unit Kerja : Sekretariat Jenderal–Kementerian Pertanian

Menyatakan bahwa Proyek Perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2021 merupakan produk pembelajaran individual yang menjadi salah satu indikator pencapaian hasil pelatihan. Proyek Perubahan ini akan diimplementasikan di instansi kami dalam milestone jangka menengah yaitu pengesahan revisi Permentan tentang pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani, penyusunan revisi *Grand Design* Pengembangan Korporasi Petani, pembentukan satgas pelaksanaan Gerakan Pengembangan 350 Korporasi Petani dan jangka panjang yaitu melakukan evaluasi dan penyempurnaan perencanaan pengembangan Korporasi Petani dan menyusun rancangan kebijakan Gerakan Nasional Pengembangan Korporasi Petani di luar lokasi *Major Project*.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala konsekuensinya.

Jakarta, 01 November 2021

Mengetahui,

Yang menyatakan,



Dr. Ir. Hermanto M.P.



Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc

LEMBAR PERNYATAAN KOMITMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Dr. Ir. Hermanto M.P
NDH : 20
JABATAN : Fungsional Perencana Madya
(Koordinator Substansi Perencanaan Wilayah)
UNIT KERJA : Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal-Kementerian Pertanian

Dengan ini menyatakan komitmen untuk melaksanakan target jangka menengah dan jangka panjang dari proyek perubahan yang telah disusun dalam rencana proyek perubahan yang berjudul: "STRATEGI AKSELERASI PENGEMBANGAN KORPORASI PETANI".

Demikian komitmen ini saya buat sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 01 November 2021

Mentor



Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc.

Yang menyatakan,



Dr. Ir. Hermanto M.P.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami haturkan kehadiran ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat merampungkan Laporan Proyek Perubahan Ini. Keberhasilan kami dalam menyelesaikan Laporan Proyek Perubahan ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu izinkanlah kami pada kesempatan pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak, terutama Tim Efektif, yang terlibat membantu kami dalam penyusunan dan penulisan laporan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Laporan Proyek Perubahan ini merupakan bentuk pertanggung jawaban kami atas runut dan hasil pelaksanaan Proyek Perubahan, dan kami percaya masih banyak hal yang dapat disempurnakan dari laporan Proyek Perubahan ini. Untuk itu saran dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan.

Hal yang paling pokok tentunya kami berharap idea dalam proyek perubahan ini bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik, dalam proses pengembangan korporasi petani khususnya di lingkup Kementerian Pertanian. Bagi kami ini sebagai bentuk sumbangan pemikiran dan juga kerja nyata dalam mengakselerasi pengembangan korporasi petani di Indonesia.

Jakarta, 2 November 2021

Penyusun



Hermanto

ABSTRAK

Sektor pertanian di Indonesia masih merupakan salah satu sektor yang memberikan sumbangsih besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun demikian, fakta di lapangan masih menunjukkan banyaknya tantangan yang menghambat pertumbuhan sektor pertanian, diantaranya pelaku sektor pertanian masih di dominasi oleh petani kecil dengan luasan lahan yang relatif sempit. Selain itu, rantai pasok dan rantai nilai yang terlalu panjang dan rumit yang mengakibatkan produk hasil pertanian tidak memiliki nilai tambah ekonomi karena petani hanya melakukan kegiatan budi daya saja (*on farm*) dan hanya sedikit yang melakukan kegiatan pengolahan (*off farm*). Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk pengembangan sektor pertanian adalah mengkonsolidasikan kegiatan di sektor pertanian dari hulu sampai kehilir melalui pengembangan Korporasi Petani. Esensi pengembangan korporasi petani adalah untuk menata ulang dan menyempurnakan rantai nilai komoditas pertanian yang tidak efisien dengan skala usaha cukup besar, beragam, dan terkonsentrasi atau berdekatan secara spasial sehingga secara fungsional berhubungan sinergis dan dinamis.

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan 5 *Major Project* Korporasi Petani (4 korporasi petani di Provinsi Jawa Barat dan 1 korporasi petani di Provinsi Jawa Tengah), yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pertanian untuk dijadikan sebagai *benchmarking* dalam mengembangkan 345 Korporasi Petani sampai pada tahun 2024. Perjalanan pengembangan 5 *major project* tersebut tidak berjalan mulus dan cenderung lambat karena berbagai kendala masih dihadapi mulai dari kesiapan SDM petani, ketersediaan sarana prasarana, teknologi hingga permodalan. Menilik kondisi ini, maka Proyek Perubahan ini mengambil judul **Strategi Akselerasi Pengembangan Korporasi Petani** atau disingkat **SIAP KORPORASI PETANI**. Proyek perubahan ini mempunyai dua maksud, pertama menyiapkan regulasi korporasi petani yang akan menjadi arah untuk mengakselerasi pengembangan korporasi petani. Kedua, membangun sinergitas dan komitmen antar Eselon I Kementan, antar K/L dan daerah serta stakeholder dalam mewujudkan pengembangan korporasi petani secara nasional sebagaimana telah diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024.

Secara lengkap proyek perubahan ini telah menghasilkan 4 (empat) produk utama, yaitu tersusunnya: (1) Peraturan Presiden (Perpres), sebagai panduan bagi Kementerian/Lembaga (K/L) untuk mempercepat pengembangan korporasi petani; (2) Revisi Permentan 18/2018 tentang pedoman pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani dalam rangka mengintegrasikan perencanaan program dan kegiatan pengembangan korporasi petani di lingkup Kementan; (3) Tersusunnya pedoman penguatan kelembagaan petani untuk mendukung pengembangan korporasi petani; dan (4) Mekanisme pengelolaan Bantuan Pemerintah mendukung pengembangan korporasi petani. Berbagai pencapaian ini merupakan hasil kegiatan dalam jangka pendek (2 bulan) dan menengah (sampai dengan setahun). Diharapkan ke depan, baik dalam jangka menengah maupun panjang (lebih dari setahun), proyek perubahan ini akan berlanjut berupa terbangunnya 350 korporasi petani secara efisien dan efektif.

Daftar Isi

Lembar Pengesahan	i
Surat Pernyataan.....	ii
kata Pengantar	iv
Abstrak.....	v
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
Daftar Lampiran.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Deskripsi Proyek Perubahan	1
B. Latar Belakang	5
C. Tujuan dan Manfaat.....	12
D. Output dan Outcome	13
BAB II.RENCANA TAHAPAN PROYEK PERUBAHAN	14
BAB III.PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN	16
A. Target Capaian Proyek Perubahan	16
B. Gambaran Pelaksanaan Setiap Milestone Jangka Pendek	22
BAB IV.MARKETING SEKTOR PUBLIK DAN PEMBERDAYAAN ORGANISASI.....	30
A. Peran <i>Stakeholder</i> dan Pengaruhnya.....	30
B. Bentuk Marketing.....	33
C. Strategi Komunikasi.....	35
D. Peran <i>Project Leader</i> dalam Implementasi Proyek Perubahan	36
E. Kendala dan Strategi Mengatasi Kendala.....	38
BAB V.PENUTUP	39
A. Simpulan	39
B. Saran	39
C. <i>Lesson Learnt</i>	40
LAMPIRAN	41

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Target <i>Major Project</i> Pengembangan Korporasi Petani Tahun 2020-2024	8
Tabel 1.2	Implementasi 5 <i>Major Project</i> Korporasi Petani Tahun 2020.....	10
Tabel 1.3	Kinerja bisnis koperasi sebelum terbentuknya korporasi petani tahun 2019	11
Tabel 1.4	Kinerja bisnis koperasi sesudah terbentuknya korporasi petani tahun 2020	11
Tabel 2.1	<i>Milestone</i> Tahapan Jangka Pendek	14
Tabel 2.2	<i>Milestone</i> Tahapan Jangka Menengah	15
Tabel 2.3	<i>Milestone</i> Tahapan Jangka Panjang	15
Tabel 3.1	Target Capaian Proyek Perubahan pada Jangka Pendek.....	16
Tabel 3.2.	<i>Milestone</i> Pertama Proyek Perubahan	22
Tabel 3.3	<i>Milestone</i> Kedua Proyek Perubahan	24
Tabel 3.4	<i>Milestone</i> Ketiga Proyek Perubahan	25
Tabel 3.5	<i>Milestone</i> Keempat Proyek Perubahan	26
Tabel 3.6	<i>Milestone</i> Kelima Proyek Perubahan	27
Tabel 4.1	Peran <i>stakeholder</i> dalam Implementasi Proyek Perubahan.....	32
Tabel 4.2	Marketing Strategi Sektor Publik Implementasi Proyek Perubahan	34
Tabel 4.3	Strategi Komunikasi dengan beragam <i>stakeholder</i>	35
Tabel 4.4	Peran Project Leader dalam Implementasi Proyek Perubahan	36
Tabel 4.5	Kendala, Resiko dan Strategi Mengatasinya.....	38

Daftar Gambar

Gambar 4.1 Identifikasi Pemangku Kepentingan Implementasi Proyek Perubahan.....	33
------------------------------------------------------------------------------------	----

Daftar Lampiran

A. Pra Persiapan Proyek Perubahan	42
Lampiran 1.a. Form Persetujuan Mentor	42
Lampiran 1.a Rapat Koordinasi Awal Proyek Perubahan Strategi Akselerasi Implementasi pengembangan korporasi petani Tanggal 27 Juli 2021.....	43
Lampiran 1.b Rapat Koordinasi Percepatan Implementasi 350 Korporasi Petani Tanggal 29 Juli 2021	44
Lampiran 1.c Rapat Koordinasi Penyusunan Peta Permasalahan Pengembangan Korporasi Petani Tanggal 30 Juli 2021	47
Lampiran 1.d Rapat Koordinasi Percepatan Implementasi 350 Korporasi Petani Tanggal 2 Agustus 2021	49
Lampiran 1. e Rapat Virtual terkait Undangan dari KJRI mengenai Partispasi PT JPLM (Korporasi Petani Kopi Kabupaten Bandung) dalam Kegiatan Coffex 2021 Tanggal 3 Agustus 2021	52
Lampiran 1. f Rapat Koordinasi Korporasi Petani di Kabupaten Indramayu dalam rangka persiapan penyusunan rencana bisnis korporasi petani pada tanggal 4 Agustus 2021	53
B. Rapat konsolidasi persiapan pelaksanaan proyek perubahan.....	56
Lampiran 2.a. Rapat persiapan pelaksanaan proyek perubahan akselerasi pengembangan korporasi petani tanggal 9 Agustus 2021	56
Lampiran 2.b. Surat Permohonan Nama Tim ke Eselon I tanggal 9 Agustus 2021 58	
Lampiran 2.c. Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani Tanggal 16 Agustus 2021	59
Lampiran 2.d. Pendampingan Pengembangan Korporasi Peternak Kabupaten Subang Tanggal 18-20 Agustus 2021	62
Lampiran 2.e. SK Tim Perencanaan Program Akselerasi Pengembangan Korporasi Petani tanggal 20 Agustus 2021	65
Lampiran 2.f. Pendampingan Pengembangan Korporasi Petani Hortikultura Sayuran Kabupaten Bandung Tanggal 22-23 Agustus 2021	66
Lampiran 2.g. Rapat Tim efektif dan persiapan korporasi petani.....	68
C. Penyiapan Usulan Draft Rperpers Tentang Pengembangan Korporasi Petani	71
Lampiran 3.a. Pendampingan Pengembangan Korporasi Petani Kopi Kabupaten Bandung Tanggal 24-26 Agustus 2021	71

Lampiran 3.b. Pendampingan Pengembangan Korporasi Petani Padi Kabupaten Demak Tanggal 23-26 Agustus 2021	73
Lampiran 3.c. Rapat Pembahasan Pedoman Fasilitas Pembiayaan Mendukung Korporasi Petani TA 2021 Tanggal 25 Agustus 2021	76
Lampiran 3.d. Pendampingan Pengembangan Korporasi Petani Padi Kabupaten Indramayu Tanggal 25-27 Agustus 2021	79
Lampiran 3.e. Rapat Pembahasan R Perpres Korporasi Petani dan Nelayan Tanggal 26 Agustus 2021	82
Lampiran 3.f. Pendampingan Pengembangan Korporasi Peternak Kabupaten Subang (Proses Pemilihan Direksi) Tanggal 27-28 Agustus 2021	85
Lampiran 3.g. Pendampingan Pengembangan Korporasi Peternak Kabupaten Subang Tanggal 30 Agustus 2021	88
Lampiran 3.h. Rapat Tindak Lanjut Kemitraan Pemasaran Benih Dan Beras Di Kawasan Food Estate	90
Lampiran 3.i. Rapat Evaluasi Progress Pelaksanaan Proyek Perubahan Tanggal 31 Agustus 2021	92
Lampiran 3.j. Rapat Koordinasi dengan BPK RI Tanggal 31 Agustus 2021	94
Lampiran 3.k. Penyampaian Usulan Draft Rancangan Perpres Korporasi Petani kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Tanggal 3 September	96
D. Memperbaiki, melengkapi dan menyempurnakan draft revisi Perubahan peraturan menteri pertanian nomor 18 tahun 2018 tentang pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani	98
Lampiran 4.a. Rapat Evaluasi Progress Pelaksanaan Proyek Perubahan Tanggal 6 September	98
Lampiran 4.b. Rapat Koordinasi Tim Efektif Internal Biro Perencanaan Tanggal 10 September 2021	100
Lampiran 4.c. Rapat Tim Penyusunan Draft Revisi Permentan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani	102
Lampiran 4.d. Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (Food Estate) Tanggal 21 September 2021	104
Lampiran 4.e. Publikasi Pengembangan Korporasi Petani Melalui Harian Republika Online, Tanggal 21 September 2021	106
Lampiran 4.f. Publikasi Pengembangan Korporasi Petani Melalui Harian Sinar Tani, Tanggal 21 September 2021	110
Lampiran 4.g. Bimtek pengembangan Desa Korporasi Sapi di Kab. Kediri Tanggal 28 September 2021	114
Lampiran 4.h. Bimtek pengembangan Desa Korporasi Sapi di Kab. Boyolali Tanggal 28 September 2021	118
Lampiran 4.i. Bimtek pengembangan Desa Korporasi Sapi di Kab. Morowali Tanggal 30 September 2021	121

Lampiran 4.j.	Bimtek pengembangan Desa Korporasi Sapi di Kab. Banyuasin Tanggal 30 September 2021	124
Lampiran 4.k.	Rapat Finalisasi Draf Revisi Permentan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani Tanggal 30 September 2021	130
E.	Perbaikan mekanisme dan Pola Penyaluran Bantuan kepada Kelompok Tani dan Gapoktan untuk Dikelola Secara Korporasi	131
Lampiran 5.a.	Penjaringan Masukan Pedum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Mendukung Pengembangan Korporasi Petani Tanggal 21 September 2021	131
Lampiran 5.b.	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran pada Kegiatan <i>Food Estate</i> Tanggal 21 September	134
Lampiran 5.c.	Diskusi dan Pembahasan Penyusunan Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian Tanggal 27 September 2021 136	
Lampiran 5.d.	Rapat Koordinasi Pembahasan Penyusunan Pedum Pengelolaan Bantuan Pemerintah mendukung Korporasi Petani Tanggal 13 Oktober 2021	138
F.	Penyusunan draft Pedum penguatan kelembagaan petani dalam pengembangan korporasi petani.....	143
Lampiran 6.a.	Rapat Koordinasi Tim Efektif Internal Biro Perencanaan Persiapan Penyusunan Pedum Penguatan Kelembagaan petani dalam Pengembangan Korporasi Petani	143
Lampiran 6.b.	Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I Pembahasan Penetapan Lokasi Korporasi Petani dan Nelayan (KPN) Percontohan Tanggal 8 Oktober 2021	145
Lampiran 6.c.	Progress Penyusunan Rencana Bisnis PT. Tani Mulus Emas Tanggal 12 Oktober 2021	147
Lampiran 6.d.	Rapat Koordinasi Pembahasan Penyusunan Pedum Kelembagaan Petani dalam Pengembangan Korporasi Petani Tanggal 13 Oktober 2021	150
Lampiran 6.e.	Rapat Koordinasi Pembahasan Perkembangan Major Project Korporasi Petani Bandung Tanggal 14 Oktober 2021	152
Lampiran 6.f.	Penajaman Rancangan Pengembangan Korporasi Petani Subang Tanggal 15 Oktober 2021	154
Lampiran 6.g.	Pembahasan Pengembangan Food Estate berbasis Korporasi Petani Menuju JAMBI MANTAB Tanggal 18 Oktober 2021	157
Lampiran 6.h.	Harmonisasi Rancangan Permentan tentang Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani Tanggal 18 Oktober 2021.....	159
Lampiran 6.i.	Seminar Nasional : Perkembangan Pelaksanaan Food Estate di Kalteng dalam mendukung Ketahanan Pangan.....	161
Lampiran 6.j.	Bimtek korporasi petani di Kabupaten Solok Selatan, 20 Oktober 2021	163

Lampiran 6.k. Bimtek pengembangan Desa Korporasi Sapi di Kab. Sidrap Tanggal 20 Oktober 2021	165
Lampiran 6.l. Bimtek pengembangan Desa Korporasi Sapi di Kab. Aceh Besar Tanggal 20 Oktober 2021	168
Lampiran 6.i. Bimtek pengembangan Desa Korporasi Sapi di Kab. PPU Tanggal 20 Oktober 2021	170
Lampiran 6.m. Bimtek korporasi petani di Kabupaten Cianjur tanggal 22 Oktober 172	
Lampiran 6.n. Koordinasi Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tanggal 22 Oktober 2021	174
KARTU KENDALI PROSES COACHING PKN TK. II.....	175

BAB I.

PENDAHULUAN

A. Deskripsi Proyek Perubahan

Konsep korporasi petani diperkenalkan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo pada saat Rapat Terbatas Kabinet Kerja, 12 September 2017, khususnya membahas "korporasi petani". Presiden Joko Widodo pada saat mengumumkan dan memperkenalkan Dr. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.H. sebagai Menteri Pertanian pada Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 juga menegaskan bahwa salah satu tugas utama Menteri Pertanian adalah "mengorporasikan petani".

Korporasi petani merupakan salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi petani yang memiliki dimensi strategis dalam pembangunan pertanian. Dengan kondisi pertanian Indonesia yang sebagian besar digeluti oleh petani dengan skala usaha tani relatif sempit atau kurang dari 0,5 ha (BPS, 2020), hampir tidak mungkin petani dapat mengorganisasikan dirinya sendiri secara efektif dan efisien sehingga petani cenderung bekerja sendiri-sendiri. Selain itu, rantai pasok dan rantai nilai yang terlalu panjang dan rumit yang mengakibatkan produk hasil pertanian tidak memiliki nilai tambah ekonomi karena petani hanya melakukan kegiatan budi daya saja (*on farm*) tanpa adanya proses penambahan nilai dan hanya sedikit yang melakukan kegiatan pengolahan (*off farm*).

Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk pengembangan sektor pertanian adalah mengkonsolidasikan kegiatan di sektor pertanian dari hulu sampai ke hilir secara sinergi dan terintegrasi melalui pengembangan korporasi petani. Melalui korporasi petani, azas *economic of scale* dapat diterapkan sehingga pengelolaan sumber daya dalam suatu kawasan pertanian bisa lebih optimal dan terintegrasi dari hulu ke hilir. Oleh karena itu, tujuan pengembangan korporasi petani adalah untuk menjadikan petani berdaulat dalam mengelola keseluruhan rantai produksi usaha tani. Petani tidak hanya berdaulat dalam pengelolaan *on farm* tetapi juga pengolahan atau *off farm* dan pemasaran hasil usaha tani.

Dengan mengembangkan korporasi petani akan memberikan manfaat, antara lain: (1) Meningkatkan nilai tambah produksi pertanian; (2) Petani dapat mengembangkan usaha tani skala luas; (3) Terintegrasinya sistem sentra produksi pertanian, pengolahan dan perdagangan; (4) Meningkatkan penyerapan tenaga kerja

pertanian; (5) Terbukanya potensi ekspor pertanian ke negara lain; dan (6) Harga komoditas pertanian menjadi lebih kompetitif karena diproduksi dalam skala luas. Hal ini juga akan berdampak pada peningkatan kemampuan ekonomi para pelaku usaha di sektor pertanian dalam menjalankan usahanya selama pandemi COVID-19, yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan produksi, pendapatan petani dan percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Menteri Pertanian telah menetapkan kebijakan tentang lokasi kawasan pertanian nasional melalui Kepmentan No. 472 tahun 2018, dan Permentan No. 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani, sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden pada tanggal 12 September 2017. Selain itu, Kementerian Pertanian menerbitkan “*Grand Design* Pengembangan Korporasi Petani sebagai Penggerak Ekonomi Kawasan Pertanian untuk Kesejahteraan Petani” pada tahun 2019. Pengembangan korporasi petani juga tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024.

Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mengamanatkan pengembangan 350 korporasi petani dan nelayan sebagai Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*). Pada tahun 2020 telah dilaksanakan 5 *Major Project* Korporasi Petani (4 korporasi petani di Provinsi Jawa Barat dan 1 korporasi petani di Provinsi Jawa Tengah), yang diinisiasikan oleh Kementerian Pertanian untuk dijadikan sebagai *benchmarking* dalam mengembangkan 345 Korporasi Petani sampai pada tahun 2024. *Major project* korporasi petani yang diinisiasikan sejak tahun 2020 tersebut masih dihadapi dengan berbagai kendala mulai dari kesiapan SDM petani, ketersediaan sarana prasarana, teknologi hingga permodalan. Bahkan 345 calon lokasi *major project* korporasi petani yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2024 juga belum teridentifikasi secara menyeluruh.

Pengembangan korporasi petani selama ini berjalan lambat dalam implementasinya. Penyebab utamanya adalah belum sinkronnya kebijakan dan program antar K/L dan antara K/L dengan dinas di daerah sehingga pengembangan korporasi petani belum terintegrasi antar Eselon satu terkait dan antar K/L. Kondisi seperti ini merupakan implikasi dari belum adanya regulasi secara nasional yang mengatur tentang pengembangan korporasi petani untuk dijadikan acuan bersama antar K/L. Sementara Permentan No. 18 Tahun 2018 tentang Pedoman

Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani belum sepenuhnya dapat mengkomodir pelaksanaan 350 *major project* korporasi petani.

Sesuai dengan harapan yang diinginkan agar pengembangan 350 korporasi petani dapat dilakukan secara optimal sampai pada tahun 2024, maka Proyek Perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tahun 2021 Angkatan XVIII ini adalah **Strategi Akselerasi Pengembangan Korporasi Petani (SIAP KORPORASI PETANI)**. Proyek perubahan ini memiliki posisi strategis dan nilai tambah (*value propositions*) yang penting, yaitu:

1. Proyek perubahan ini menghasilkan strategi baru untuk penyelesaian payung hukum korporasi petani dan nelayan melalui suatu Peraturan Presiden (Perpres), sebagai panduan bagi Kementerian/Lembaga (K/L) untuk mempercepat pengembangan korporasi petani. Selain itu, mempersiapkan penyesuaian/revisi rancangan Permentan 18/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani. Kedua regulasi tersebut akan menjadi arah bagi pengembangan korporasi petani yang efisien, bentuk hukum, skema/sumber pembiayaan, dan keterlibatan stakeholders terkait untuk mendukung proses transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan petani.
2. Proyek perubahan ini memberikan perhatian khusus terkait dengan penguatan kelembagaan petani (kelompok tani, Gabungan Kelompok Tani/Gapoktan) yang dilakukan secara integratif dan konsolidatif melalui; (a) Peningkatan kapasitas SDM petani; (b) Pengembangan investasi sosial; (c) Pengembangan sarana prasarana pendukung; dan (d) Penguatan manajemen kelembagaan petani. Kelompok tani, Gapoktan dan Gapoktan Bersama yang maju dan berkembang secara sosial dan ekonomi menjadi basis utama pengembangan korporasi petani dalam mewujudkan kesejahteraan petani.
3. Proyek perubahan ini memberikan arah pendampingan kepada petani dalam proses awal pengembangan korporasi petani, fasilitasi bantuan sarana dan prasana, membangun tata kelola yang baik dalam sistem korporasi petani. Hal ini menjadi penting karena hakekat pengembangan korporasi petani membutuhkan dukungan lintas kementerian dan lembaga termasuk Perguruan Tinggi.
4. Proyek perubahan ini mendorong keterlibatan sektor usaha swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan mengintegrasikan bisnisnya dalam korporasi petani, dan sekaligus menjalankan fungsi pemberdayaan untuk kemandirian dan keberlanjutan korporasi petani.

Upaya ini, selain dapat meningkatkan kemampuan korporasi petani dalam berkompetisi, juga mampu menjawab berbagai tantangan dalam pengembangan korporasi petani, khususnya terkait dengan kesiapan SDM petani, ketersediaan sarana prasarana, teknologi dan permodalan.

Terobosan inovasi dalam proyek perubahan ini adalah memberikan kontribusi signifikan untuk pengembangan korporasi petani, yaitu terbangunnya sinergitas dan komitmen antar Eselon I Kementan, antar K/L dan daerah serta stakeholder terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam mewujudkan pengembangan korporasi petani secara nasional sebagaimana telah diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024.

Dalam proyek perubahan ini ada beberapa istilah dan pengertian antara lain:

1. Akselerasi atau percepatan atau adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu dalam pelaksanaan suatu proyek perubahan.
2. Korporasi (*Corporation*) – Korporasi adalah suatu yang diciptakan oleh atau dibawah wewenang hukum suatu negara atau bangsa, yang terdiri, dalam hal beberapa kejadian, tentang orang tunggal adalah seorang pengganti, menjadi pejabat kantor tertentu, tetapi biasanya terdiri dari suatu asosiasi banyak individu.
3. Korporasi Petani adalah kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum yang dibangun melalui konsolidasi petani, lahan/ternak, dan manajemen usaha untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing dan kesejahteraan petani.
4. Kawasan Pertanian adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang memenuhi batas minimal skala ekonomi pengusahaan dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah secara berkelanjutan serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya, faktor produksi, dan keberadaan infrastruktur penunjang.
5. Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani adalah Kawasan Pertanian yang dikembangkan dengan strategi penguatan Korporasi Petani untuk mengembangkan Komoditas Pertanian Unggulan Nasional dan/atau Komoditas Pertanian Binaan Nasional dengan kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani yang sudah berkembang.
6. *Major Project* Korporasi Petani adalah program prioritas nasional di Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani untuk memperkuat aspek kerjasama lintas sektoral dalam mengoptimalkan sumber daya pembangunan.

7. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
8. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
9. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama dalam pengelolaan usaha pertanian.
10. Gapoktan Bersama adalah gabungan dari beberapa Gapoktan yang mensinergikan kegiatan usaha dengan pemberdayaan masyarakat tani yang dijalankan dengan prinsip korporasi yang berorientasi keuntungan untuk mendorong kemandirian Petani.
11. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
12. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum.
13. Rencana Bisnis adalah dokumen yang menggambarkan strategi dan manajemen proses bisnis Korporasi Petani untuk mencapai target pengembangan usaha sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
14. Usaha Pertanian adalah bisnis di bidang pertanian, yang mencakup usaha pada simpul-simpul rantai pasok, mulai dari usaha sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil, usaha penunjang, dan/atau usaha terkait lainnya.

B. Latar Belakang

1. Kondisi Umum

Sektor pertanian di Indonesia masih merupakan salah satu sektor yang memberikan sumbangsih besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun

demikian, fakta di lapangan masih menunjukkan banyaknya tantangan yang menghambat pertumbuhan sektor pertanian, diantaranya pelaku sektor pertanian masih di dominasi oleh petani kecil dengan luasan lahan yang relatif sempit. Saat ini petani-petani kecil di Indonesia belum terorganisasi dalam produksi bersama berdasarkan perhitungan usaha. Hal tersebut mengakibatkan tidak tercapainya skala ekonomi yang besar karena petani tidak terkonsolidasi dalam satu wadah bersama. Untuk mencapai skala ekonomi yang besar perlu konsolidasi petani-petani dari berbagai daerah.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk pengembangan sektor pertanian adalah mengkonsolidasikan kegiatan di sektor pertanian dari hulu sampai ke hilir secara sinergi dan terintegrasi melalui pengembangan korporasi petani. Esensi pengembangan korporasi petani adalah untuk menata ulang dan menyempurnakan rantai nilai komoditas pertanian yang tidak efisien dengan skala usaha cukup besar, beragam, dan terkonsentrasi atau berdekatan secara spasial sehingga secara fungsional berhubungan sinergis dan dinamis. Oleh karena itu, pengembangan korporasi petani dipandang dapat meningkatkan daya saing dan nilai tambah hasil pertanian.

Proses pembentukan korporasi petani dilakukan melalui konsolidasi kelembagaan petani, dimulai dari petani yang dikonsolidasikan ke dalam suatu Kelompok Tani (Poktan), kemudian Poktan dikonsolidasikan ke dalam Gapoktan. Dari beberapa Gapoktan yang tergabung dalam suatu klaster selanjutnya dikonsolidasikan menjadi Gapoktan Bersama/koperasi. Gapoktan Bersama dibentuk dari, oleh, dan untuk petani melalui konsolidasi Gapoktan yang ada di kawasan pertanian. Kemudian Gapoktan Bersama/koperasi ditransformasikan menjadi korporasi petani.

Pengembangan korporasi petani selama ini diketahui belum berjalan optimal karena berbagai kendala yang dihadapi, yaitu:

- (1) Belum adanya payung hukum korporasi petani dan nelayan melalui suatu Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tata laksana, pembagian tugas dan kewenangan di tiap K/L dalam membangun korporasi petani;
- (2) Belum terkoordinasi dan terintegrasinya kegiatan pengembangan korporasi petani antar K/L sehingga perencanaan dan pelaksanaannya masih berjalan sendiri-sendiri;
- (3) Belum adanya penguatan kebijakan afirmasi untuk mendorong terbentuknya korporasi petani yang profesional;

- (4) Masih terbatasnya jejaring kerjasama bisnis dan akses pembiayaan untuk korporasi petani dalam menjalankan bisnisnya;
- (5) Masih belum memadainya prasarana dan sarana pendukung kegiatan produksi serta pengelolaan dan pemasaran hasilnya;
- (6) Tidak mudahnya melakukan konsolidasi petani, kelembagaan petani dan manajemen usahatani karena petani terbiasa bekerja dengan manajemen mandiri sehingga perlu waktu untuk mengkondisikan petani agar terbiasa bekerja dalam satu manajemen yang profesional; dan
- (7) Masih terbatasnya kapasitas SDM petani dalam mengelola korporasi petani secara professional.

Dengan memperhatikan kendala-kendala tersebut dapat disimpulkan bahwa membangun korporasi petani bukanlah pekerjaan yang mudah karena spektrum korporasi petani mencakup berbagai aspek kelembagaan, legal, permodalan, organisasi, bisnis, teknologi dan kebijakan yang harus disiapkan. Korporasi petani harus dibangun secara komprehensif dengan menjalankan prinsip dan nilai korporasi petani serta melakukan perubahan tata kelola bisnis yang lebih modern melalui berbagai strategi yang mengedepankan upaya peningkatan daya saing, inovasi, dan kreativitas dengan mensinergikan keterlibatan *stakeholders* terkait dalam pengembangan korporasi petani untuk kesejahteraan petani. Dalam hal ini, Biro Perencanaan dapat berperan lebih optimal dalam penyusunan perencanaan pengembangan korporasi petani untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan dalam membangun korporasi petani.

Sebagai organisasi yang berada di bawah naungan Sekretariat Jenderal, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a) Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana pengembangan wilayah pertanian; b) Penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan dan program pembangunan pertanian; c) Penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran pembangunan pertanian; d) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan pertanian; dan e) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan.

2. Kondisi Saat Ini

RPJM 2020-2024 merencanakan program penguatan jaminan usaha serta 350 korporasi petani dan nelayan dengan anggaran sebesar Rp226,4 triliun, yang berasal

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp200,9 triliun dan dari investasi sektor swasta sebesar Rp25,5 triliun. Indikator keberhasilan yang dituliskan dalam RPJM adalah terjadinya peningkatan pendapatan petani rata-rata 5 persen per tahun (Tabel 1.1). Indikator keberhasilan lainnya adalah peningkatan produktivitas komoditas 5 persen per tahun hingga tahun 2024 (Bappenas, 2020). Target-target tersebut tentu tidak mudah untuk dicapai mengingat dampak Pandemi COVID-19 yang sangat dahsyat, mengurangi dayabeli, dan menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1.1 Target *Major Project* Pengembangan Korporasi Petani Tahun 2020-2024

2020	2021	2022	2023	2024
5 Piloting Korporasi Petani	33 Korporasi Petani	65 Korporasi Petani	150 Korporasi Petani	350 Korporasi Petani
<p>Target:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produktivitas komoditas: 5% • Nilai tambah per tenaga kerja pertanian: Rp49,20 juta/tenaga kerja 	<p>Target:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produktivitas komoditas: 5% • Nilai tambah per tenaga kerja pertanian: Rp51,70 juta/tenaga kerja 	<p>Target:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produktivitas komoditas: 5% • Nilai tambah per tenaga kerja pertanian: Rp54,30 juta/tenaga kerja 	<p>Target:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produktivitas komoditas: 5% • Nilai tambah per tenaga kerja pertanian: Rp57,00 juta/tenaga kerja 	<p>Target:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produktivitas komoditas: 5% • Nilai tambah per tenaga kerja pertanian: Rp59,80 juta/tenaga kerja

Sumber: Bappenas, 2020

Pada tahun 2020, Kementerian Pertanian mulai menginisiasi *Major Project* Korporasi Petani di 5 (lima) lokasi, yaitu Kab Bandung (korporasi petani kopi dan korporasi petani hortikultura sayuran), Kab. Subang (korporasi peternak sapi potong), Kab. Indramayu (korporasi petani padi), dan Kab. Demak (korporasi petani padi). Kelima korporasi petani ini jika berhasil dengan baik dapat dijadikan sebagai *role model* untuk direplikasikan di lokasi lainnya dengan melakukan penyesuaian terhadap karakteristik komoditas dan lokasi setempat. Meskipun demikian, membangun korporasi petani bukanlah pekerjaan yang mudah karena berbagai tantangan yang dihadapi akan berbeda di setiap lokasi, sehingga diperlukan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak.

Pengembangan korporasi petani dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu (1) Tahap penumbuhan; dan (2) Tahap pengembangan. Penumbuhan korporasi petani dilakukan dari tahapan persiapan sampai dengan tahapan penentuan bentuk kelembagaan usaha, kepengurusan, dan status hukum. Tahapan pengembangan korporasi petani mencakup kegiatan penguatan bisnis, dan pemandirian korporasi

petani. Penguatan bisnis dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan jejaring usaha (*networking*), yang diharapkan akan meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan efisiensi penggunaan faktor produksi, meningkatkan skala bisnis, mengembangkan diversifikasi usaha, dan perluasan jejaring pemasaran. Sedangkan pemandirian korporasi petani dilakukan dengan penguatan manajemen badan usaha dan bisnis. Pada tahap ini, korporasi petani dapat dikatakan telah berjalan dengan stabil khususnya dalam bidang keuangan dengan memaksimalkan potensi sumber pembiayaan, yang tidak hanya dari pemerintah.

Konsep penumbuhan dan pengembangan korporasi petani terdiri delapan pilar, yang akan dijadikan landasan transformasi dalam membangun model bisnis korporasi petani. Kedelapan pilar tersebut saling berkaitan dan membentuk fondasi dalam mengembangkan korporasi petani.

1. Konsolidasi lahan, yaitu dari lahan luasan kecil terkonsolidasi menjadi lahan dengan skala luas (skala ekonomi yang efisien), dari bisnis budidaya menjadi bisnis integrasi hulu–hilir (*value chain*) dan dari *monoculture farming* menjadi *mixed farming*;
2. Konsolidasi petani, kelembagaan dan manajemen usahatani, yaitu mulai dari regulasi di tingkat pusat, manajemen pengelola (pusat dan lokal), penguatan kelembagaan petani (*corporate value/culture, entrepreneur*) sampai pada pendampingan dan kemitraan;
3. Pengembangan Inovasi teknologi mencakup kebaruan input produksi, kebaruan praktik budidaya (GAP), kebaruan teknologi pasca panen dan kebaruan *packaging* (kemasan);
4. Sinergi meliputi visi bersama dan implementasi kegiatan secara terpadu diantara pelaku dan pendukung;
5. Kemudahan akses pembiayaan untuk usahatani (input produksi, alsintan), pascapanen, pengolahan produk turunan, gudang dan asuransi pertanian;
6. Pelibatan *Off Taker* sebagai penjamin hasil produksi sekaligus sebagai avalis dan pendampingan ke petani;
7. Digitalisasi/penerapan IT untuk pemetaan lahan dan pelaku usaha, kegiatan *on farm* dan *off farm* dengan sistem informasi pertanian terintegrasi pada petani;
8. Dukungan logistik meliputi sistem logistik yang efisien, pemasaran *online* dan *offline*

Dari 5 *Major Project* korporasi petani yang diinisiasikan oleh Kementerian Pertanian sejak tahun 2020 tersebut dikategorikan sebagai tahap penumbuhan (Tabel 1.2), dengan rincian perkembangan implementasi tiap lokasi seperti terlihat pada Lampiran 1.

Tabel 1.2 Implementasi 5 *Major Project* Korporasi Petani Tahun 2020

NO	Komponen	Implementasi <i>Major Project</i> Korporasi Petani (KP)				
		KP Padi PT. Tani Mulus Emas Indramayu	KP Padi KSU Citra Kinaraya Demak	KP Peternak Sapi Potong Koperasi Brahman Sejahtera Subang	KP Sayuran Ponpes Al Ittifaq Bandung	KP Kopi PT. Java Preanger Lestari Mandiri Bandung
1	Konsolidasi lahan	✓	✓	✓	✓	✓
2	Konsolidasi Petani	✓	✓	✓	✓	✓
3	Konsolidasi Kelembagaan	✓	✗	✗	✗	✓
4	Konsolidasi manajemen usahatani	✓	✓	✗	✗	✓
5	Adopsi Teknologi	✓	✓	✗	✗	✓
6	Sinergi	✓	✓	✗	✓	✓
7	Kemudahan Akses Pembiayaan	✗	✓	✗	✓	✗
8	Pelibatan Off Taker	✓	✓	✗	✓	✗
9	Digitalisasi/ Penerapan IT	✗	✗	✗	✓	✗
10	Dukungan Logistik	✓	✓	✗	✓	✗

Sumber: Kemenko Perekonomian dan Kementan 2021 (diolah)

Keterangan: KP = Korporasi Petani

Dari 5 *Major Project* korporasi petani yang diinisiasikan sejak tahun 2020 tersebut dikategorikan sebagai tahap penumbuhan dengan perkembangan yang berbeda-beda dan proses penerapannya juga cenderung berjalan lambat. Dilihat dari kinerja bisnis sebelum dan sesudah dilakukan *Major Project* korporasi petani terlihat bervariasi dan belum optimal (Tabel 1.3. dan 1.4). Sebelum *Major Project* korporasi petani, korporasi petani sayuran Ponpes Al Ittifaq, misalnya sudah memiliki kinerja bisnis yang lebih baik dibandingkan dengan 4 lokasi korporasi petani lainnya. Setelah *Major Project* korporasi petani pada tahun 2020, kinerja bisnisnya masih menempati posisi terbaik dibandingkan dengan korporasi petani lainnya. Namun, perkembangannya belum terlihat meningkat secara signifikan dibandingkan pada tahun 2019.

Omzet dan keuntungan sebelum *Major Project* korporasi petani sayuran Ponpes Al Ittifaq masing-masing sebesar Rp. 8,9 milyar/tahun dan Rp. 1,8 milyar/tahun, sementara saat dilaksanakan *major project* korporasi petani, omzet dan keuntungannya masing-masing menjadi Rp. 9,0 milyar/tahun dan Rp. 1,9 milyar/tahun

atau meningkat masing-masing sebesar 1,12% dan 5,56%. Untuk komponen lainnya seperti skala usaha, jumlah petani yang tergabung dalam korporasi petani dan modal kerja tidak mengalami perubahan signifikan antara sebelum dan setelah *Major Project* korporasi petani.

Tabel 1.3 Kinerja bisnis koperasi sebelum terbentuknya korporasi petani tahun 2019

No	Kabupaten	Sebelum Korporasi Petani (2019)					
		Core bisnis	Skala Usaha (ha atau ekor)	Petani (org)	Modal Kerja (Rp Juta)	Omzet (Rp Juta/thn)	Keuntungan (Rp Juta/thn)
1	Indramayu	Padi (ha)	278	513	75	350	46
2	Demak	Padi (ha)	190	120	1.800	2.280	133
3	Subang	Sapi (ekor)	624	210	23,4	38,9	15,7
4	Bandung (hortikultura)	Sayuran (ha)	130	270	7.200	8.900	1.800
5	Bandung (Perkebunan)	Kopi (ha)	3.267	1.510	8.000	11.170	2.234

Sumber : Kementan 2021 (diolah)

Tabel 1.4 Kinerja bisnis koperasi sesudah terbentuknya korporasi petani tahun 2020

No	Kabupaten	Setelah Korporasi Petani (2020)					
		Core bisnis	Skala Usaha (ha atau ekor)	Petani (org)	Modal Kerja (Rp Juta)	Omzet (Rp Juta/thn)	Keuntungan (Rp Juta/thn)
1	Indramayu	Padi (ha)	6.674	2.175	75	2.671	421
2	Demak	Padi (ha)	200	126	1.800	3.666	260
3	Subang	Sapi (ekor)	1121	540	23,4	1.200	48,2
4	Bandung (hortikultura)	Sayuran (ha)	130	270	7.200	9.000	1.900
5	Bandung (Perkebunan)	Kopi (ha)	3.373	1.541	8.000	12.430	2.486

Sumber : Kementan 2021 (diolah)

Dari uraian kondisi saat ini dapat disimpulkan bahwa membangun korporasi petani bukanlah pekerjaan yang mudah, mengingat pengembangan korporasi bukan semata persoalan manajemen bisnis di tingkat mikro, namun sangat berkait dengan kebijakan di tingkat makro. Keterpaduan formasi strategi makro-mikro diperlukan dalam pengembangan korporasi petani. Oleh karena itu, strategi akselerasi pengembangan korporasi petani diperlukan agar pelaksanaan *Major Project* 350 petani dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

3. Kondisi Yang Diharapkan

Kondisi yang diharapkan adalah sebagai berikut: (1) Perencanaan dan implementasi pengembangan korporasi petani yang terintegrasi dan terpadu antar eselon I Kementan, K/L, dan daerah; (2) Terakselerasinya implementasi pengembangan 350 korporasi petani secara optimal; (3) Tersedianya prasarana dan sarana pertanian serta pembinaan manajemen dan teknis untuk pengembangan korporasi petani; (4) Terbangunnya sistem manajemen yang profesional dalam pengelolaan dan pembinaan korporasi petani; dan (5) Terbangun dan terkelolanya korporasi petani secara mandiri dan berkelanjutan yang mampu meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani.

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

1. Jangka panjang adalah terbangunnya 350 korporasi petani untuk melayani kebutuhan petani dan meningkatkan kesejahteraan petani dengan memanfaatkan dan mengimplementasikan SIAP Korporasi petani.
2. Jangka menengah adalah menyiapkan kelengkapan dokumen perencanaan untuk pengembangan korporasi petani.
3. Jangka pendek adalah menghasilkan rancangan revisi permentan tentang pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani, usulan draft Rperpers tentang pengembangan korporasi petani, pedum penguatan kelembagaan petani dalam pengembangan korporasi petani serta usulan draft Perbaikan Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Mendukung Pengembangan Korporasi Petani.

2. Manfaat

1. Manfaat bagi Biro Perencanaan akan meningkatkan kinerja pelayanan untuk perencanaan pengembangan korporasi petani.
2. Manfaat bagi Kementan, Bappenas dan K/L lainnya adalah tersedia regulasi yang mendukung terciptanya ekosistem bisnis yang kondusif bagi pengembangan korporasi petani sehingga dapat mempercepat dan mempermudah pelaksanaan pengembangan 350 korporasi petani.

3. Manfaat bagi diri sendiri adalah terselesaikannya proyek perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tahun Anggaran 2021.

D. Output dan Outcome

1. Output

Keluaran yang diharapkan dari proyek perubahan ini adalah :

1. Perubahan peraturan menteri pertanian nomor 18 tahun 2018 tentang pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani.
2. Usulan draft Rperpers tentang pengembangan korporasi petani kepada Bappenas sebagai pemrakarsa.
3. Pedum penguatan kelembagaan petani dalam pengembangan korporasi petani.
4. Usulan draft Perbaikan Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Mendukung Pengembangan Korporasi Petani.

2. Outcome

Perencanaan pengembangan korporasi petani di Biro Perencanaan dapat dilakukan secara terintegrasi dan terpadu oleh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan *major project* pengembangan 350 korporasi petani secara berkelanjutan.

BAB II.

RENCANA TAHAPAN PROYEK PERUBAHAN

Untuk dapat mencapai keberhasilan dalam realisasi proyek perubahan ini, perlu disusun *milestone* yang mencakup tahapan mulai dari jangka pendek sampai jangka panjang seperti terlihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 *Milestone* Tahapan Jangka Pendek

No	Kegiatan	Agustus (Mingguan)	September (Mingguan)				Oktober (Mingguan)				Output	Tanggal Pelaksanaan Kegiatan
		M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4		
Jangka Pendek												
1	Rapat konsolidasi persiapan pelaksanaan proyek perubahan										Undangan, daftar hadir dan notulen rapat	23 Agt
3	Penyiapan draft Rperpers tentang pengembangan korporasi petani										Usulan Draft Rperpers tentang pengembangan korporasi petani kepada Bappenas sebagai pemrakarsa	24 Agt - 17 Sept
2	Memperbaiki, melengkapi dan menyempurnakan draft revisi permentan tentang pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani.										Draft final revisi permentan tentang pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani.	6 Sept - 1 Okt
4	Perbaikan mekanisme dan pola penyaluran bantuan kepada kelompok Tani dan Gapoktan untuk dikelola secara korporasi										Usulan Draft Perbaikan Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Mendukung Pengembangan Korporasi Petani	21 Sept - 15 Okt
5	Penyusunan draft pedum penguatan kelembagaan petani dalam pengembangan korporasi petani										Pedoman Umum Penguatan Kelembagaan Petani dalam Pengembangan Korporasi Petani	5 Okt - 22 Okt

Keterangan:
M: minggu ke

Tabel 2.2 *Milestone* Tahapan Jangka Menengah

No	Kegiatan	Desember 2021 - April 2022 (Mingguan)																				Output	Tanggal Pelaksanaan Kegiatan
		Dec-21				Jan-22				Feb-22				Mar-22				Apr-22					
		M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4		
Jangka Menengah																							
1	Pengesahan revisi permentan tentang pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani.																					Permentan tentang Perubahan pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani.	6 Des - 31 Jan
2	Penyusunan revisi grand design pengembangan Korporasi petani																					Grand design Pengembangan Korporasi petani (Revisi 2)	1 Feb - 31 Mar
3	Pembentukan Satgas Pelaksanaan Gerakan Pengembangan 350 Korporasi Petani																					SK Menteri Pertanian tentang Pembentukan Tim Satgas Pelaksanaan Gerakan Pengembangan 350 Korporasi Petani	5 April

Keterangan:
M: minggu ke

Tabel 2.3 *Milestone* Tahapan Jangka Panjang

No	Kegiatan	Mei 2022 - Febuari 2023 (Bulanan)										Output	
		B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B1	B2		
Jangka Panjang													
1	Melakukan evaluasi dan penyempurnaan perencanaan pengembangan korporasi petani												Laporan hasil evaluasi
2	Menyusun rancangan kebijakan Gerakan Nasional pengembangan korporasi petani di luar lokasi <i>Major Project</i>												Rancangan kebijakan Gerakan Nasional pengembangan korporasi petani di luar lokasi <i>Major Project</i>

Keterangan:
B: bulan ke

BAB III.

PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

A. Target Capaian Proyek Perubahan

Target capaian proyek perubahan pada milestone jangka pendek proyek perubahan yang dilaksanakan 60 hari dapat dilihat seperti tertera pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Target Capaian Proyek Perubahan pada Jangka Pendek

No.	Kegiatan Utama	Rencana	Realisasi	Bukti Lampiran	
1	Rapat konsolidasi persiapan pelaksanaan proyek perubahan	9 - 23 <i>Agustus</i>	1. Rapat persiapan pelaksanaan proyek perubahan akselerasi pengembangan	9 Agustus	2.a.
			2. Permohonan nama Tim dan jawaban surat dari masing-masing Eselon 1	9 Agustus	2.b.
			3. Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani	16 Agustus	2.c.
			4. Pendampingan Pengembangan Korporasi Peternak Kabupaten Subang	18-20 Agustus	2.d.
			5. Pengesahan SK Tim Perencanaan Program Akselerasi Pengembangan Korporasi Petani	20 Agustus	2.e.
			6. Pendampingan Pengembangan Korporasi Petani Hortikultura Sayuran Kabupaten Bandung	22-23 Agustus	2.f.

No.	Kegiatan Utama	Rencana	Realisasi		Bukti Lampiran
			7. Rapat Tim efektif dan persiapan Akselerasi Pengembangan korporasi petani	23 Agustus	2.g.
2	Penyiapan Usulan draft Rperpers tentang pengembangan korporasi petani	24 Agustus – 17 Sept	1. Pendampingan Pengembangan Korporasi Petani Kopi	24-26 Agustus	3.a
			2. Pendampingan Pengembangan Korporasi Petani Padi Kabupaten Demak	23-26 Agustus	3.b
			3. Rapat Pembahasan Pedoman Fasilitasi Pembiayaan Mendukung Korporasi Petani TA 2021	25 Agustus	3.c
			4. Pendampingan Pengembangan Korporasi Petani Padi Kabupaten Indramayu	25-27 Agustus	3.d
			5. Rapat Pembahasan RPerpres Korporasi Petani dan Nelayan	26 Agustus	3.e
			6. Pendampingan Pengembangan Korporasi Peternak Kabupaten Subang (Proses Direksi)	27-28 Agustus	3.f
			7. Pendampingan Pengembangan Korporasi Peternak Kabupaten Subang	30 Agustus	3.g
			8. Rapat tindak lanjut kemitraan perbenihan dan beras di Kawasan <i>Food Estate</i> Kalteng	30 Agustus	3.h

No.	Kegiatan Utama	Rencana	Realisasi		Bukti Lampiran
			10. Rapat evaluasi progress pelaksanaan proper	31 Agustus	3.i
			11. Rapat Koordinasi dengan BPK RI	31 Agustus	3.j
			12. Penyampaian Usulan Rancangan Perpres Korporasi Petani kepada Kementerian PPN/Bappenas	03 September	3.k
3	Memperbaiki, melengkapi dan menyempurnakan draft revisi Perubahan peraturan menteri pertanian nomor 18 tahun 2018 tentang pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani	6 Sept – 1 Okt	1. Persiapan Rapat evaluasi progress pelaksanaan proper	06 September	4.a.
			2. Rapat Koordinasi Tim Efektif Internal Biro Perencanaan	10 September	4.b
			3. Rapat Tim Penyusunan Draf Revisi Permentan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani	13 September	4.c
			4. Rapat Menko tentang RPerpres <i>Food Estate</i>	21 September	4.d
			5. Publikasi Pengembangan Korporasi Petani Melalui Harian Republika Online	21 September	4.e
			6. Publikasi Pengembangan Korporasi Petani Melalui Harian Sinar Tani	21 September	4.f
			7. Bimtek Korporasi Petani untuk Desa	28 September	4.g

No.	Kegiatan Utama	Rencana	Realisasi	Bukti Lampiran
			Korporasi Sapi di Kab. Kediri	
			8. Bimtek Korporasi Petani untuk Desa Korporasi Sapi di Kab. Boyolali	28 September 4.h
			9. Bimtek Korporasi Petani untuk Desa Korporasi Sapi di Kab. Morowali Utara	30 September 4.i
			10. Bimtek Korporasi Petani untuk Desa Korporasi Sapi di Kab. Banyuasin	30 September 4.j
			11. Rapat Finalisasi Draf Revisi Permentan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani	30 September 4.k
4	Perbaiki mekanisme dan pola penyaluran bantuan kepada kelompok tani dan Gapoktan untuk dikelola secara korporasi	21 Sept – 15 Okt	1. Penjaringan Masukan Pedum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Mendukung Pengembangan Korporasi Petani	21 September 5.a
			2. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran pada Kegiatan <i>Food Estate</i>	21 September 5.b
			3. Diskusi dan Pembahasan Penyusunan Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian	27 September 5.c.

No.	Kegiatan Utama	Rencana	Realisasi	Bukti Lampiran
			4. Rapat Koordinasi Pembahasan Penyusunan Pedum Pengelolaan Bantuan Pemerintah mendukung Korporasi Petani	13 Oktober 5.d
5	Penyusunan draft Pedum penguatan kelembagaan petani dalam pengembangan korporasi petani	5 Okt - 22 Okt	1. Rapat Koordinasi Tim Efektif Internal Biro Perencanaan	5 Oktober 6.a
			2. Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I antar K/L Pembahasan Penetapan Lokasi Korporasi Petani dan Nelayan (KPN) Percontohan	8 Oktober 6.b.
			3. Progress Penyusunan Rencana Bisnis PT. Tani Mulus Emas	12 Oktober 6.c.
			4. Rapat Koordinasi Pembahasan Penyusunan Pedum Kelembagaan Petani dalam Pengembangan Korporasi Petani	13 Oktober 6.d
			5. Rapat Koordinasi Pembahasan Perkembangan <i>Major Project</i> Korporasi Petani Bandung	14 Oktober 6.e
			6. Penajaman Rancangan Pengembangan Korporasi Petani Subang	15 Oktober 6.f

No.	Kegiatan Utama	Rencana	Realisasi	Bukti Lampiran
			7. Pengembangan <i>Food Estate</i> berbasis Korporasi Petani menuju JAMBI MANTAB	18 Oktober 6.g
			8. Harmonisasi Rancangan Permentan tentang Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi petani	18 Oktober 6.h
			9. Seminar Nasional : Perkembangan Pelaksanaan <i>Food Estate</i> di Kalteng dalam mendukung Ketahanan Pangan dan Mendongkrak Kesejahteraan Petani	19 Oktober 6.i
			10. Bimtek Korporasi Petani untuk Desa Korporasi Sapi di Kab. Solok Selatan	20 Oktober 6.j
			11. Bimtek Korporasi Petani untuk Desa Korporasi Sapi di Kab. Sidrap Sulsel	20 Oktober 6.k
			12. Bimtek Korporasi Petani untuk Desa Korporasi Sapi di Kab. Aceh Besar	20 Oktober 6.l
			13. Bimtek Korporasi Petani untuk Desa Korporasi Sapi di Kab. PPU Kaltim	20 Oktober 6.m

No.	Kegiatan Utama	Rencana	Realisasi	Bukti Lampiran
			14. Bimtek Korporasi Petani untuk Desa Korporasi Sapi di Kab. Cianjur	22 Oktober 6.n
			15. Koordinasi Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	22 Oktober 6.o

B. Gambaran Pelaksanaan Setiap Milestone Jangka Pendek

1. Milestone Pertama

Pelaksanaan milestone pertama dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, seperti terlihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. *Milestone* Pertama Proyek Perubahan

<i>Milestone</i>	Kegiatan	Waktu
Rapat konsolidasi persiapan pelaksanaan proyek perubahan	1. Rapat persiapan pelaksanaan proyek perubahan akselerasi pengembangan korporasi petani	9 Agustus
	2. Permohonan nama Tim dan jawaban surat dari masing-masing Eselon 1	9 Agustus
	3. Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani	16 Agustus
	4. Pendampingan Pengembangan Korporasi Peternak Kabupaten Subang	18-20 Agustus
	5. Pengesahan SK Tim Perencanaan Program Akselerasi Pengembangan Korporasi Petani	20 Agustus
	6. Pendampingan Pengembangan Korporasi Petani Hortikultura Sayuran Kabupaten Bandung	22-23 Agustus
	7. Rapat Tim efektif dan persiapan Akselerasi Pengembangan korporasi petani	23 Agustus

Proyek perubahan ini dapat berhasil dicapai adanya dukungan dari *stakeholder* yang ada di dalam Tim Perencanaan Program Akselerasi Pengembangan Korporasi Petani. Pembentukan dan pengesahan tim pelaksana proyek perubahan

dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2021 yang didahului dengan penjelasan dan arahan dari *Project Leader* untuk membuat rancangan kebutuhan Tim. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan membuat surat undangan permohonan anggota tim. Sebelum usulan anggota tim diajukan oleh masing-masing Eselon I lingkup Kementan, juga dilaksanakan kunjungan lapangan di 5 lokasi *Major Project* korporasi petani untuk menggali informasi dan menyusun strategi akselerasi.

Selanjutnya dilakukan penyusunan draft SK Tim Perencanaan Program Akselerasi Pengembangan Korporasi Petani yang terbagi menjadi tiga Tim yaitu Tim Penyusun Substansi Regulasi, Tim Penyiapan Data, Dokumentasi dan Publikasi serta Tim Administrasi. Tim Penyusun Substansi Regulasi terbagi menjadi tiga kelompok yaitu (1) Penyusun Rancangan Perpres dan rancangan revisi Permentan tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani; (2) Penyusun Pedoman Kelembagaan; dan (3) Penyusun mekanisme pengelolaan bantuan pemerintah. Draft SK Tim kemudian diajukan kepada Kepala Biro Perencanaan untuk proses penandatanganan SK Tim Perencanaan Program Akselerasi Pengembangan Korporasi Petani.

Tim Perencanaan Program Akselerasi Pengembangan Korporasi Petani mempunyai tugas:

1. Tim Penyusun Substansi Regulasi
 - a. Merencanakan penyusunan dokumen substansi
 - b. Melakukan analisis dan pengolahan data
 - c. Menyusun dokumen substansi
 - d. Menyusun laporan kegiatan penyusunan dokumen substansi
2. Tim Penyiapan Data, Dokumentasi dan Publikasi
 - a. Menyiapkan data dan informasi yang diperlukan untuk penyusunan substansi regulasi
 - b. Menyiapkan dokumen dan publikasi pengembangan korporasi petani
 - c. Mengkompilasi laporan kegiatan
3. Tim Administrasi
 - a. Menyiapkan administrasi kegiatan perencanaan program akselerasi
 - b. Mendokumentasikan dokumen administrasi kegiatan perencanaan program akselerasi

2. Milestone Kedua

Pelaksanaan milestone kedua dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, seperti terlihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 *Milestone* Kedua Proyek Perubahan

Milestone	Kegiatan	Waktu
Penyiapan draft Rperpres tentang pengembangan korporasi petani	1. Pendampingan Pengembangan Korporasi Petani Kopi Kabupaten Bandung	24-26 Agustus
	2. Pendampingan Pengembangan Korporasi Petani Padi Kabupaten Demak	23-26 Agustus
	3. Rapat Pembahasan Pedoman Fasilitasi Pembiayaan Mendukung Korporasi Petani TA 2021	25 Agustus
	4. Pendampingan Pengembangan Korporasi Petani Padi Kabupaten Indramayu	25-27 Agustus
	5. Rapat Pembahasan R Perpres Korporasi Petani dan Nelayan	26 Agustus
	6. Pendampingan Pengembangan Korporasi Peternak Kabupaten Subang (Proses Direksi)	27-28 Agustus
	7. Pendampingan Pengembangan Korporasi Peternak Kabupaten Subang	30 Agustus
	8. Rapat tindak lanjut kemitraan pemasaran benih dan beras di Kawasan Food Estate	30 Agustus
	9. Rapat evaluasi progress pelaksanaan proper	31 Agustus
	10. Rapat Koordinasi dengan BPK RI	31 Agustus
	11. Penyampaian Usulan Rancangan Perpres Korporasi Petani kepada Kementerian PPN/Bappenas	3 September

Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang pengembangan korporasi petani dilaksanakan dengan menggali permasalahan kebutuhan regulasi melalui pendampingan koporasi petani di Kabupaten Bandung, Indramayu, Demak dan Subang. Selain itu juga dilakukan rapat koordinasi lintas Kementerian/Lembaga untuk mendapatkan informasi lainnya serta rapat pembahasan khusus terkait dengan draft RPerpres yang dipimpin oleh Bappenas. Dalam rapat

tersebut Bappenas meminta masukan draft RPerpes kepada K/L, terutama Kementerian Pertanian yang dimandatkan langsung dalam pelaksanaan Korporasi Petani. Surat resmi dari Bappenas untuk permintaan usulan Draft RPerpres tentang korporasi petani kepada K/L terkait tertanggal 1 September 2021 (Lampiran 3.k).

Kementerian Pertanian menyampaikan usulan draft Rancangan Perpres Korporasi Petani kepada Kementerian PPN/Bappenas pada tanggal 3 September 2021 melalui surat Kepala Biro Perencanaan kepada Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas. Draft Rancangan Peraturan Presiden tentang korporasi petani dapat diselesaikan lebih cepat dari target dengan koordinasi tim dan juga dukungan dari stakeholder promoters, yang semula ditargetkan selesai pada tanggal 17 September 2021.

3. Milestone Ketiga

Pelaksanaan milestone ketiga dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, seperti terlihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 *Milestone* Ketiga Proyek Perubahan

Milestone	Kegiatan	Waktu
Memperbaiki, melengkapi dan menyempurnakan draft revisi Perubahan Peraturan Menteri Pertanian nomor 18 tahun 2018 tentang Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani	1. Persiapan Rapat evaluasi progress pelaksanaan proper	06 September
	2. Rapat Koordinasi Tim Efektif Internal Biro Perencanaan	10 September
	3. Rapat Tim Penyusunan Draft Revisi Permentan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani	13 September
	4. Rapat Menko tentang RPerpres <i>Food Estate</i>	21 September
	5. Publikasi Pengembangan Korporasi Petani Melalui Harian Republika Online, Tanggal 21 September 2021	21 September
	6. Publikasi Pengembangan Korporasi Petani Melalui Harian Sinar Tani, Tanggal 21 September 2021	21 September
	7. Bimtek Korporasi Petani untuk Desa Korporasi Sapi di Kab. Kediri	28 September

Milestone	Kegiatan	Waktu
	8. Bimtek Korporasi Petani untuk Desa Korporasi Sapi di Kab. Boyolali	28 September
	9. Bimtek Korporasi Petani untuk Desa Korporasi Sapi di Kab. Morowali Utara	30 September
	10. Bimtek Korporasi Petani untuk Desa Korporasi Sapi di Kab. Banyuasin	30 September
	11. Rapat Finalisasi Draf Revisi Permentan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani	30 September

Penyusunan draft revisi Perubahan Peraturan Menteri Pertanian nomor 18 tahun 2018 tentang Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani dilakukan dengan memperbaiki dan melengkapi pasal per pasal di dalam Permentan 18/2018. Penyusunan batang tubuh Draft Permentan dilakukan dengan rapat koordinasi yang dilakukan secara internal Biro Perencanaan dan juga rapat tim substansi regulasi. Selain itu rapat juga dilakukan dengan tim dari Biro Hukum dan stakeholder lainnya untuk persiapan harmonisasi dengan Kemenkum Ham dan K/L terkait lainnya. Draft revisi Permentan 18/2018 ini juga mengacu pada Rancangan Perpres tentang Korporasi Petani yang telah disiapkan sebelumnya oleh Tim Kementerian Pertanian. Finalisasi Draft Revisi Permentan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani dilaksanakan pada tanggal 30 September atau lebih cepat dari target penyelesaiannya yaitu pada tanggal 1 Oktober 2021. Selanjutnya draft revisi Permentan akan diajukan proses harmonisasi bersama Kemenkum Ham dan K/L terkait lainnya.

4. Milestone Keempat

Pelaksanaan milestone ketiga dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, seperti terlihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 *Milestone* Keempat Proyek Perubahan

Milestone	Kegiatan	Waktu
Perbaikan mekanisme dan pola penyaluran bantuan kepada kelompok tani dan	1. Penjaringan masukan pedum pengelolaan bantuan pemerintah mendukung pengembangan korporasi petani	21 September

Milestone	Kegiatan	Waktu
Gapoktan untuk dikelola secara korporasi	2. Rapat evaluasi pelaksanaan anggaran pada kegiatan <i>Food Estate</i>	21 September
	3. Diskusi dan pembahasan Penyusunan Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian	27 September
	4. Rapat Koordinasi Pembahasan Penyusunan Pedum Pengelolaan Bantuan Pemerintah mendukung Korporasi Petani	13 Oktober

Penyusunan Perbaikan mekanisme dan pola penyaluran bantuan kepada kelompok tani dan Gapoktan untuk dikelola secara korporasi diawali dengan diskusi dan menggali informasi dari perwakilan bagian perencanaan di masing-masing Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Selain itu, rapat koordinasi dengan tim substansi dan Kementerian Keuangan juga dilakukan untuk mendapatkan masukan yang lebih komprehensif, khususnya terkait dengan usulan mekanisme bantuan pemerintah. Penyelesaian usulan perbaikan mekanisme bantuan pemerintah untuk dikelola secara korporasi dapat diselesaikan pada tanggal 13 Oktober 2021, atau lebih cepat dari target awal yaitu pada tanggal 15 Oktober 2021.

5. Milestone Kelima

Pelaksanaan milestone ketiga dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, seperti terlihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 *Milestone* Kelima Proyek Perubahan

Milestone	Kegiatan	Waktu
Perbaikan Penyusunan Draft Pedum Penguatan Kelembagaan Petani dalam Mendukung Pengembangan Korporasi Petani	1. Rapat Koordinasi Tim Efektif Internal Biro Perencanaan	5 Oktober
	2. Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I tentang Pembahasan Penetapan Lokasi Korporasi Petani dan Nelayan (KPN) Percontohan Nasional	8 Oktober
	3. Progress penyusunan rencana bisnis Korporasi Petani Padi PT. Tani Mulus Emas di Kabupaten Subang	12 Oktober
	4. Rapat Koordinasi Pembahasan Penyusunan Pedum	13 Oktober

Milestone	Kegiatan	Waktu
	Kelembagaan Petani dalam Pengembangan Korporasi Petani	
	5. Rapat Koordinasi Pembahasan Perkembangan <i>Major Project</i> Korporasi Petani Bandung	13-14 Oktober
	6. Penajaman Rancangan Pengembangan Korporasi Petani di Kabupaten Subang	13 -15 Oktober
	7. Pengembangan <i>Food Estate</i> berbasis Korporasi Petani menuju JAMBI MANTAB	18 Oktober
	8. Harmonisasi Rancangan Permentan tentang Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani	18 Oktober
	9. Seminar Nasional : Perkembangan Pelaksanaan <i>Food Estate</i> di Kalteng dalam mendukung Ketahanan Pangan dan Mendongkrak Kesejahteraan Petani	18 -19 Oktober
	10. Bimtek Korporasi Petani untuk Desa Korporasi Sapi di Kab. Solok Selatan	19 -20 Oktober
	11. Bimtek Korporasi Petani untuk Desa Korporasi Sapi di Kab. Sidrap Sulawesi Selatan	20 Oktober
	12. Bimtek Korporasi Petani untuk Desa Korporasi Sapi di Kab. Aceh Besar	20 Oktober
	13. Bimtek Korporasi Petani untuk Desa Korporasi Sapi di Kab. PPU Kalimantan Timur	20 Oktober
	14. Bimtek Korporasi Petani untuk Desa Korporasi Sapi di Kab. Cianjur	22 Oktober
	15. Koordinasi Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	22 Oktober

Penyusunan Perbaikan Penyusunan draft Pedoman Penguatan Kelembagaan Petani dalam mendukung pengembangan korporasi petani diawali dengan Rapat Koordinasi Tim Efektif Internal Biro Perencanaan pada tanggal 5 Oktober 2021 untuk

membahas *outline*-nya. Selanjutnya dilakukan rapat tim substansi untuk memberikan masukan terkait dengan ruang lingkupnya dan substansi yang akan dibahas dalam pedoman tersebut. Selain itu, kunjungan lapangan dan rapat koordinasi juga dilakukan dalam rangka memetakan permasalahan di tingkat lapangan sehingga dapat memperkaya pemahaman Tim dalam penyusunan Pedoman Penguatan Kelembagaan Petani. Penyusunan pedoman ini dapat diselesaikan pada tanggal 22 Oktober 2021 atau sesuai dengan jadwal yang telah ditargetkan.

BAB IV.

MARKETING SEKTOR PUBLIK DAN PEMBERDAYAAN ORGANISASI

A. Peran *Stakeholder* dan Pengaruhnya

Implementasi Rancangan Proyek Perubahan ini diarahkan untuk dapat merubah pola pikir banyak pihak tentang kebijakan pengembangan korporasi petani. Selain itu diharapkan semua pihak mendukung upaya menjadikan Kementerian Pertanian sebagai suatu organisasi yang *Agile*, sehingga dapat dengan lincah menjalankan perannya melalui regulasi yang tepat.

Upaya ini tentunya memerlukan proses sosialisasi yang baik, sehingga gagasan ini mendapat dukungan yang baik dari semua pihak terkait. Sebagai langkah awal dalam membangun strategi marketing dalam upaya mempengaruhi para pihak terkait maka perlu dipetakan terlebih dahulu pemangku Kepentingan yang ada dan bersentuhan dengan rancangan proyek perubahan ini. *Stakeholder* yang terlibat dan mempunyai peran dan pengaruh terhadap proyek perubahan adalah sebagai berikut:

1. *Stakeholder* Utama

- a. Sekretaris Jenderal Kementan
- b. Pusat Penyuluhan Pertanian Kementan
- c. Eselon I Lingkup Kementan
- d. Eselon II Lingkup Kementan
- e. Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas
- f. Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian
- g. Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan teknologi Sekretariat Kabinet
- h. Kepala Biro Hukum Bappenas

2. *Stakeholder* Pendukung

- a. Asdep Pengembangan dan Pembaruan, Kemenkop dan UMKM
- b. Bank Indonesia
- c. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
- d. Asosiasi yang mewakili pelaku usaha di Bidang Pertanian

- e. Petani diwakili oleh KTNA
- f. NGO yang peduli korporasi petani

Berdasarkan analisis stakeholder baik stakeholder utama maupun pendukung dalam pelaksanaan proyek perubahan ini adalah sebagai berikut:

1. Kelompok *Promoters (high influences and high interest)* adalah kelompok yang memiliki kepentingan besar terhadap program dan juga kekuatan untuk membantu dalam keberhasilan atau ketidak berhasilan proyek perubahan ini sehingga pihak ini yang pertama diberi pemahaman penuh terhadap proyek perubahan, yaitu:
 - a. Sekretaris Jenderal Kementan
 - b. Pusat Penyuluhan Pertanian Kementan
 - c. Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas
 - d. Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis Kemenko Bidang Perekonomian
 - e. Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan teknologi Sekretariat Kabinet
2. Kelompok *latens (high influences and low interest)* ini adalah kelompok yang yang tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam program proyek perubahan, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi program jika mereka tertarik. Untuk itu akan dilakukan diskusi intensif dan juga penerimaan umpan balik yang maksimal dari para pihak ini, yaitu:
 - a. Eselon I lingkup Kementan
 - b. Eselon II Lingkup Kementan
 - c. Kepala Biro Hukum Bappenas
 - d. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
3. Kelompok *Defenders (low influences dan high interests)* yaitu kelompok yang kurang memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan dukungannya dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi program dalam proyek perubahan. Walaupun pengaruhnya kecil namun suara mereka akan sangat menentukan pola sikap dan tindak yang ada di *promoters* dan *latens*. Kelompok defenders yaitu:
 - a. Asosiasi yang mewakili pelaku usaha di bidang pertanian
 - b. Petani yang diwakili oleh KTNA

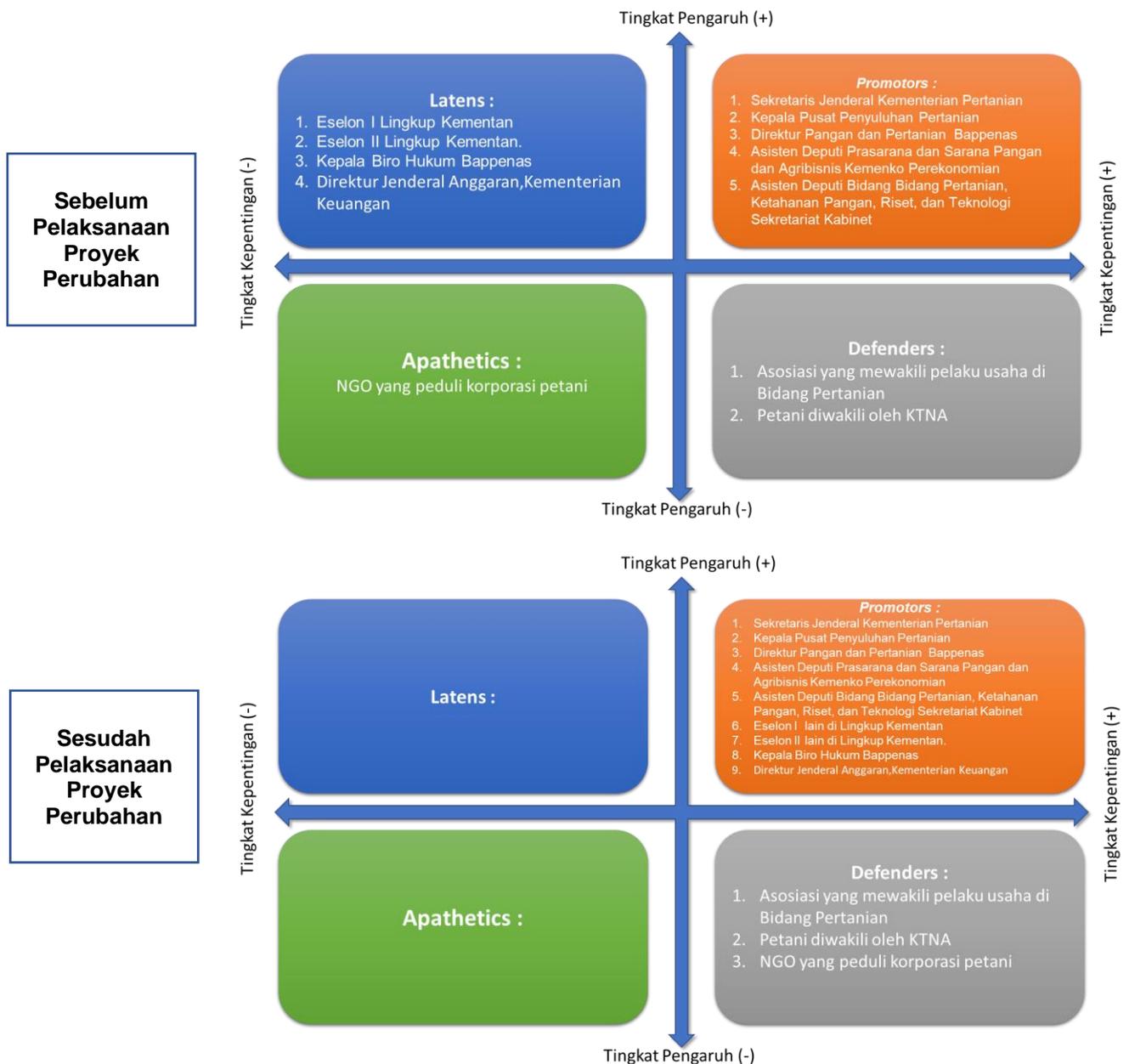
4. Kelompok *apathetics (low influence and interest)* adalah *stakeholder* yang kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan bahkan mungkin tidak mengetahui adanya program perubahan. Kelompok ini adalah NGO yang peduli korporasi petani.

Dalam pelaksanaan Proyek Perubahan ini, setiap *stakeholder* memiliki peran masing-masing hal ini dapat dijelaskan pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Peran *stakeholder* dalam Implementasi Proyek Perubahan

NO	STAKEHOLDERS	PERAN
1.	Sekretaris Jenderal	Mengkoodinasikan dan menyusun kebijakan dan regulasi pengembangan korporasi petani
2.	Pusat Penyuluhan Pertanian Kementan	Pelaksana penguatan kelembagaan petani dan penyuluh mendukung pengembangan korporasi petani
3.	Eselon I Lingkup Kementan	Pelaksana pengembangan korporasi petani
4.	Eselon II Lingkup Kementan	Pelaksana pengembangan korporasi petani
5.	Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas	Menyusun kebijakan dan regulasi pengembangan korporasi petani
6.	Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian	Mengkoordinasikan pelaksanaan <i>Major Project</i> korporasi petani antar lintas K/L pengembangan korporasi petani
7.	Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan teknologi Sekretariat Kabinet	Mengevaluasi pelaksanaan <i>Major Project</i> korporasi petani antar lintas K/L pengembangan korporasi petani
8.	Kepala Biro Hukum Bappenas	Menyusun Rperpres tentang pengembangan korporasi petani
9.	Asdep Pengembangan dan Pembaruan Kemenkop dan UMKM	Pelaksana pengembangan koperasi mendukung pengembangan korporasi petani
10.	Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan	Menyiapkan anggaran pelaksanaan <i>Major Project</i> korporasi petani antar lintas K/L
11.	Asosiasi yang mewakili pelaku usaha di Bidang Pertanian	Membangun kerjasama bisnis dengan korporasi petani
12.	Petani diwakili oleh KTNA	Pelaku yang mewakili petani yang tergabung dalam korporasi petani
13.	NGO yang peduli korporasi petani	Mendampingi petani dalam menumbuhkan dan mengembangkan korporasi petani

Berdasarkan peran stakeholder maka dapat digambarkan kuadran stakeholder adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1. Perubahan Pemangku Kepentingan Implementasi Proyek Perubahan

B. Bentuk Marketing

Bentuk strategi marketing dalam proyek perubahan ini adalah strategi marketing mix 4P dan 1C (*Product, Price, Place, Promotion dan Customer*). **Product** bisa saja *tangible* (berwujud) atau *intangible* (tidak berwujud), karena definisinya adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memuaskan keinginan

dan kebutuhan, sejumlah nilai yang muncul dalam proses transaksi. **Price** adalah korbanan waktu, usaha, serta dampak psikologis adalah yang mungkin stakeholders bayar, namun tidak harus dalam bentuk uang. **Place** terkait dengan di mana, kapan, dan bagaimana stakeholders mendapatkan jasa yang ditawarkan, dan apakah pengalaman tentang jasa tersebut menyenangkan. **Promotion** seringkali digambarkan sebagai komunikasi persuasif dari suatu organisasi yang di dalamnya termasuk advertising, opini dan berita. **Customer** atau pelanggan adalah orang yang melakukan transaksi pembelian atau menggunakan atas produk yang dihasilkan.

Perhatian lebih diberikan kepada para pihak yang berada dalam posisi sebagai *defenders*, *apethics* dan *latens*. Diharapkan dengan strategi marketing yang baik para pihak ini pada akhirnya akan mendukung pelaksanaan dari Rancangan Proyek Perubahan ini.

Strategi marketing disesuaikan dengan posisi dari para pihak yang ada. Untuk *Aphetics* misalnya pada tahap awal perlu dipengaruhi dengan membangun opini tentang perlunya regulasi tentang pengembangan korporasi petani. Penggunaan berbagai media, yang memungkinkan hal ini dapat mereka ketahui akan menjadi perhatian utama dalam marketing strategi.

Tabel 4.2. Marketing Strategi Sektor Publik Implementasi Proyek Perubahan

Komponen	Strategi
<i>Product</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan draft Rperpers tentang pengembangan korporasi petani kepada Bappenas sebagai pemrakarsa 2. Perubahan peraturan menteri pertanian nomor 18 tahun 2018 tentang pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani 3. Pedum penguatan kelembagaan petani dalam pengembangan korporasi petani 4. Usulan draft Perbaikan Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Mendukung Pengembangan Korporasi Petani
<i>Price</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran teralokasi secara tepat 2. Kebijakan dan regulasi yang efektif dan efisien 3. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
<i>Place</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biro Perencanaan Sekretaris Jenderal 2. Kementerian Pertanian dan K/L terkait 3. Pemerintah Daerah

Komponen	Strategi
<i>Promotion</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempromosikan Branding (Siap Korporasi Petani) pada media sosial seperti: Media Republika, Sinar Tani, dan Youtube 2. Sosialisasi dan bimtek kepada para <i>stakeholder</i>
<i>Customer</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Unit Eselon I Kementan 2. K/L terkait 3. Pemerintah Daerah 4. Petani

C. Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi dengan stakeholder dengan perbedaan posisi akan dilakukan dengan cara yang berbeda. Secara detilnya strategi komunikasi pada *promoters*, *Latents*, *Defenders* dan *aphatetics* seperti terlihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Strategi Komunikasi dengan beragam *stakeholder*

Harapan/Strategi Komunikasi	Kelompok <i>Stakeholder</i>	
	<i>Promoters</i>	<i>Latents</i>
Harapan	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Penuh terhadap Proyek Perubahan • Pemanfaatan Proyek Perubahan dan pengambilan keputusan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan terhadap Proyek Perubahan • Memberikan masukan perbaikan • Fasilitasi koordinasi lintas K/L
Strategi Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi yang intensif • Pelibatan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Relasi personal dan pemberian pemahaman yang utuh • Sosialisasi berkesinambungan
	<i>Defenders</i>	<i>Aphatetics</i>
Harapan	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan dukungan berupa data dan informasi • Terlibat aktif memberikan dukungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan Dukungan dalam implementasi • Fasilitasi dalam koordinasi
Strategi Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Melibatkan dalam beberapa kegiatan • Publikasi melalui Media 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelibatan sebagai partisipan aktif • Sharing dana dan dukungan lainnya.

D. Peran *Project Leader* dalam Implementasi Proyek Perubahan

Peran *Project Leader* dalam Implementasi Proyek Perubahan sangat penting dalam mengarahkan dan menggerakkan semua potensi SDM dan sumberdaya lainnya dalam mengimplementasikan proyek perubahan. Secara detilnya peran *Project Leader* dalam Implementasi Proyek Perubahan terlihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Peran *Project Leader* dalam Implementasi Proyek Perubahan

No	Kegiatan/Output	Peran <i>Project Leader</i>
1.	Usulan Draft RPerpres tentang pengembangan korporasi petani kepada Bappenas sebagai pemrakarsa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengarahkan dan membagi tugas Tim Efektif untuk penyiapan Draft RPerpres tentang pengembangan korporasi petani. 2. Mendiskusikan dan memberikan masukan untuk penyempurnaan Draft RPerpres tentang pengembangan korporasi petani yang telah disiapkan oleh Tim Efektif. 3. Mendiskusikan dan mendengarkan masukan untuk penyempurnaan Draft RPerpres tentang pengembangan korporasi petani di lingkup Kementan 4. Mengkoordinasikan dengan Bappenas terkait dengan substansi usulan Rperpres tentang korporasi petani 5. Melakukan dialog dan memberikan framework usulan Rperpres kepada Bappenas. 6. Menjelaskan substansi pengembangan korporasi pada rapat lintas K/L yang diinisiasikan oleh Bappenas dan Kemenko Perekonomian. 7. Memberikan arahan pada setiap rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Bappenas dalam menyiapkan draft usulan Rperpres tentang korporasi petani.
2.	Draft final revisi Permentan tentang pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengarahkan dan membagi tugas Tim Efektif untuk penyiapan Draft final revisi Permentan tentang pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani. 2. Mendiskusikan dan memberikan masukan untuk penyempurnaan Draft final revisi Permentan tentang pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani yang telah disiapkan oleh Tim Efektif 3. Memimpin rapat untuk mendiskusikan dengan para pemangku kepentingan di lingkup Kementan untuk penyempurnaan substansi rancangan permentan. 4. Memimpin rapat untuk harmonisasi revisi rancangan permentan tentang pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani dengan K/L terkait

No	Kegiatan/Output	Peran <i>Project Leader</i>
		5. Mengarahkan dan membagi tugas Tim Efektif untuk menindaklanjuti hasil harmonisasi revisi rancangan permentan tentang pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani.
3.	Usulan draft perbaikan pedoman umum pengelolaan bantuan pemerintah mendukung pengembangan korporasi petani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengarahkan dan membagi tugas Tim Efektif untuk penyiapan Draft draft perbaikan pedoman umum pengelolaan bantuan pemerintah mendukung pengembangan korporasi petani. 2. Mendiskusikan dan memberikan masukan untuk penyempurnaan Draft perbaikan pedoman umum pengelolaan bantuan pemerintah mendukung pengembangan korporasi petani yang telah disiapkan oleh Tim Efektif. 3. Memimpin rapat koordinasi dengan mengundang pelaksana kegiatan Bantuan Pemerintah (Banper) di lingkup Kementan untuk membahas dan menyempurnaan Draft pedoman umum pengelolaan bantuan pemerintah mendukung pengembangan korporasi petani. 4. Melakukan koordinasi kegiatan banper lingkup Kementan guna memfinalkan raft pedoman umum pengelolaan bantuan pemerintah mendukung pengembangan korporasi petani.
4.	Pedoman Umum Penguatan Kelembagaan Petani dalam Pengembangan Korporasi Petani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengarahkan dan membagi tugas Tim Efektif untuk penyiapan Pedoman Umum Penguatan Kelembagaan Petani dalam Pengembangan Korporasi Petani. 2. Mendiskusikan dan memberikan masukan untuk penyempurnaan Pedoman Umum Penguatan Kelembagaan Petani dalam Pengembangan Korporasi Petani yang telah disiapkan oleh Tim Efektif. 3. Mendorong tim efektif untuk melakukan dialog dan diskusi dengan nara sumber untuk menetapkan ruang lingkup pengaturan dari pedoman Umum Penguatan Kelembagaan Petani dalam Pengembangan Korporasi Petani. 4. Memberikan arahan penajaman tujuan, sasaran dan penajaman ruang lingkup pedoman. 5. Memimpin rapat koordinasi lingkup Kementan untuk membahas dan menyempurnaan Draft pedoman Umum Penguatan Kelembagaan Petani dalam Pengembangan Korporasi Petani. 6. Mengarahkan untuk menindaklanjuti hasil koordinasi guna memfinalkan Draft pedoman Umum Penguatan Kelembagaan Petani dalam Pengembangan Korporasi Petani.

E. Kendala dan Strategi Mengatasi Kendala

Kondisi tidak normal di tengah ancaman pandemi COVID-19 saat ini jelas bukan suatu kondisi ideal bagi pelaksanaan proyek perubahan. Hal itu terkait dengan dua hal, pertama masalah prioritas perhatian pemerintah dan para pihak terkait, dan yang kedua tentunya karena pola kerja saat ini dan beberapa waktu ke depan masih dominan kerja dari rumah, maka untuk itu perlu dipetakan kendala dan masalah yang ada serta solusinya.

Selain itu karena ini akan merubah pola kerja dan juga persinggungan dengan hal-hal baru maka dapat diperkirakan resistensi dari para pihak, terutama yang berada pada posisi zona nyaman dan tidak ingin diusik dengan proyek perubahan ini. Hal-hal ini perlu diantisipasi dengan baik. Secara rinci kendala, resiko serta solusinya seperti terlihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5. Kendala, Resiko dan Strategi Mengatasinya.

No.	Kendala	Resiko	Strategi Mengatasi Masalah
1.	Kebijakan selama Masa Pandemi dengan pemberlakuan jam kerja yang dominan dari rumah	Penyelesaian target dan <i>milestone</i> tidak tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan pola kerja online. • Membangun tim kerja lintas institusi yang militant
2.	Keterbatasan waktu tim efektif karena tugas rutin yang juga banyak	Dukungan untuk pencapaian <i>Milestone</i> tidak optimal	Pemberian <i>reward</i> dalam bentuk yang sejalan dengan aturan.
3.	Resistensi para pihak untuk mau berubah	Kesulitan dalam membuat kebaruan dalam regulasi	Melakukan pendekatan khusus dan meyakinkan akan manfaat Proyek Perubahan bagi yang bersangkutan
4.	Pergantian pimpinan dan tim efektif karena pensiun, mutase atau promosi	Dukungan untuk pencapaian <i>Milestone</i> tidak optimal	Adanya Back up tim dengan kualitas yang sama, serta pencatatan dan dokumentasi semua proses, sehingga mudah mengkomunikasikannya dengan tim yang baru.

BAB V.

PENUTUP

A. Simpulan

Pelaksanaan Proyek Perubahan Strategi Akselerasi Pengembangan Korporasi Petani diharapkan menjadi suatu terobosan dalam mengakselerasi terwujudnya pengembangan 350 korporasi petani sampai pada tahun 2024. Upaya percepatan sudah tercapai dari 5 Major Project korporasi petani menjadi 33 Major Project Korporasi Petani. Pengembangan korporasi petani diyakini mampu menggerakkan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya secara terintegrasi, konsisten, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan petani.

Dalam kurun waktu 60 (enam Puluh) hari pelaksanaan Laboratorium Kepemimpinan dalam bentuk implementasi Proyek Perubahan seluruhnya berjalan dengan baik. Hal ini didukung dengan strategi komunikasi yang efektif sehingga mampu menggeser stakeholder ke promoters, peran *project leader* yang mampu menggerak dan menumbuhkan rasa memiliki serta strategi marketing 4P1C yang berhasil pengaruhi persepsi dan partisipasi. Kondisi ini menyebabkan kegiatan – kegiatan dalam milestone dapat tercapai secara tepat waktu. Terlepas dari berbagai kekurangan yang ada, Strategi Akselerasi Pengembangan Korporasi Petani mampu memberikan kontribusi nyata dalam penyusunan kebijakan dan regulasi tentang pengembangan korporasi petani, baik di tingkat nasional maupun di internal Kementerian Pertanian.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka pelaksanaan proyek perubahan ini dapat disarankan beberapa hal yaitu:

1. Melanjutkan tahapan proyek Perubahan Jangka Menengah dan Jangka Panjang.
2. Melakukan **Gerakan Pengembangan Korporasi Petani** secara nasional dengan menggerakkan berbagai stakeholder secara optimal dalam membangun korporasi petani.
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas Kementerian/Lembaga dalam rangka membangun Korporasi Petani.

C. Lesson Learnt

Bertitik tolak dari pengalaman dalam mengimplementasikan Proyek Perubahan ini, maka beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai *Lesson Learned*, sebagai berikut:

- Memahami kebijakan dan regulasi tentang korporasi petani sebagai arah dan pedoman dalam merancang dan mensinergikan berbagai kegiatan aksi atau program pengembangan korporasi petani antar K/L.
- Memberikan pemahaman tentang konsep korporasi petani perlu terus dilakukan di jajaran birokrasi karena masih banyak jajaran birokrasi belum memahami dengan baik konsep korporasi petani. Karena itu, diperlukan koordinasi dan sosialisasi konsep korporasi petani secara intensif di jajaran birokrasi.
- Menemukan Kunci keberhasilan dalam mengembangkan korporasi petani, yaitu (1) Kebijakan makro yang mendorong kemajuan sektor pertanian dan pengembangan korporasi petani; (2) Dukungan sumber daya manusia yang terintegrasi; (3) Semangat petani untuk terus maju; (4) Model bisnis dan kesepakatan yang *win-win* antar-*stakeholders*; (5) Modal yang cukup untuk mendukung kelangsungan usaha korporasi petani dalam jangka panjang; (6) Kompetensi dan *leadership* pengurus/pengelola korporasi petani; (7) Menerapkan praktek manajemen usaha secara profesional (IT, keuangan, operational, marketing dll); dan (8) Memiliki komitmen dan bertindak profesional dalam mentoring dan monitoring.

LAMPIRAN

A. Pra Persiapan Proyek Perubahan

Lampiran 1.a. Form Persetujuan Mentor

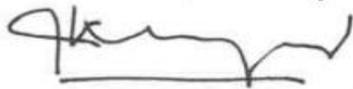
FORM PERSETUJUAN MENTOR
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
ANGKATAN XVIII TAHUN 2021

Nama Peserta : Dr. Ir. Hermanto, M.P.
NDH : 20
Instansi : Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian

Nama Mentor : Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc.
NIP : 196405211990031001
Jabatan : Sekretaris Jenderal
No. HP Mentor : +6281311065162
Gagasan Perubahan : Strategi Akselerasi Implementasi Pengembangan Korporasi Petani

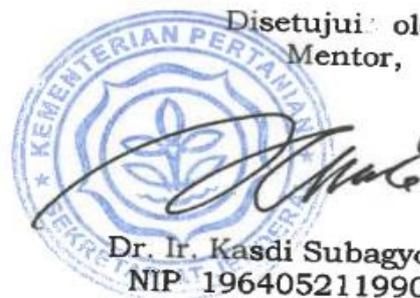
Jakarta, 30 Juli 2021

Mengetahui
Atasan Langsung,



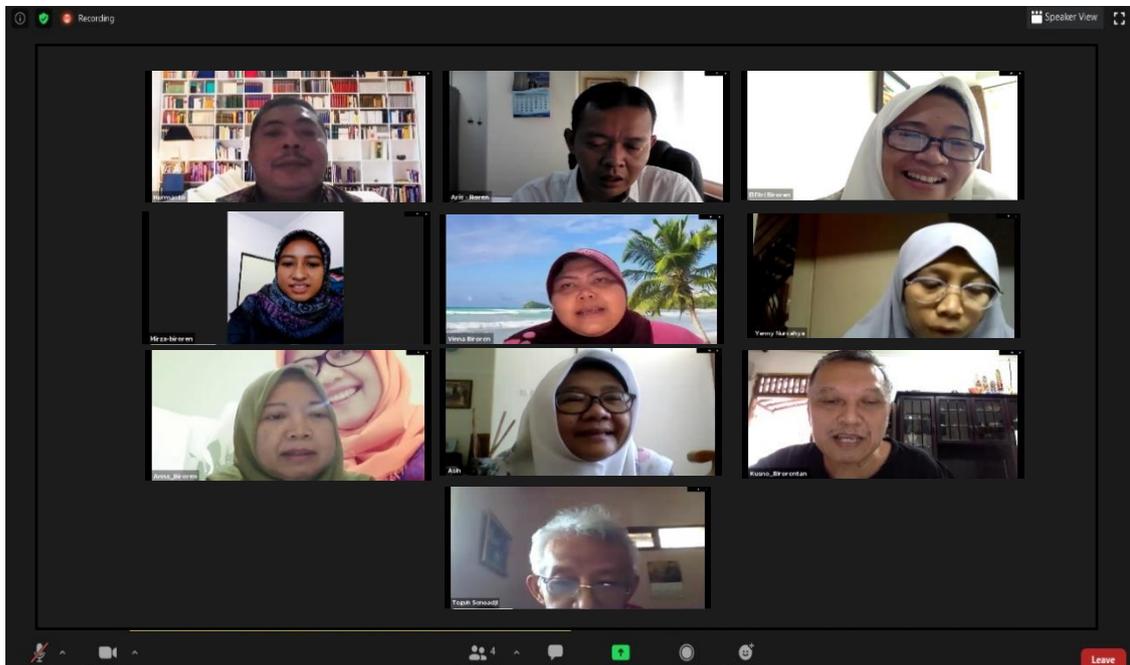
Dr. Ir. I Ketut Kariyasa, M.Si.
NIP 196904191998031002

Disetujui oleh:
Mentor,



Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc.
NIP 196405211990031001

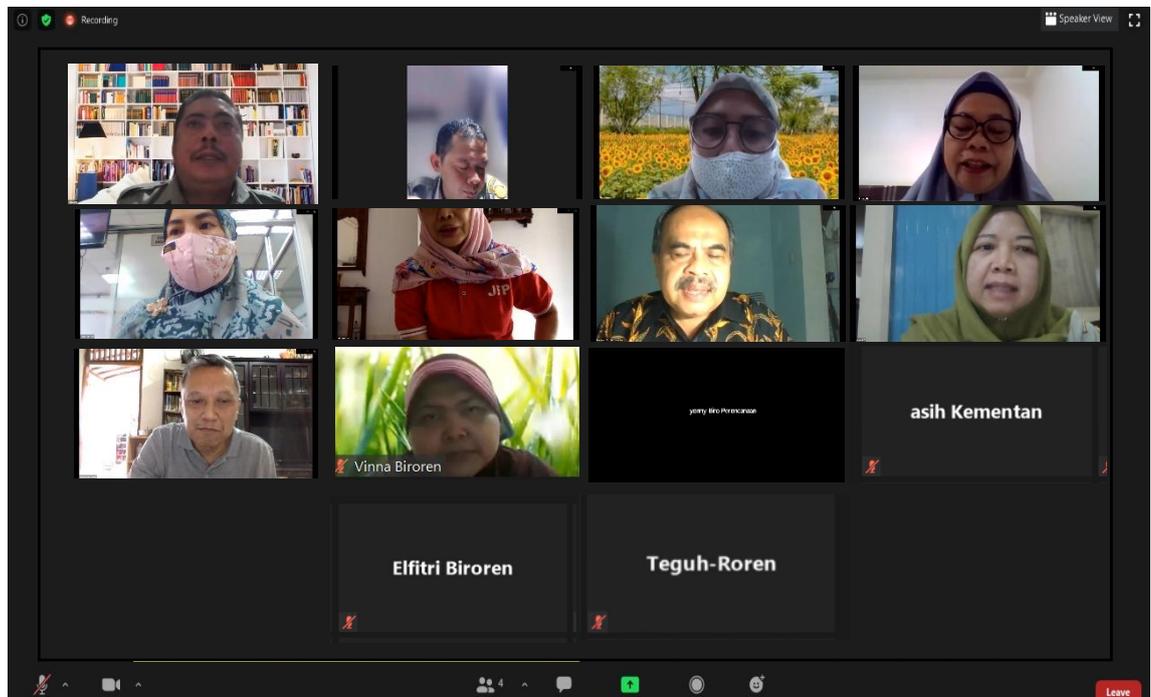
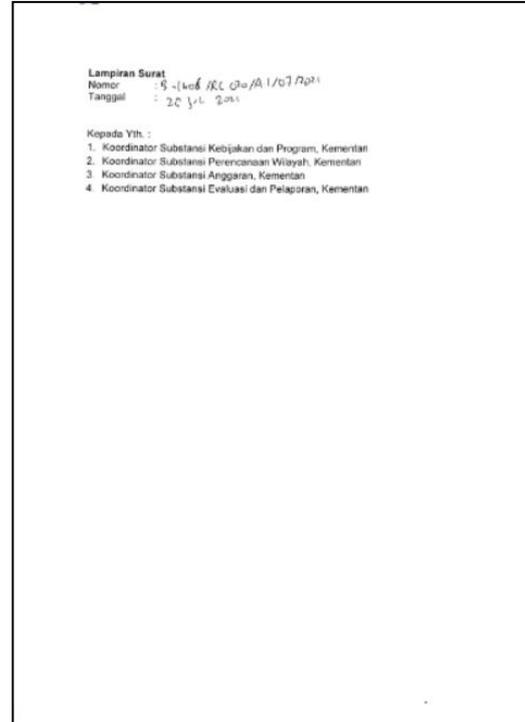
Lampiran 1.a Rapat Koordinasi Awal Proyek Perubahan Strategi Akselerasi Implementasi pengembangan korporasi petani Tanggal 27 Juli 2021



Output:

- a. Masih banyaknya permasalahan terkait korporasi petani, yang terdiri dari permasalahan di tingkat pusat yaitu di internal Kementerian Pertanian, antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian dan Lembaga terkait, tingkat daerah yaitu antara pemerintah pusat dan daerah serta internal pemerintah daerah, dan tingkat petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Untuk itu harus dilakukan pemetaan permasalahan secara detail.
- b. Perencanaan atau konsep korporasi petani yang telah disusun belum sepenuhnya dapat diimplementasikan, sehingga terdapat gap antara konsep dan pelaksanaan di lapangan.
- c. Untuk mengimplementasikan korporasi petani dengan baik di lapangan, maka perlu koordinasi dan kerjasama yang baik antar stakeholder serta memetakan permasalahan secara menyeluruh mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah.
- d. Perlu dirumuskan strategi percepatan pengembangan korporasi petani dengan membentuk tim efektif yang dapat merumuskan perencanaan teknis secara baik.

Lampiran 1.b Rapat Koordinasi Percepatan Implementasi 350 Korporasi Petani Tanggal 29 Juli 2021



NOTULEN

RAPAT AKSELERASI IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN KORPORASI PETANI

Tanggal 29 Juli 2021

Rapat Akselerasi Implementasi Pengembangan Korporasi Petani dilaksanakan pada hari Kamis, 29 Juli 2021 melalui virtual meeting. Rapat dibuka oleh Koordinator Substansi Perencanaan Wilayah, dihadiri perwakilan dari kelompok Substansi Kebijakan dan Program, Perencanaan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan, serta fungsional perencana di kelompok substansi perencanaan wilayah. Tujuan rapat adalah mencari langkah-langkah terobosan untuk mempercepat pelaksanaan *major Project* 350 korporasi sampai tahun 2024. Hasil rapat dapat disampaikan sebagai berikut:

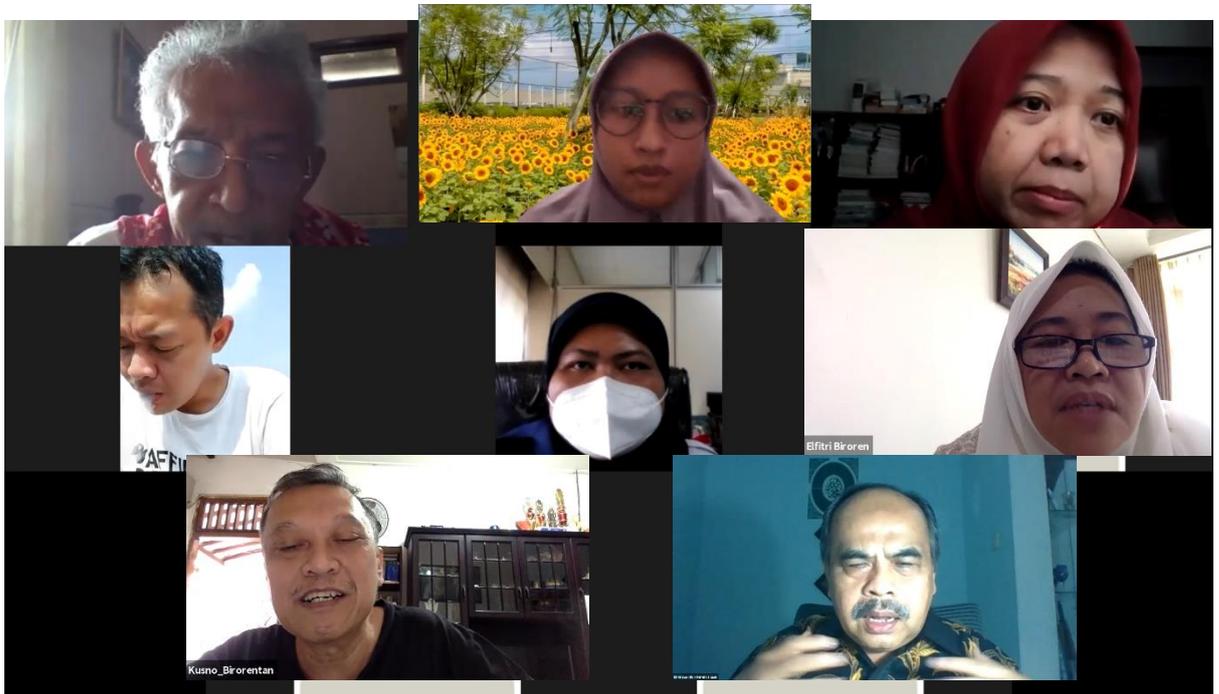
1. Dalam RPJMN 2020-2024 menyebutkan, bahwa Kementan bersama K/L terkait lainnya mendapat mandat untuk membangun korporasi petani sampai dengan tahun 2024 sebanyak 350 korporasi petani. Pada tahun 2020 sudah dibangun sebanyak 5 korporasi petani, namun demikian sampai saat ini pembangunan korporasi petani di Kementan bagai jalan ditempat, hal ini dikarenakan banyaknya permasalahan dan kendala yang ditemukan baik di internal Kementan maupun K/L terkait lainnya.
2. Beberapa Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Korporasi petani:
pertama ditingkat pusat, yaitu: (a) Beragamnya pemahaman Korporasi petani di internal Kementan; (b) Penyusunan perencanaan pengembangan korporasi petani belum terintegrasi dan terpadu; (c) Tidak adanya sasaran indikator kinerja terkait korporasi petani untuk masing-masing eselon I; (d) Tidak adanya Tim/Satuan Tugas Pengembangan Korporasi Petani; (e) Belum ditetapkannya 350 calon lokasi pengembangan korporasi petani di tingkat eselon-1; dan (f) Kurangnya *political will* terhadap pengembangan korporasi petani; **kedua** Tatanan di Tingkat Daerah (Pemda) (a) kurangnya pemahaman pengembangan korporasi petani; (b) belum tersusunnya perencanaan pengembangan korporasi petani di daerah; (c) belum terlihat peran, tugas dan fungsi Pemda sebagai bentuk dukungan pengembangan korporasi petani; (d) tidak adanya dokumen evaluasi pengembangan korporasi petani dan proposal/usulan pengembangan korporasi petani; (e) korporasi petani bukan merupakan indikator kinerja Pemda; dan **ketiga** ditingkat Gapoktan (a) kurangnya pemahaman korporasi petani level Poktan/Gapoktan dan penyuluh pertanian; (b) lambatnya proses konsolidasi petani akibat belum pahamnya tentang korporasi petani, sulit bekerja dalam kelompok dan lokasi yang terpencar; (c) kurangnya pendampingan dalam penguatan manajemen kelompok tani dan usahatani; (d) standar produk yang masih jauh dibawah standar pasar; (e) kurangnya akses petani terhadap sumber pembiayaan, teknologi dan informasi; dan (f) SDM belum siap sehingga perlu pengawalan dan pendampingan secara intensif.

3. Biro Perencanaan harus mememetakan secara detail keterkaitan korporasi dalam dokumen perencanaan. Di samping itu juga untuk memperjelas peran “program” sebagai instrumen pembangunan nasional, dimana program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
4. Diperlukan redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran bertujuan untuk membantu K/L dalam mempersiapkan Program, Kegiatan, dan Keluaran (Output) K/L, sasaran dan indikator serta informasi kinerja lainnya, yang akan digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Apabila hal ini tidak dapat dituangkan dengan jelas di dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Kementan, maka implementasi pelaksanaan major Project pengembangan kawasan sulit untuk direalisasikan.

Tindaklanjut

Rapat lanjutan akan dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2021, untuk mendetailkan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam upaya pengembangan korporasi petani di lingkup eselon satu Kementan

Lampiran 1.c Rapat Koordinasi Penyusunan Peta Permasalahan Pengembangan Korporasi Petani Tanggal 30 Juli 2021



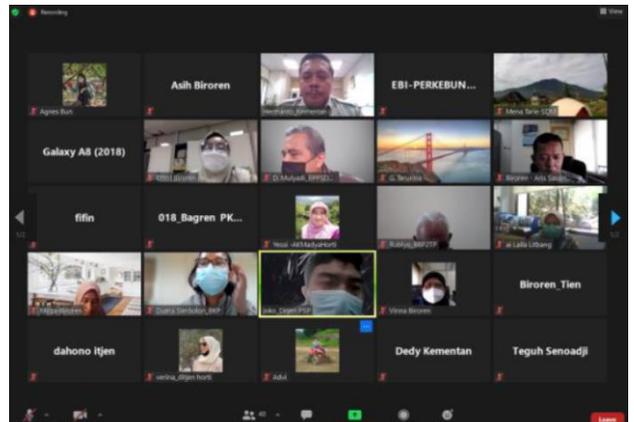
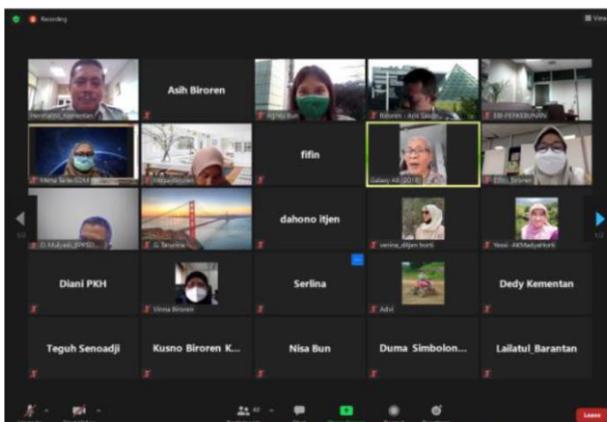
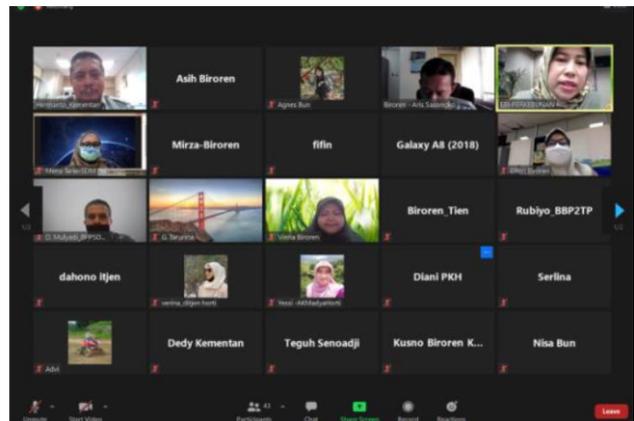
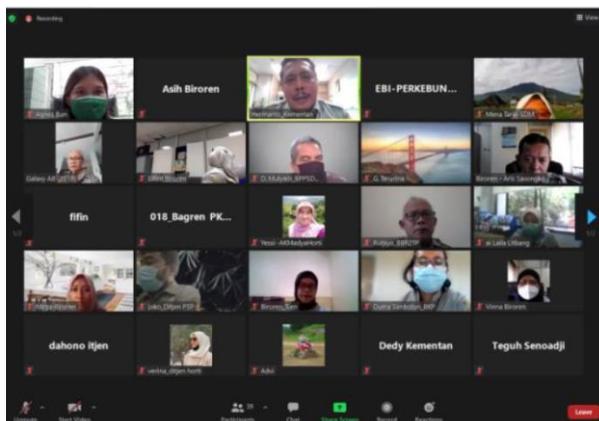
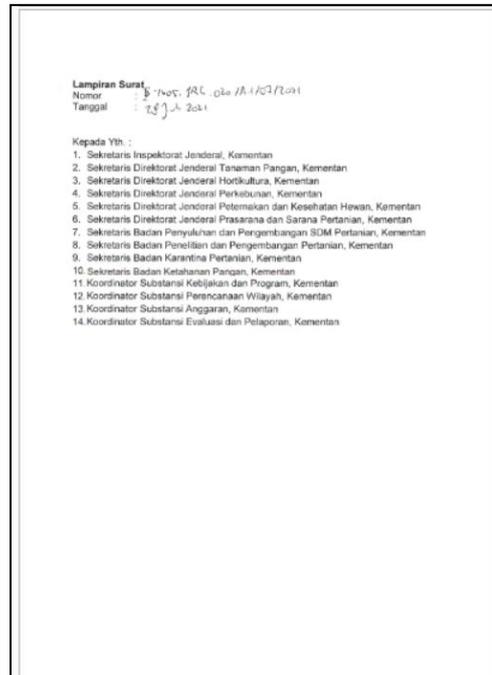
Output:

a. Permasalahan di tingkat pusat meliputi:

- Program Korporasi Petani tidak terintegrasi di Eselon I di lingkup Kementan
- Belum berjalannya siklus perencanaan mulai dari: (a) pengembangan/perencanaan wilayah (lokasi) sesuai potensi (SIKP) dan RTRW, (b) perencanaan kebijakan, program dan kegiatan, (c) penganggaran, dan (d) monitoring dan evaluasinya
- Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengembangan korporasi petani tiap Eselon 1 dilakukan sendiri-sendiri dan belum terkoordinasikan dan terintegrasi secara baik padahal pengembangan korporasi petani bersifat lintas atau multi Eselon 1
- Penyaluran dan pengelolaan bantuan pemerintah dilakukan dengan pola dan versi masing-masing serta masih terkendala proses dan prosedur sehingga belum sepenuhnya dapat terlaksana, terintegrasi dan terkoordinasikan dengan baik
- Sulit memantau perkembangan pengembangan korporasi petani
- Belum diputuskan lokasi *Major Project* pengembangan korporasi petani untuk setiap komoditas, sehingga tidak ada penjabaran kondisi eksisting dan arah pengembangan korporasi petani di masing-masing lokasi.

- Sulit mengakses modal kerja dan modal investasi (kecuali untuk fasilitas KUR individu petani di *on farm*)
 - Belum terkonsolidasinya dan bersinergi pelaku/ aktor pengembangan korporasi petani seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kab/Kota, Swasta/Perusahaan, Akademisi/ Perguruan Tinggi (LPPM) dan Masyarakat tani (petani/ poktan/ gapoktan).
 - Sulitnya mencari luas kawasan pengembangan korporasi petani yang sesuai dengan kriteria *grand design* korporasi petani
 - Sulitnya transformasi kelembagaan petani menjadi kelembagaan ekonomi petani yang mandiri
 - *Grand design* korporasi petani yang disusun belum sepenuhnya dapat diterapkan sesuai variabilitas karakteristik di tingkat lapangan
- b. Permasalahan di tingkat daerah meliputi:
- Belum kuatnya *political will* dari Pimpinan dan Pemda
 - Pemahaman konsep dan implementasi korporasi petani masih terbatas
 - Korporasi petani dijalankan oleh pelaku/pemangku kepentingan secara sendiri-sendiri
 - Pemda dan para pelaku/pemangku kepentingan masih lambat bergerak
 - Sulit monitor dan evaluasi perkembangan pelaksanaan korporasi petani
- c. Permasalahan di tingkat petani meliputi:
- Belum tersampainya program korporasi petani
 - Produksi, produktivitas, kualitas dan kontinuitas produk masih rendah
 - Sulitnya petani untuk mendapat akses permodalan, pasar, adopsi teknologi
 - Lemahnya administrasi dan manajemen usaha tani

Lampiran 1.d Rapat Koordinasi Percepatan Implementasi 350 Korporasi Petani Tanggal 2 Agustus 2021



NOTULEN
RAPAT PERCEPATAN IMPLEMENTASI 350 KORPORASI PETANI
Jakarta, 2 Agustus 2021

Rapat Percepatan Implementasi 350 Korporasi Petani dilaksanakan pada hari Senin, 2 Agustus 2021 melalui virtual meeting. Rapat dipimpin oleh Koordinator Substansi Perencanaan Wilayah, yang dihadiri oleh perwakilan Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Badan Litbang, Badan SDM dan BKP dan Biro Perencanaan. Rapat bertujuan untuk mensinergikan rencana program dan kegiatan di masing-masing unit Eselon I sekaligus memperoleh masukan terkait progress pelaksanaan korporasi petani yang sedang/telah dilaksanakan, sehingga diharapkan dapat menjadi acuan guna mempercepat pelaksanaan korporasi petani di 350 lokasi hingga tahun 2024.

Adapun hasil rapat dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Korporasi petani merupakan kerja bersama yang tidak bisa dilakukan oleh satu atau beberapa unit Eselon I, namun membutuhkan keterpaduan dan harmonisasi antar Eselon I, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi di lapangan.
2. Permasalahan dalam implementasi korporasi petani terdapat pada aspek administrasi maupun teknis di lapangan, yang tidak hanya tugas Kementerian Pertanian, namun juga terkait dengan peran dan dukungan dari pemangku kepentingan lainnya, seperti : K/L lain yang terkait, Pemerintah Provinsi/Kabupaten, Swasta, maupun peran serta petani.
3. Pengembangan 350 korporasi petani yang merupakan *Major Project* dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 merupakan proyek prioritas strategis yang diamanatkan kepada beberapa K/L terkait selain Kementerian Pertanian. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan 350 korporasi petani hingga tahun 2024, diperlukan koordinasi dan sinergitas antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, swasta dan *stakeholder* lainnya.
4. Untuk mempercepat implementasi 350 korporasi petani, perlu dibuat strategi percepatan dengan mempertimbangkan dinamika yang terjadi, seperti pengalaman implementasi korporasi petani di 5 lokasi *pilot project* dan adanya *refocusing* anggaran, agar selanjutnya pengembangan korporasi petani dapat dilaksanakan lebih baik sehingga kehadiran korporasi petani dapat dirasakan manfaatnya oleh petani.
5. Permasalahan yang terjadi dapat dijadikan sebagai titik kritis dalam pengembangan korproasi petani untuk selanjutnya dirumuskan titik ungitnya mencapai target pengembangan 350 korporasi petani.
6. Permasalahan dan upaya dalam pengembangan korporasi petani yang umum terjadi di 5 lokasi pilot Project korporasi petani diantaranya adalah:
 - a. Belum adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar K/L dan *stakeholder* lainnya; siklus perencanaan yang belum terimplementasi

- dengan baik; lokasi 350 korporasi petani yang belum ditetapkan; kurangnya *political Will* pemerintah pusat dan daerah secara jelas; pemahaman korporasi petani yang beragam; tidak adanya Tim atau satuan tugas pengembangan korporasi petani; tidak adanya regulasi yang jelas dalam mendukung pengembangan korporasi petani; serta permasalahan spesifik lokasi lainnya.
- b. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya melakukan koordinasi dan sinergi antar K/L dan stakeholder lainnya, mendorong ditetapkannya regulasi yang mendukung korporasi petani; sosialisasi konsep korporasi petani secara berjenjang, pembentukan tim khusus pengembangan korporasi petani; revisi draft permentan 18/2018; menetapkan 350 lokasi pengembangan korporasi petani; penyempurnaan *Grand Design* dan Pedoman Umum pengembangan korporasi petanu yang dibuat lebih sederhana dan mudah dipahami serta disesuaikan dengan kondisi eksisting; dan strategi lainnya.
7. Masing-masing Eselon I harus menyusun Petunjuk pelaksanaan untuk masing-masing komoditas yang akan dikembangkan dalam korporasi petani sehingga mudah dipahami oleh daerah untuk diimplementasikan pada Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani, terutama dalam implementasi penyaluran dan pengelolaan bantuan pemerintah.
 8. Setiap masalah yang telah dipetakan sebaiknya dibuat skala prioritas dan perlu dibedakan setiap level (Kementan, Kementan dan Luar Kementan, Pemerintah Daerah dan Poktan/Gapoktan).
 9. Mendorong daerah menyusun *Master Plan* pengembangan Kawasan Berbasis Korporasi Petani, karena pola pengembangan komoditas akan berbeda-beda. Pola pengembangan komoditas dapat berupa *single commodity*, *multi commodity* (sebagai pola tanam petani). Oleh karena itu, *masterplan* di daerah harus selaras dengan *masterplan* yang disusun di tingkat pusat. Dengan adanya *masterplan* daerah juga dapat memperjelas peran dan dukungan pemerintah daerah dalam pengembangan korporasi petani.
 10. Dari hasil identifikasi permasalahan dan upaya tersebut, diharapkan kepada masing-masing unit Eselon I untuk melakukan pencermatan hal yang perlu dilakukan segera dalam waktu dekat, utamanya dalam mengejar sisa waktu di tahun 2021.
 11. Dalam waktu dekat akan dilakukan pula pertemuan dengan mengundang Kementerian/Lembaga lain yang terkait dengan korporasi petani untuk dapat mensinergikan kegiatan sekaligus mencari solusi bersama atas kendala yang ada di lapangan.

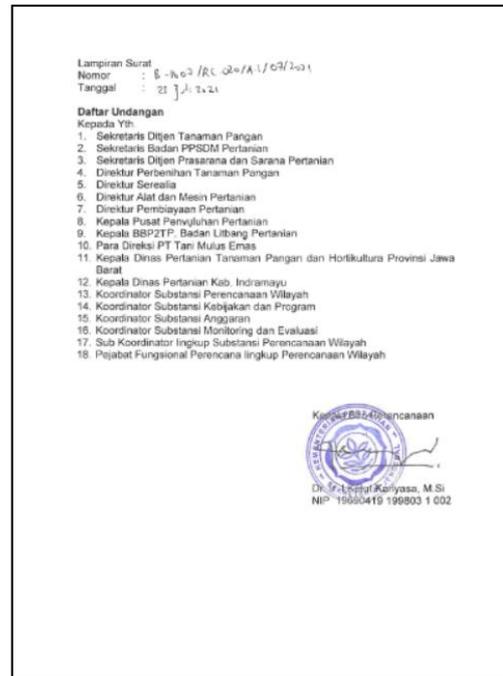
Lampiran 1. e Rapat Virtual terkait Undangan dari KJRI mengenai Partispasi PT JPLM (Korporasi Petani Kopi Kabupaten Bandung) dalam Kegiatan Coffex 2021 Tanggal 3 Agustus 2021

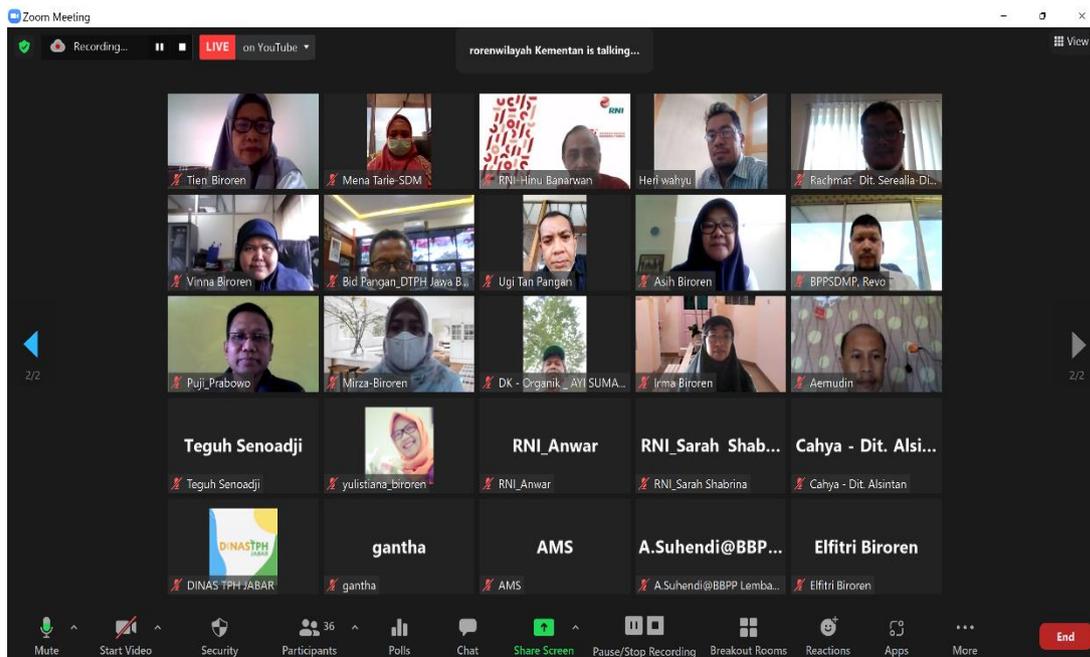


Output:

1. Kegiatan Coffex 2021 merupakan pameran dagang produk kopi yang dilaksanakan secara tahunan di Istanbul, Turki.
2. Coffex 2021 merupakan rangkaian yang ketiga yang telah dimulai sejak tahun 2019.
3. Untuk Coffex 2021, rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 15-18 September 2021, dengan dihadiri oleh ratusan eksportir kopi dari seluruh dunia
4. KJRI berencana akan memfasilitasi PT JPLM dalam ajang pameran berupa penyediaan boot pameran bersama dengan 6 eksportir kopi lainnya
5. Kementerian Pertanian diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada PT JPLM untuk dapat memberikan akomodasi terkait keikutsertaan perwakilan PT JPLM dalam Coffex 2021.
6. PT JPLM agar segera mempersiapkan rencana kebutuhan sampel kopi yang akan dibawa sekaligus sarana promosi yang diperlukan untuk pameran.
7. Akan dilakukan pertemuan lanjutan guna mendetailkan rencana keikutsertaan PT JPLM dalam Coffex 2021.

Lampiran 1. f Rapat Koordinasi Korporasi Petani di Kabupaten Indramayu dalam rangka persiapan penyusunan rencana bisnis korporasi petani pada tanggal 4 Agustus 2021





NOTULEN RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA BISNIS KORPORASI PETANI PT TANI MULUS EMAS Jakarta 4 Agustus 2021

Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Bisnis Korporasi Petani PT Tani Mulus Emas berlangsung secara virtual pada tanggal 4 Agustus 2021, dipimpin oleh Koordinator Substansi Perencanaan Wilayah diikuti oleh peserta PT Kirana Investama Nusantara, PT Rajawali Nusantara Indonesia, PT Tani Mulus Emas, perwakilan dari Ditjen Tanaman Pangan, Badan PPSDM Pertanian, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, BBP2TP, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Jawa Barat, Dinas Pertanian Kab. Indramayu, dan Biro Perencanaan.

Rapat beragendakan: (a) Arahan dari Koordinator substansi Perencanaan Wilayah tentang Rambu-Rambu Penyusunan Rencana Bisnis Korporasi Petani, (b) Pemaparan oleh Direksi Korporasi petani PT Tani Mulus Emas tentang Profil korporasi PT Tani Mulus; dan (c) Pemaparan dari PT Kirana Investasi Nusantara tentang Perkenalan Gerakan Desa Emas dan (d) Pemaparan dari PT RNI tentang Kemitraan Pemenuhan Pasokan. Beberapa hal penting hasil rapat disampaikan sebagai berikut:

1. Rencana bisnis korporasi petani diperlukan untuk memetakan perjalanan bisnis secara detail, yang didalamnya akan menunjukkan potensi sumberdaya, waktu keberhasilan, proses bisnis sehingga dapat dijadikan sebagai guidance dalam mengembangkan bisnis koperasi, baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
2. Tujuan rencana bisnis: membantu korporasi petani untuk kreatif dan fokus pada tujuan, alat untuk mencari dana, sarana komunikasi untuk menarik orang lain,

pemasok, konsumen, dan penyandang dana, mempermudah untuk menjalankan usaha, membuat pengawasan lebih mudah serta sebagai bahan penyusunan strategi dan evaluasi bisnis. Pada prinsipnya perencanaan bisnis dapat diterima oleh semua pihak, fleksibel dan realistis, mencakup seluruh aspek kegiatan usaha, merumuskan cara kerja usaha yang efektif dan efisien. Di dalamnya mencakup rencana pasar, rencana operasional, rencana keuangan dan lain-lain yang terkait dengan kebiasaan dari bisnis yang akan dijalankan.

3. Mekanisme kerjasama yang ditawarkan RNI Holding dilakukan melalui pemberdayaan Petani/Poktan/Gapoktan, koperasi petani dan korporasi petani sehingga peran RNI dapat menjembatani terbangun kerjasama dengan *Off taker* khususnya di lingkup perusahaan BUMN yang berada dibawah kendali PT RNI, seperti Pertani, SHS, Distributor Nusindo.
4. PT Tani Mulus Emas secara umum sudah terbentuk sesuai dengan konsep korporasi petani yaitu kelembagaan, budidaya/konsolidasi, kemitraan dengan PIHC dan Permodalan KUR. Meskipun demikian masih diperlukan penguatan manajemen, pengelolaan keuangan dan kontinyuitas. Saat ini usaha yang telah dikembangkan di korporasi petani PT Tani Mulus Emas adalah Budidaya Padi, Peternakan Unggas dan Kambing. Untuk memperluas skala usaha, PT Tani Mulus Emas diharapkan dapat memperluas target luasan lebih dari 10.000 ha pada tahun 2021 dan memperbanyak petani yang terlibat dalam korporasi petani dengan *core* bisnis tetap pada beras/padi dan pendukung berupa bisnis penyaluran saprodi atau benih.
5. Rencana bisnis jangka pendek PT Tani Mulus Emas adalah sebagai berikut :
 - a. *Divisi Produksi dan Pemasaran*, meliputi kerjasama dengan Gapoktan untuk merekondisi mesin, pengadaan Silo kapasitas 500-1000 ton, menjalin kerjasama dengan BUMN untuk penjualan beras, penjualan produk beras dan juga distribusi pupuk.
 - b. *Divisi Administrasi dan Keuangan*, meliputi menjalin kerjasama dengan investor, penggunaan Administrasi Bisnis dan Investor berbasis digital.
6. Bisnis yang dikembangkan antara Koperasi dan PT Tani Mulus Emas harus jelas, sehingga tidak tumpang tindih atau bersaing tetapi saling melengkapi. Selain itu, memastikan petani yang tergabung dalam korporasi petani mendapat manfaat baik itu harga ataupun produk yang lebih berkualitas.
7. PT Tani Mulus Emas juga merencanakan pada fase 1 untuk mencari *quickwins* agar mendapatkan modal untuk investasi. Sedangkan pada fase kedua direncanakan akan tetap pada bisnis beras dengan perluasan usaha kepada produk-produk yang dibutuhkan *food station*.

B. Rapat konsolidasi persiapan pelaksanaan proyek perubahan

Lampiran 2.a. Rapat persiapan pelaksanaan proyek perubahan akselerasi pengembangan korporasi petani tanggal 9 Agustus 2021



Output:

1. Rancangan strategi akselerasi pengembangan korporasi petani dilakukan dengan untuk menghasilkan output pada jangka pendek, menengah dan panjang. Untuk output jangka pendek yaitu:
 - a. Usulan Draft RPerpres tentang pengembangan korporasi petani kepada Bappenas sebagai pemrakarsa
 - b. Draft final revisi permentan tentang pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani
 - c. Usulan draft perbaikan pedoman umum pengelolaan bantuan pemerintah mendukung pengembangan korporasi petani
 - d. Pedoman umum penguatan kelembagaan petani dalam pengembangan korporasi petani.
2. Agar masing-masing output disusun dengan tim yang beranggotakan perwakilan dari masing-masing Eselon I dan Biro Perencanaan. Selanjutnya agar segera disusun surat permohonan nama tim dari Eselon I dan bagian di Biro Perencanaan. Tim akan disusun dan ditetapkan dalam SK Kepala Biro Perencanaan.
3. SK Tim disusun menjadi tiga tim yaitu tim substansi regulasi, penyiapan data, dokumentasi dan publikasi, serta administrasi. Tim penyusun substansi regulasi terdiri dari tim:

- a. Penyusunan Rancangan Perpres dan Rancangan Permentan Korporasi Petani
 - b. Penyusunan pedoman kelembagaan
 - c. Penyusunan Mekanisme Pengelolaan Bantuan Pemerintah
4. Tim data, dokumentasi dan publikasi harus segera merancang penyusunan video, sehingga setiap proses penyusunan output dapat didokumentasikan dengan baik.

Lampiran 2.b. Surat Permohonan Nama Tim ke Eselon I tanggal 9 Agustus 2021



Surat Permohonan Tim Ke Eselon I



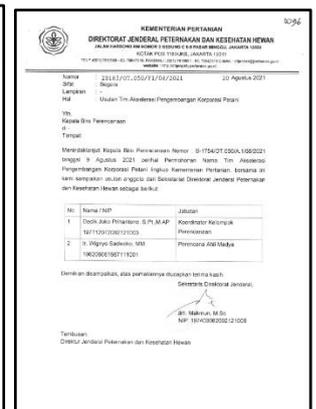
Ditjen Tanaman



Ditjen Hortikultura



Ditjen Perkebunan



Ditjen Peternakan dan Kesehatan



Ditjen Prasaran dan Sarana Pertanian

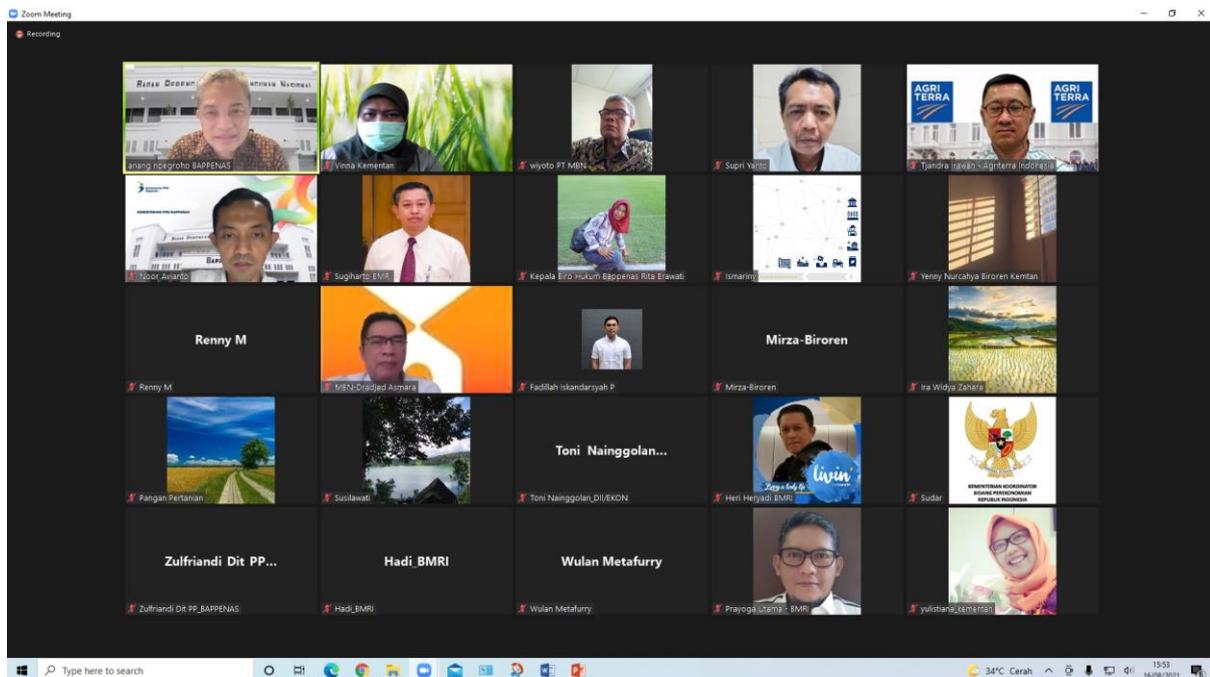


Badan PPSDMP



Badan Litbang

Lampiran 2.c. Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani Tanggal 16 Agustus 2021

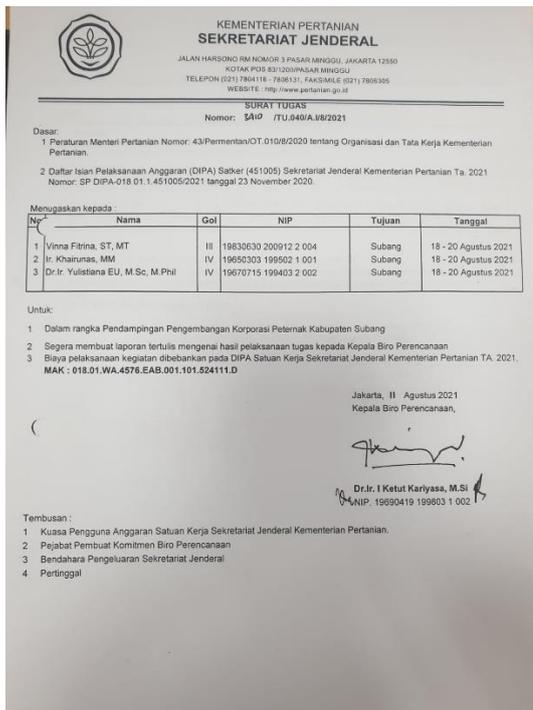


Notulen Pembahasan Harmonisasi
Rancangan Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/2018 tentang
Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani
16 Agustus 2021

1. Revisi Permentan Kawasan Pertanian berbasis korporasi petani dilatarbelakangi pada dua aspek yuridis dan Aspek teknis. Aspek yuridis adalah Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020, keppres nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 serta arahan presiden dalam ratas untuk pengembangan korporasi petani dan akselerasi penguatan sektor pertanian. Sedangkan pada aspek teknis antara lain perubahan dinamika kebijakan, perubahan tataruang, tuntutan perubahan ekonomi global, pengembangan komoditas prioritas nasional, perubahan instrument perencanaan, dinamika perubahan organisasi pengelola Kawasan.
2. Substansi perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/2018 yaitu :
 - a. Mekanisme Penetapan Kawasan Pertanian Nasional
 - b. Kriteria Penetapan Kawasan Pertanian Nasional
 - c. Manajemen Kawasan Pertanian
 - d. Penumbuhan dan Pengembangan Korporasi Petani
 - e. Major Project Korporasi Petani
 - f. Inovasi Teknologi Pertanian 4.0
 - g. Pembiayaan Bisnis Korporasi Petani
3. Didalam rancangan draf permentan ini dibahas dua substansi utama yaitu pengembangan Kawasan dan juga mengembangkan kelembagaan ekonomi dalam bentuk korporasi di dalam Kawasan pertanian ini. Selain itu dalam revisi permentan ini juga ditambahkan substansi pertanian 4.0 untuk menjadi payung hukum dalam mengembangkan smart farming yang juga diamanatkan oleh Bappenas sebagai pengembangan ekosistem teknologi.
4. Didalam draf perubahan ini tidak dimasukkan secara lebih rinci Kawasan Food Estate karena pada dasarnya Kawasan food estate merupakan salah satu kegiatan dalam upaya menunjang pengembangan Kawasan sentra produksi utamanya sentra produksi tanaman pangan.
5. Beberapa poin pembahasan yang perlu ditindaklanjuti adalah;

- a. Perlunya sinergi antara substansi di perubahan permentan dengan rancangan peraturan presiden yang saat ini sedang parallel disusun
- b. Perlunya penjelasan lebih detail terkait dengan *major project* korporasi
- c. Perlunya kesepakatan terkait dengan definisi korporasi termasuk badan usaha korporasi tersebut.

Lampiran 2.d. Pendampingan Pengembangan Korporasi Peternak Kabupaten Subang Tanggal 18-20 Agustus 2021



Koordinasi Korporasi Peternak Subang di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Subang.



Foto kunjungan lapangan ke lokasi pengolahan daging sapi (gepuk) PD. Himpunan Dagang Hewan Ternak (HDHT) yang berada dibawah koordinasi Koperasi Brahman Sejahtera



Foto kunjungan lapangan ke Koperasi Surya Gumilang, sedang diskusi dengan Ketua Koperasi H. Tahu



Foto kunjungan lapangan ke PT Baqara Muda Perkasa sebagai Offtaker Pelaksanaan KUR oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Subang.

NOTULEN
PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN KORPORASI PETERNAK
KABUPATEN SUBANG
Subang, 18 – 20 Agustus 2021

1. Koordinasi awal di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Subang, dimana diskusi dihadiri Kepala Dinas Peternakan dan Keswan Kabupaten Subang, Perwakilan dari Ditjen PKH, Kabid Produksi Ternak dan para pejabat setingkat eselon IV dan staf. Tujuan Koordinasi ini untuk membahas perkembangan pembentukan Korporasi Peternak di Kab. Subang.
2. Selanjutnya dilakukan kunjungan lapangan ke Koperasi Tani Jaya dan Koperasi Surya Gemilang, sebagai calon mitra dengan Koperasi Brahman Sejahtera dalam membentuk Korporasi Peternak Subang atau Perseroan Terbatas (PT); Kunjungan ke salah satu usaha yang berpotensi untuk dikembangkan dalam Korporasi Peternak Subang, dan salah satu mitra/ Offtaker Korporasi Peternakan Subang.
3. Rencana untuk melaksanakan assessment jajaran direksi untuk PT yang akan dibentuk oleh ketiga Koperasi ini akan dilakukan hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021.
4. Kunjungan ke UD. Himpunan Dagang Hewan Ternak (HDHT) yang berlokasi di Desa Cisalak, Kecamatan Cisalak termasuk unit pengolahan daging sapi (gepuk) dikelola oleh Bapak Ligar (termasuk salah satu anggota Koperasi Brahman Sejahtera). Bisnis pengolahan daging sapi (gepuk) yang lebih dikenal dengan *Gepuk Warisan Nini* merupakan usaha yang dijalankan secara turun temurun sejak Tahun 1980. Gepuk terbuat dari tekstur dan daging pilihan (daging paha belakang bagian dalam).
5. **Permasalahan di lapangan** : a) penurunan produksi gepuk akibat Pandemi Covid 19, sebelum Pandemi Covid 19, produksi gepuk 10 kg/hari, dan saat Pandemi covid 19 produksi menurun menjadi 5 Kg/hari, b) UD. HDHT membutuhkan alat pengolahan daging, namun tidak dapat dialokasikan oleh Ditjen PKH karena belum konsisten dalam berproduksi, belum ada lahan untuk ruangan berproduksi, dan c) usaha pengolahan daging sapi (gepuk) masih bersifat pribadi belum ada intervensi nyata dari Koperasi Brahman Sejahtera untuk membantu dalam hal pemasaran.

6. Kunjungan ke Koperasi Tani Jaya (Ketua : Bpk Uut) bersamaan dengan diskusi di lokasi Kelompok Surya Gumilang. Koperasi ini berlokasi di Desa Sindanglaya, Kecamatan Tanjung Siang, terdiri atas 9 kelompok ternak dengan jumlah anggota yang terdaftar 40 orang yang dilayani 425 orang. Jenis Usaha yang dikembangkan adalah : mengelola tanaman pangan (padi, jagung, ubi kayu dan palawija), sapi potong, pupuk organik, dan ayam potong. Awalnya simpanan wajib Rp 2.000 sedangkan simpanan awal Rp 20.000. Sejalan dengan ketentuan baru simpanan wajib Rp 5.000/bulan dan simpanan awal Rp 50.000. Posisi uang Kas Koperasi Tani Jaya Rp 130.000.000.
7. **Permasalahan di lapangan** hampir tidak ada, karena Koperasi berjalan sesuai fungsinya yakni : a) membantu pemasaran produk, b) menyuplai modal pada pengusaha kecil dengan ketentuan < Rp 10 juta bunga 2 % per bulan, sedangkan > Rp 10 juta, bunga 1,5 % per bulan. Intinya koperasi sudah berjalan dengan baik sehingga pimpinan koperasi dan anggota secara bersama membangun koperasi yang modern.
8. Koperasi Surya Gumilang (Ketua : H. Tahyu) yang berlokasi di Desa Cisalak, Kecamatan Cisalak. Terdiri atas 5 kelompok, berdiri Tahun 2010 tetapi tahun 2018 diambil alih kepemimpinannya oleh Bpk Tahyu akibat kecurangan pimpinan sebelumnya. Sebelumnya Bpk Tahyu, membina 9 orang (kelompok ternak Konaah) sebanyak 27 ekor sapi, sekarang tersisa 12 ekor karena dijual pada saat lebaran kemaren. Usaha yang dijalankan adalah : ternak sapi potong, dan usaha ikan lele, mujahir dan nila.
9. **Permasalahan di lapangan** hampir tidak ada, karena pimpinan koperasi jujur dan berjiwa sosial.
10. Kunjungan lapangan ke PT Baqara Muda Perkasa sebagai *Offtaker* dalam pemanfaatan dana KUR dari Bank Rakyat Indonesia. Untuk peternak yang menerima pinjaman dari Dana KUR sebanyak 4 kelompok yaitu : Kelompok Konaah, Jaya Mandiri, LMDH, dan Perkumpulan Kelompok Tani/Ternak penggemukan ataiu lebih dikenal dengan Kelompok KBHD. Jumlah ternak 72 ekor dengan jangka waktu 4 bulan masa penggemukan sapi potong dengan sumber ternak berasal dari Provinsi NTT. Dari 72 ekor yang dipelihara peternak mati 2 ekor dan telah diselesaikan melalui asuransi PT Jasindo.

Lampiran 2.e. SK Tim Perencanaan Program Akselerasi Pengembangan Korporasi Petani tanggal 20 Agustus 2021

KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN HERSANDI NO. 100A, JENDELA BARU, JAKARTA 10260
KOTAN POS 43126/PANJARAN BARANG
TELEPON 021 7961176, 7961175, 7961174, 7961173, 7961172
WEBSITE : www.pertanian.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BIRO PERENCANAAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN**
NOMOR: B-189 / PPS / PC.040 / A.108 / 2021

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERENCANAAN PROGRAM AKSELERASI
PENGEMBANGAN KORPORASI PETANI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA BIRO PERENCANAAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan program Akselerasi Pengembangan Korporasi Petani, maka diperlukan pembentukan Tim Perencanaan untuk mendukung terimplementasinya penyusunan perencanaan program tersebut;

b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Perencanaan Program Akselerasi Pengembangan Korporasi Petani.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani;

4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

-2-

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 10);

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Pertanian Berbasis e-planning;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Membentuk Tim Perencanaan Program Akselerasi Pengembangan Korporasi Petani, dengan susunan keanggotaan seperti tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tim Penyusun Substansi Regulasi

- Merencanakan penyusunan dokumen substansi
- Melakukan analisis dan pengolahan data
- Menyusun dokumen substansi
- Menyusun laporan kegiatan penyusunan dokumen substansi

2. Tim Penyajian Data, Dokumentasi dan Publikasi

- Menyajikan data dan informasi yang diperlukan untuk penyusunan substansi regulasi
- Menyajikan dokumen dan publikasi pengembangan korporasi petani
- Mengkompilasi laporan kegiatan

3. Tim Administrasi

- Menyediakan administrasi kegiatan perencanaan program akselerasi
- Mendokumentasikan dokumen administrasi kegiatan perencanaan program akselerasi

-3-

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Perencanaan Program Akselerasi Pengembangan Korporasi Petani bertanggung jawab dan bertanggung kepada Kepala Biro Perencanaan;

KEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Biro Nomor: SP DIPA-018.01.1.451005/2020, Tanggal 23 November 2020;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pengetikan, maka akan diura dan diperbaiki serta ditetapkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 20 Agustus 2021


Dwi L. Karti Karyana, M.Si
NIP.19690419 199803 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pertanian;
4. Pejabat Pembuat Komitmen, Satker Biro Perencanaan;
5. Bendahara Pengeluaran, Satker Biro Perencanaan;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip

-4-

Lampiran : Keputusan Kepala Biro Perencanaan Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian

Nomor : B-1817/PPPS/PC.040/A.1/08/2021

Tanggal : 20 Agustus 2021

Tentang : Pembentukan Tim Perencanaan Program Akselerasi Pengembangan Korporasi Petani

SUSUNAN TIM PERENCANAAN PROGRAM AKSELERASI PENGEMBANGAN KORPORASI PETANI

Ketua Tim : Dr. Ir. Hermanto, MP, Biro Perencanaan

Sekretaris : Mirza Satriya, SP, M.Si, Biro Perencanaan

Anggota :

A. Tim Penyusun Substansi Regulasi:

1. Penyusun Rancangan Perpes dan Rancangan Permentan Korporasi Petani

Ketua : Yenny Nurwahya S, SP, M.PA, Biro Perencanaan

Anggota :

 - a. Vinta Fitriana, ST, MT, Biro Perencanaan
 - b. Muhammad Ihsan, SE, MM, Biro Perencanaan
 - c. Puji Astuti, SP, MP, Ditjen Tanaman Pangan
 - d. Verina Elvas, SE, MM, Ditjen Hortikultura
 - e. Agnes Verawaty Siakab, SP, MP, Ditjen Perkebunan
 - f. Dedik Joko Prihantono, S.Pt, M.AP, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
2. Penyusun Peloman Kelembagaan

Ketua : Ir. Teguh Seto Adji, Biro Perencanaan

Anggota :

 - a. Susanto, SP, ML, Biro Perencanaan
 - b. Ir. Khairuman, MM, Biro Perencanaan
 - c. Prof. Dr. Ir. Rubyo, M.Si, Badan Litbang Pertanian
 - d. Ir. Sumardi, Beken Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
 - e. Ir. Wigyo Sadewo, MM, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
3. Penyusun Mekanisme Pengalokasian Bantuan Pemerintah

Ketua : Dr. Ir. Yuliana Endah Utami, Biro Perencanaan

Anggota :

 - a. Ir. Rusno Hadituzza, MM, Biro Perencanaan
 - b. Mirwan, SE, MM, Biro Perencanaan
 - c. Ir. Eken Anugraha, MM, Biro Perencanaan
 - d. Hamid Sangaji, SP, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
 - e. IBI Nuliani, SP, M.Si, Ditjen Perkebunan

Lampiran 2.f. Pendampingan Pengembangan Korporasi Petani Hortikultura Sayuran Kabupaten Bandung Tanggal 22-23 Agustus 2021


**KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL**
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 831200/PASAR MINGGU
TELEPON (021) 7804116 - 7806131, FAKSIMILE (021) 7805305
WEBSITE : http://www.pertanian.go.id

SURAT TUGAS
Nomor: ~~2410~~ /TU.040/A.II/2021

Dasar:

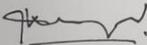
- 1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
- 2 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker (451005) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Ta. 2021 Nomor: SP DIPA-018.01.1.451005/2021 tanggal 23 November 2020.

Menugaskan kepada :

Np	Nama	Gol	NIP	Tujuan	Tanggal
1	Vinna Fitriana, ST, MT	III	19830530 200912 2 004	Subang	18 - 20 Agustus 2021
2	Ir. Khairunas, MM	IV	19650303 199502 1 001	Subang	18 - 20 Agustus 2021
3	Dr.Ir. Yulistiana EU, M.Sc, M.Phil	IV	19670715 199403 2 002	Subang	18 - 20 Agustus 2021

Untuk:

- 1 Dalam rangka Pendampingan Pengembangan Korporasi Peternak Kabupaten Subang
- 2 Segera membuat laporan tertulis mengenai hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Biro Perencanaan
- 3 Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian TA. 2021, MAK : 018.01.WA.4576.EAB.001.101.524111.D

Jakarta, 11 Agustus 2021
 Kepala Biro Perencanaan,

Dr.Ir. I Ketut Kariyasa, M.Si
 NIP. 19690419 199803 1 002

Tembusan :

- 1 Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.
- 2 Pejabat Pembuat Komitmen Biro Perencanaan
- 3 Bendahara Pengeluaran Sekretariat Jenderal
- 4 Pertinggal



Koordinasi Korporasi petani hortikultura di Kopontren Al-Ittifaq dengan perwakilan dari Ditjen Hortikultura, Dinas Pertanian Kab. Bandung dan pengurus Kopontren Al-Ittifaq



Green House di lahan Kopontren Al-Ittifaq

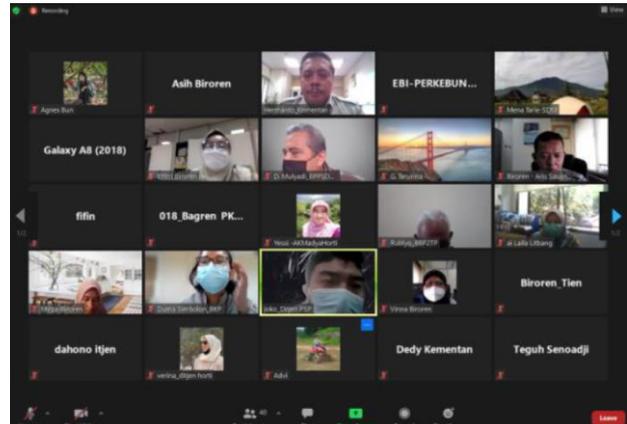
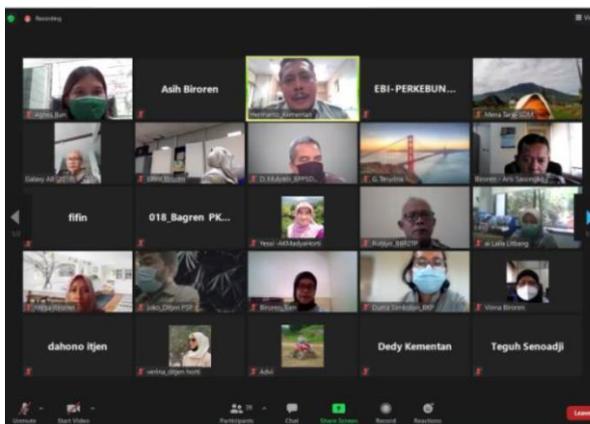
**NOTULEN KUNJUNGAN LAPANGAN PENYUSUNAN PROGRESS
PENGEMBANGAN KORPORASI PETANI HORTIKULTURA KAB. BANDUNG**

1. Bandung, 22-23 Agustus 2021
2. Luas lahan yang dikonsolidasikan oleh Korporasi Petani hortikultura Kab. Bandung melalui Kopontren Al-Ittifaq seluas 198 ha (14 ha milik Pontren, 130 ha milik petani anggota, 84 ha milik petani Pontren binaan).
3. Jumlah Petani/Poktan/Pondok Pesantren sebanyak 270 petani/9 Poktan, 18 Ponpes mitra serta membina 35 Ponpes di Jawa Barat, 7 di Riau dan 5 di Lampung.
4. Produksi Kopontren AL-Ittifaq menghasilkan 126 varian sayur dari 60 jenis sayuran. Kapasitas produksi mencapai 5,7 ton/hari.
5. Unit usaha yang dikembangkan adalah usaha agribisnis, usaha sarana produksi, Usaha Pemasaran: Ritel (toko dan *e-commerce*).
6. Pemasaran produk sayuran yaitu untuk pasar tradisional, pasar modern, resto, rumah sakit, rumah tangga, memiliki retail sendiri (took) dan *e-commerce*
7. Pembiayaan yang telah didapatkan yaitu KUR BRI Syariah, KUR BNI Syariah, PKBL Pertamina, PKBL, PNM dan LPDB.

Tindak lanjut :

1. Pengembangan korporasi petani pondok pesantren dapat disesuaikan dengan telah mempunyai *road map* proses bisnis dan model bisnis yang telah dirancang.
2. Perlu penyusunan rencana pengembangan korporasi petani pondok pesantren yang disepakati oleh Kopontren Al ittifaq, K/L yang terlibat, Pemda Provinsi dan Kabupaten sehingga bisa disusun program kegiatan dan pembagian peran secara jelas sehingga korporasi petani pondok pesantren dapat dilaksanakan secara sistimatis dan konsisten.
3. Perlu dukungan penguatan teknis budidaya untuk petani di Kopontren binaan serta fasilitasi KUR untuk modal kerja usahatani petani.

Lampiran 2.g. Rapat Tim efektif dan persiapan korporasi petani



RUMUSAN

Rapat Tim Perencanaan Program Akselerasi Pengembangan Korporasi Petani dan Percepatan Akselerasi Pengembangan korporasi petani Tahun 2021-2024 Jakarta, 23 Agustus 2021

Rapat Koordinasi Tim Perencanaan Program Akselerasi Pengembangan Korporasi Petani dan Percepatan Akselerasi Pengembangan korporasi petani Tahun 2021-2024 dilaksanakan pada hari Senin, 23 Agustus 2021 melalui *virtual meeting*. Rapat dipimpin oleh Koordinator Substansi Perencanaan Wilayah, yang dihadiri oleh seluruh tim Tim Perencanaan Program Akselerasi Pengembangan Korporasi Petani,

perwakilan Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Badan Litbang, Badan SDM dan Biro Perencanaan. Rapat bertujuan untuk: (1) Mengetahui perkembangan pelaksanaan *major project* korporasi petani pada tahun 2020; (2) Pemilihan/penetapan calon lokasi *major project* korporasi petani untuk tahun 2021-2024 di masing-masing unit Eselon I teknis dan (3) langkah percepatan akselerasi pengembangan korporasi petani. Adapun hasil rapat dapat disampaikan sebagai berikut:

1. *Major Project* korporasi petani yang dilaksanakan pada tahun 2020 terdiri dari 5 lokasi, yaitu korporasi petani padi di Kab. Demak dan Kab. Indramayu, korporasi petani sayuran di Kab. Bandung, korporasi petani kopi di Kab. Bandung dan korporasi peternak sapi potong di Kab. Subang.
2. Perkembangan pelaksanaan *major project* korporasi petani:
 - a. Korporasi Petani Padi di Kab. Demak Jumlah petani anggota Koperasi Citra Kinaraya yang semula berjumlah 75 petani pada tahun 2019 menjadi 125 anggota pada tahun 2021 atau meningkat sekitar 40% dengan luas areal seluas 290 Ha, yang tersebar di 3 kabupaten yaitu Demak, Sragen dan Banyumas. Produk yang dihasilkan oleh koperasi Citra Kinaraya adalah beras Melati (beras putih aromatik), beras brown, beras genki, beras hitam. Kinerja bisnis setelah adanya program korporasi petani mampu meningkatkan omset yang diterima oleh koperasi Citra Kinaraya sebesar Rp 1.4 Miliar dari Rp 2.3 Miliar (2019) menjadi Rp 3.7 Miliar (2020). Hingga bulan Mei 2021 omset koperasi sudah mencapai Rp 1.6 Miliar.
 - b. korporasi petani hortikultura sayuran di Kab Bandung memiliki petani anggota Kopontren Al Ittifaq sejak tahun 2019 hingga sekarang sebanyak 270 orang yang berasal dari 9 kelompok tani. Luas lahan yang dapat dikonsolidasikan seluas 14 Ha (milik koperasi), 130 Ha (lahan 270 petani), 30 Ha (10 kopontren mitra). Produktivitas di tahun 2019 mencapai 4,6 ton/hari dan meningkat sebesar 23,91% atau sekitar 5,7 ton/hari. Sumber pembiayaan petani berasal dari KUR BRI Syariah, PKBL Pertamina, PKBL PNM dan LPDB (total nilai Rp 7,3 Miliar). Produk Kopontren telah dipasarkan ke pasar modern, tradisional dan telah memiliki alifmart online untuk pemasaran secara daring.
 - c. korporasi petani padi di Kab Indramayu memiliki petani anggota yang semula hanya 513 petani pada tahun 2019 menjadi 2.175 anggota pada tahun 2020 atau meningkat sekitar 76,41%. Anggota korporasi petani berasal dari 3 kecamatan (Cikedung, Lelea, dan terisi). Skala usaha korporasi petani saat ini seluas 6.674 Ha dengan rata-rata produktivitasnya 8,4 ton/Ha pada tahun 2020 atau meningkat 40,47% dari tahun 2019, yaitu sekitar 5 ton/ha. Unit bisnis terdiri dari produksi beras (premium dan medium), peternakan unggas dan kambing. Koperasi Tani Mulus bersama PT Kirana Investama Nusantara (KIN) telah membentuk PT Tani Mulus Emas dengan kepemilikan saham PT KIN sebesar 50%, Koperasi 30%, lain-lain 20%.

- d. Korporasi petani Kopi di Kab Bandung memiliki petani anggota korporasi saat ini sebanyak 1.975 anggota yang berasal dari 5 koperasi petani kopi (Marga Mulya, Wanoja, Bukit Amanah, Mandalawangi, dan Mekar Tani). Skala usaha mencapai 12 ribu Ha dengan rata-rata produktivitasnya sekitar 800 Kg/Ha/Tahun. Produk yang dihasilkan terdiri dari specialty dan reguler taste yang merupakan kopi jenis arabika. Kementerian Pertanian telah melakukan perancangan pendampingan maupun pengalokasian modal investasi untuk pembangunan sarana fisik dan penyediaan sarana/prasarana pendukung. Selain itu, pembangunan *Centre Of Excellent* akan dimulai dengan melaksanakan DED di bulan September 2020, dan ditargetkan pembangunan fisik dasar dilaksanakan pada bulan Januari 2022.
 - e. Korporasi peternak Sapi Potong di Kab Subang tercatat jumlah peternak meningkat dari 156 peternak pada tahun 2019 menjadi 706 peternak pada tahun 2020 atau meningkat 77,9%. Usaha yang dikembangkan adalah usaha penggemukan, pembiakan, pengolahan daging, pengolahan pupuk organik dan pengolahan pakan konsentrat. Selain itu, Korporasi ini telah memiliki unit pemasaran berupa outlet ternak dan *meat shop*. Sumber pembiayaan korporasi peternak di Kabupaten Subang masih terbatas pada KUR dengan Bank BRI, serta Jasindo. Koperasi Surya Gemilang dan Koperasi Tani Jaya telah berkomitmen untuk membentuk Korporasi Peternak di Kab. Subang dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT).
3. Usulan calon lokasi pengembangan Korporasi Petani Tahun 2021-2024 (terlampir), dapat disampaikan secara ringkas sebagai berikut : (1) Sub Sektor Tanaman Pangan 38 lokasi; (2) Sub Sektor Hortikultura 71 lokasi; (3) Sub Sektor Perkebunan 24 lokasi; dan (4) Sub Sektor Peternakan 59 lokasi.

Tindak Lanjut :

1. Kementerian Pertanian akan menyiapkan laporan perkembangan pelaksanaan *Major Project* Korporasi Petani Tahun 2020 untuk disampaikan ke Kemenko Perekonomian, Sekretariat Kabinet dan Bappenas paling lambat tanggal 31 Agustus 2021.
2. Penyusunan R-Perpres tentang pengembangan Korporasi Petani dan Nelayan yang telah ditugaskan kepada Bappenas, maka Kementerian Pertanian akan menyiapkan draft usulan R-Perpres untuk dibahas bersama dengan Bappenas dalam rangka mengakselerasi pengembangan korporasi petani. Pembahasan R-Perpres akan dilakukan secara paralel dengan revisi Permentan 18/2018.
3. Dalam rangka mengakselerasi pengembangan Korporasi Petani perlu dipersiapkan program dan kegiatan pada Tahun 2022 yang sesuai dengan kebutuhan untuk pengembangan korporasi petani. Keterlibatan *offtaker* atau investor serta stakeholder perlu terus didorong untuk pengembangan korporasi petani ke depan.

C. Penyiapan Usulan Draft Rperpers Tentang Pengembangan Korporasi Petani

Lampiran 3.a. Pendampingan Pengembangan Korporasi Petani Kopi Kabupaten Bandung Tanggal 24-26 Agustus 2021



Kesiapan Lantai Jemur di Koperasi Mandalawangi



Kesiapan Penggilingan kopi di Koperasi Gunung Puntang



Pertemuan Penjajakan PT JPLM dengan PT Biru Marmara



Pertemuan Intensif Dinas Pertanian, PT Biru Marmara dan PT JPLM

**NOTULEN KUNJUNGAN LAPANGAN PENYUSUNAN PROGRESS
PENGEMBANGAN KORPORASI PETANI KOPI KAB. BANDUNG**

Bandung, 24-26 Agustus 2021

1. Pada Tanggal 24 Agustus 2021, telah terjadi kesepakatan antara PT JPLM dengan ketua-ketua koperasi dibawahnya untuk melakukan kerjasama dengan PT Biru Marmara dalam melakukan ekspor kopi ke negara Turki.
2. PT Biru Marmara akan membantu dalam pemasaran dan pengiriman barang serta modal kerja, sedangkan PT JPLM akan menyediakan komoditas yang diinginkan buyer.
3. Dinas Pertanian Kab. Bandung akan segera melaksanakan pembangunan *Centre Of Excellent*. Program tersebut akan dimulai dengan melaksanakan DED di bulan September 2020, dan ditargetkan pembangunan fisik dasar dilaksanakan pada bulan Januari 2022. Untuk alat dan mesin yang akan ditempatkan di dalam *Centre of Excellent*, Kementerian Pertanian telah melakukan identifikasi dan penyesuaian terhadap jenis, jumlah, dan spesifikasi, sehingga alat dan mesin yang akan diberikan diharapkan mampu untuk memenuhi kapasitas produksi dengan skala bisnis.
4. Tim monitoring mendatangi koperasi-koperasi d bawah PT JPLM untuk melihat kesiapan dari setiap koperasi dalam proses perkembangan selanjutnya PT JPLM

Tindak Lanjut:

1. Akan dilakukan penjajakan pasar di Turki pada bulan September mendatang dan
2. Persiapan penyusunan DED *Centre Of Excellent* oleh Dinas Pertanian Kab.Bandung

Lampiran 3.b. Pendampingan Pengembangan Korporasi Petani Padi Kabupaten Demak Tanggal 23-26 Agustus 2021


KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR BINGGULU, JAKARTA 12550
 KOTA TIKI PUS 89 10000 HARJALAR MINGGU
 TELEPON (021) 7264116 - 7266131, FAKS (021) 7263365
 WEBSITE : http://www.pertanian.go.id

SURAT TUGAS
 Nomor: **SAT/ITU.048/A.88/2021**

Dasar:

- Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/B/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker (451005) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Ta. 2021 Nomor: SP DIPA-018.01.1.451005/2021 tanggal 23 November 2020.

Mengusulkan kepada:

No	Nama	Gol	NIP	Tujuan	Tanggal
1	Vinna Firina, ST, MT	III	19830030 200912 2 004	Subang	18 - 20 Agustus 2021
2	Ir. Khairunas, MM	IV	19850303 199502 1 001	Subang	18 - 20 Agustus 2021
3	Dr.Ir. Yulistiana EU, M.Sc, M.Phil	IV	19670715 199403 2 002	Subang	18 - 20 Agustus 2021

Untuk:

- Dalam rangka Pendampingan Pengembangan Korporasi Petanik Kabupaten Subang
- Sejara membuat laporan tertulis mengenai hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Biro Perencanaan.
- Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian TA. 2021, MAK : 018.01.WA.4576.EAB.001.101.524111.D

Jakarta, 11 Agustus 2021
 Kepala Biro Perencanaan,

Dr. Ir. I Ketut Kariyasa, M.Si
 NIP. 19890419 199803 1 002

Tembusan:

- Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.
- Pejabat Pembuat Komitmen Biro Perencanaan.
- Bendahara Pengeluaran Sekretariat Jenderal
- Peringgal



Koordinasi Korporasi petani padi Kab. Demak dengan Biro Perencanaan dengan perwakilan dari Ditjen Tanaman Pangan, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jateng, Dinas Pertanian Kab. Demak dan pengurus



Pabrik dan lantai jemur Koperasi Citra Kinaraya

**NOTULEN KUNJUNGAN LAPANGAN PENYUSUNAN PROGRESS
PENGEMBANGAN KORPORASI PETANI PADI KAB. DEMAK**

Demak, 23-26 Agustus 2021

1. Pada awalnya berdirinya korporasi petani padi Kabupaten Demak bermula dari Koperasi Serba Usaha (KSU) Citra Kinaraya yang berstatus Koperasi Primer Kabupaten, kemudian berubah status menjadi Primer Provinsi dan saat ini menjadi Koperasi Produsen Citra Kinaraya.
2. Konsolidasi usaha yang dilakukan oleh Koperasi Produsen Citra Kinaraya pada dasarnya diarahkan untuk mengatur pola dan jadwal pasokan gabah harian sesuai jenis varietas dan standar kualitas dari petani anggota sekitar 18-20/ha/hari sesuai dengan kapasitas dryer/pengering padi dan kapasitas giling RMU agar penggunaan modal kerja menjadi efisien. Kapasitas RMU yang dimiliki korporasi saat ini hanya mampu memproduksi 1-2 ton/jam dan sarana prasarana pendukung lain juga masih terbatas.
3. kebutuhan modal kerja korporasi pada tahun 2020 didukung dengan modal koperasi dan pinjaman dari SRG Rabo Fondation sebesar 1,8 milyar (sudah lunas) dan pada tahun 2021 diberi lagi sebesar Rp. 2,5 milyar. Adapun modal kerja usaha tani anggota di lahan bersumber dari swadaya dan pinjaman KUR dari BRI dan BNI.
4. Pemasaran produk beras yang sudah berjalan dan sedang dirintis adalah dengan Food Station Cipinang dengan supply 30 ton / bulan. Jagapati.com dengan supply 2.5 ton / bulan untuk Beras Merah dan Beras Hitam serta retail umum sebesar 20 ton/bulan. Kerjasama kemitraan dalam pemasaran produk beras yang sedang dalam proses penjajagan adalah dengan PT Novatech Multilink (Kelapa Gading) Eksport Singapura, Vietnam, Hongkong (Asia) dan Jerman (Eropa) serta kerjasama kemitraan dalam riset dan pengembangan produk dengan Balai Besar Biogen Kementerian Pertanian .
5. Peningkatan pendapatan yang diperoleh petani anggota adalah setara dengan Rp. 10 juta per hektar per tahun yang diperhitungkan dengan selisih harga jual gabah ke koperasi dibandingkan dengan harga yang berlaku di padangang lokal, yaitu sebesar Rp. 1.000/kg dengan tingkat produktivitas 5 ton/ha dengan 2 kali panen dalam setahun.

Tindak Lanjut:

1. Penguatan untuk memperluas skala wilayah kerja korporasi sekurang-kurangnya 5.000 ha dengan melibatkan sebanyak-banyaknya jumlah petani yang tergabung dalam korporasi petani.
2. Penguatan pembiayaan (modal kerja dan investasi) maka diperlukan konsolidasi usaha dan restrukturisasi kelembagaan korporasi petani dengan melibatkan peran BUMN/BUMD dalam struktur permodalan.
3. Penyusunan studi kelayakan dan penyusunan rencana bisnis dengan melibatkan konsultan independen.
4. Peningkatan produktivitas dan mutu hasil budidaya secara signifikan, maka konsolidasi dilakukan untuk: (a) memperkuat akses pembiayaan KUR petani anggota dan mitra dalam pengadaan sarana produksi dan modal usaha tani lainnya, (b) meningkatkan peran dan kapasitas bimbingan teknis petani, (c) memfasilitasi sarana dan prasarana pertanian yang dibutuhkan Poktan/Gapoktan di wilayah kerja korporasi petani; dan (d) merealokasi prasarana alat mesin pertanian yang tidak berfungsi (mangkrak) untuk dimanfaatkan korporasi petani.
5. Memperluas bidang usaha koperasi Citra Kinaraya di luar pengolahan dan pemasaran produk beras, seperti perbenihan, jasa alsintan, distributor pupuk, pestisida.

Lampiran 3.c.Rapat Pembahasan Pedoman Fasilitas Pembiayaan Mendukung Korporasi Petani TA 2021 Tanggal 25 Agustus 2021



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
 JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
 TELEPON (021) 7816082, FAXSMILE (021) 7816083

Nomor : S.201/TU.020/B.4/8/2021 24 Agustus 2021
 Lampiran : 1 Berkas
 Hal : Rapat Pembahasan Pedoman Fasilitas Pembiayaan Mendukung Korporasi Petani TA. 2021

Yth.
 Daftar undangan terlampir
 di
 Tempat

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Fasilitas Pembiayaan Mendukung Korporasi Petani TA. 2021, maka bersama ini kami bermaksud mengundang Saudara pada pertemuan pembahasan pedoman dimaksud pada :

Hari/Tanggal : Rabu - Jumat/ 25 - 27 Agustus 2021
 Waktu : 09.00 WIB s/d selesai
 Tempat : Hotel Bumi Wiyata
 Jl. Margonda Raya No.281, Kemiri Muka Depok

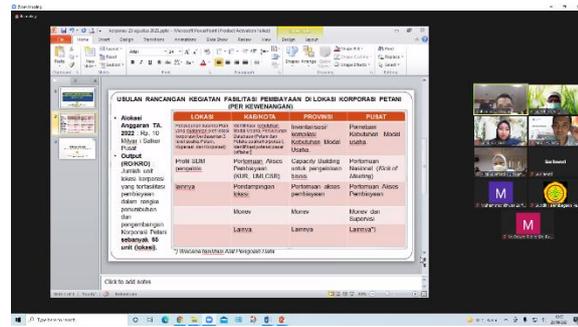
Pelaksanaan kegiatan ini mewajibkan penerapan protokol kesehatan dalam rangka mencegah penularan Covid-19. Bagi peserta undangan yang tidak dapat hadir secara luring (*offline*), kami sediakan link secara daring (*online*), sebagai berikut : Meeting ID: 881 4273 2230, Passcode: 365842.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Direktur Pembiayaan Pertanian,

 Ir. Widiyati Wahidhahwati, MP
 NIP.196801151993032001

Tembusan
 Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

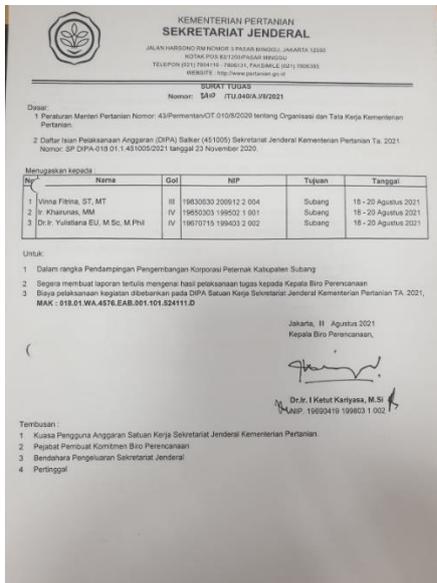


NOTULEN
Rapat Pembahasan Pedoman Fasilitas Pembiayaan Mendukung Korporasi
Petani TA 2021
Jakarta, 25 Agustus 2021

1. Konsepsi Korproasi Petani sesuai Permentan 18 Tahun 2018 yaitu kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar modal dimiliki oleh petani.
2. Korporasi Petani dapat meningkatkan kesejahteraan petani yang semula menjadi obyek menjadi subyek setelah bertransformasi.
3. Secara umum tujuannya adalah meningkatkan kapasitas petani dalam memfasilitasi pembiayaan dalam Korporasi Petani
4. Potensi pengembangan fasilitas pembiayaan dalam mendukung korporasi petani ini lebih pada dukungan aspek pembiayaan sesuai dengan kebutuhan masing-masing posisi yaitu petani, koperasi dan korporasi itu sendiri. Untuk kebutuhan di tier petani lebih pada fasilitas modal kerja/modal investasi yang diupayakan dapat difasilitasi atau didorong melalui KUR, Ultra Mikro, UMi, dan CSR/PKBL. Pada Tier Koperasi fasilitas pembiayaan untuk modal kerja/investasi ini didorong menggunakan BLU LPDB dan BLU KLHK sedangkan pada Tier Korporasi penyertaan modal/pembiayaan diharapkan melalui Perusahaan Ventura Ventura Daerah.
5. Kegiatan fasilitas pembiayaan dalam mendukung korporasi petani antara lain: meningkatkan akses petani pada fasilitas pembiayaan (KUR, UMI, CSR), meningkatkan kemampuan pengelola koperasi dan korporasi petani dalam tata kelola keuangan dan menyusun sistem integrasi asuransi pertanian dan kredit program (KUR).
6. Dilakukan pembahasan atas draft Juknis Pedoman Fasilitas Pembiayaan Mendukung Korporasi Petani.
7. Dilakukan pembahasan juga terkait usulan kegiatan fasilitas pembiayaan di lokasi korporasi petani yang disusun per kewenangan. Sebagai masukan dari Biro Perencanaan: penyusunan bisnisplan di setiap lokasi korporasi petani yang mana ditargetkan sebanyak 65 lokasi pengembangan korporasi petani untuk Tahun 2022.

8. Terkait Pengembangan Korporasi Petani di Food Estate Kalimantan Tengah, dalam waktu dekat diupayakan menghire konsultan yang fokus mendukung korporasi khususnya untuk lokasi Dadahup.

Lampiran 3.d. Pendampingan Pengembangan Korporasi Petani Padi Kabupaten Indramayu Tanggal 25-27 Agustus 2021



NOTULEN KUNJUNGAN LAPANGAN PENYUSUNAN PROGRESS PENGEMBANGAN KORPORASI PETANI PADI KAB. INDRAMAYU

25-27 Agustus 2021

1. Kunjungan lapang dilakukan di penggilingan padi mitra kerja Koperasi Gapoktan Tani Mulus, PD Hade Putra. RMU ini adalah milik pribadi (Bp. H. Muhalim). Secara pribadi Bp Muhalim memiliki lahan sawah seluas 5 Ha dan provitas sekitar 7 ton/Ha. Lahan sawah ditanam padi 2 kali/tahun, dan selebihnya tanah menganggur. Biaya produksi per Ha untuk pertanaman padi sebesar Rp.12.000.000,-, sedangkan harga gabah sekitar Rp. 4000,-
2. RMU melakukan penggilingan setiap hari sekitar 30-40 ton/hari, gabah berasal dari petani baik Indramayu maupun luar Indramayu. Untuk memenuhi kapasitas penggilingan, RMU menerima dan mencari gabah hingga ke JawaTengah. Hasil penggilingan setiap hari (kecuali hari Minggu) sekitar 20 ton beras/hari langsung dikirim Pasar Induk Cipinang, Jakarta. Harga mengikuti harga pasar, namun posisi petani lemah karena yang menentukan adalah para cukong beras di Pasar Induk. RMU dikelola sendiri oleh Bp. Muhalim dengan mempekerjakan 3 orang operator mesin penggilingan dengan gaji Rp. 3.000.000/bulan, dibantu oleh sekitar 20 orang dengan imbalan sistem borongan sehingga mereka dapat memperoleh imban mencapai Rp. 200.000,-/hari.
3. Dalam upaya memperbiki kualitas dan menaikkan harga jual beras yang dihasilkan oleh RMU, saat ini sedang dibangun alat mesin sortir yang diperkirakan berharga Rp. 1 milyar. Saat ini RMU sedang menerima pesanan beras dari Koperasi Gapoktan Tani Mulus untuk memenuhi order beras bansos.
4. Koperasi Tani Mulus (sejak bulan Maret) tidak lagi melakukan penggilingan beras untuk memenuhi permintaan pasar, penggilingan dilakukan oleh mitra bisnisnya. Karena RMU yang diberikan oleh Kementan beberapa alatnya mesti dilakukan upgrade, namun khusus untuk dryer masih berfungsi bagus. RMU tidak beroperasi masih terkendala oleh masalah lahan yang digunakan untuk RMU dan diperkirakan pada akhir tahun ini masalah lahan sudah selesai dan upgrade RMU segera dilakukan
5. PT RNI sebagai PIC korporasi petani di Indramayu tengah melakukan kegiatan inisiasi awal penyusunan rencana bisnis bagi PT Tani Mulus Emas. RNI sebagai leader klaster pangan, memiliki beberapa anak perusahaan yang dapat berfungsi

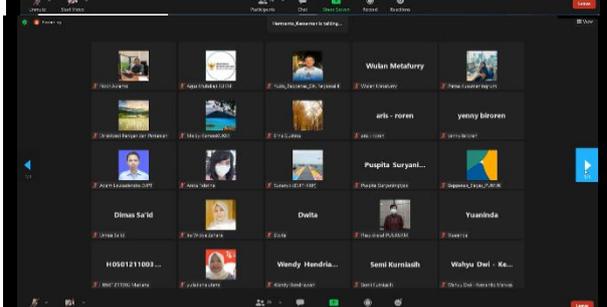
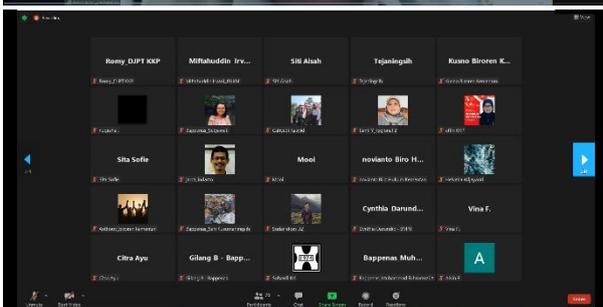
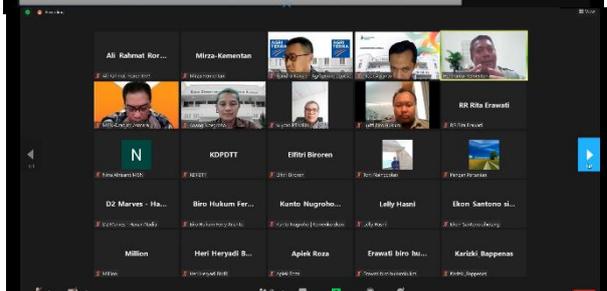
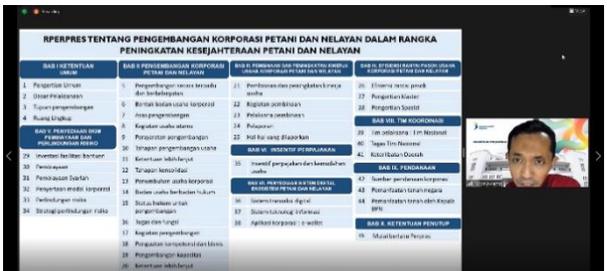
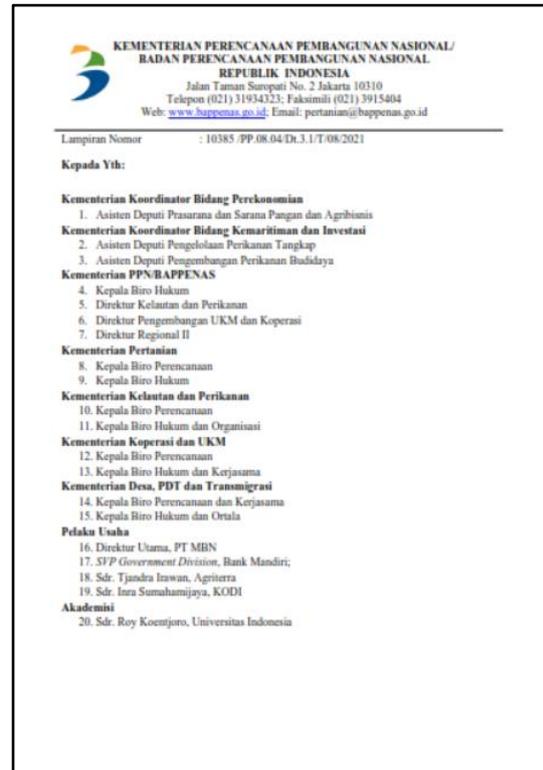
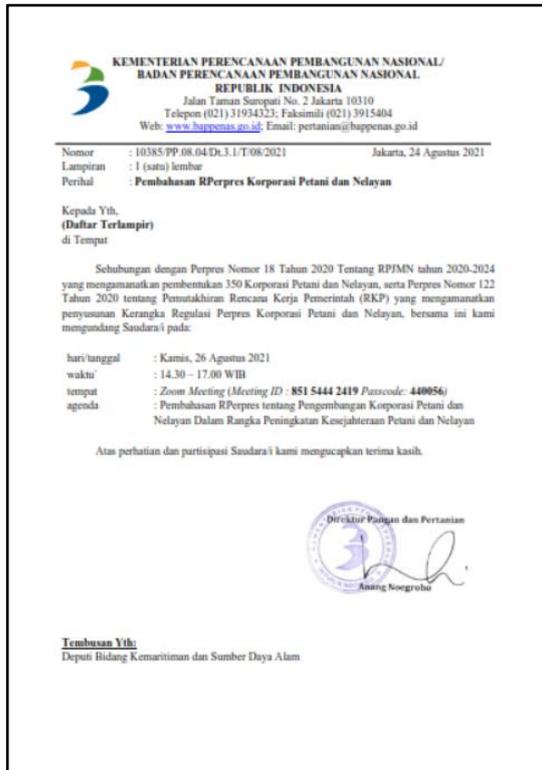
sebagai off taker. Oleh karenanya PT RNI akan melibatkan PT Nusindo, sebagai salah satu offtaker untuk PT Tani Mulus Emas.

6. Core bisnis PT Tani Mulus Emas adalah memproduksi beras serta perbenihan padi. Hal perberasan terlibat banyak pihak, yaitu: petani, lembaga keuangan, BUMN, market dan pemerintah.
7. Di Kecamatan Cikedung telah ada calon UPJA Alsintan (UPJA Sanggar Teratai), namun masih dalam proses pengukuhan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas. Lokasi calon UPJA tersebut di Desa Amis. Lembaga UPJA selama ini telah mengelola bantuan alsintan yang telah diberikan oleh Pemerintah. Alsintan yang dikelola meliputi pompa air ukuran 6 Inch sebanyak empat unit, dan ukuran 3 Inch sebanyak tujuh unit; transplanter empat unit, combine harvester ukuran sedang dan kecil masing-masing dua unit; traktor R-4 sebanyak tiga unit, cultivator dua unit; dan power tresher sebanyak enam unit.
8. Transplanter kurang dimanfaatkan petani, dengan alasan budaya masyarakat menanam dengan pola tegel, sedangkan transplanter berpola jajar legowo. Pada umumnya pertanaman padi dilakukan 2 kali tanam padi dan sebagian dapat dilakukan 3 kali tanam padi.
9. Sebagian anggota Koperasi Gapoktan Tani Mulus telah memanfaatkan alat yang mampu mendeteksi cuaca, kesuburan tanah. Alat tersebut merupakan bantuan dari Bank Indonesia dan telah di pasang di lahan salah satu anggota.

Tindak Lanjut:

1. Koperasi Gapoktan Tani Mulus dan PT TME dalam berbisnis harus berjalan dan tidak saling mematikan. Direncanakan Koperasi akan berusaha di pembelian gabah dan PT akan melakukan penggilingan dan penjualan beras.
2. Melihat kondisi yang ada di PT Tani Mulus Emas saat ini, beberapa aktivitas dapat dijadikan bidang usaha misalnya UPJA, dan perbenihan. Untuk berbisnis hal penting harus diperhatikan adalah human, asset, finance, dan merchandise. Barang yang dijual harus menarik, orang memilih barang umumnya dilihat dulu dari kemasannya. Untuk itu PT TME ini harus memperhitungkan penggunaan packing yang bagus dan menarik.
3. Rencana bisnis disusun dengan mengacu pada arahan dari Biro Perencanaan (draft Revisi Permentan 18/2018) dan dimodifikasi sesuai kondisi di PT Tani Mulus Emas.

Lampiran 3.e. Rapat Pembahasan R Perpres Korporasi Petani dan Nelayan Tanggal 26 Agustus 2021



Notulen Rapat Pembahasan Rancangan Perpres Korporasi Petani dan Nelayan Tanggal 26 Agustus 2021

1. Setkab melalui deputi perekonomian bersama kemenko mengupdate tindak lanjut arahan presiden terkait korporasi petani. Telah dilaporkan pada rapat tersebut terkait progress pelaksanaan korporasi petani dan nelayan, juga dilaporkan kesulitan utama dalam rangka merumuskan korporasi petani dan nelayan adalah mendefinisikan bentuk korporasi petani. Sehingga rancangan perpres menjadi tertunda adalah apakah kelembagaan Korporasi Petani dan Nelayan harus persero atau tidak, namun yang paling penting adalah badan usaha berbadan hukum. Yang penting konsolidasi petani dan nelayan, kelembagaan ekonomi, berbadan hukum dan mayoritasnya adalah petani dan nelayan dalam rangka meningkatkan nilai tambah.
2. Korporasi petani harus modern sehingga kuncinya adalah data *driven*. Oleh karena hal tersebut, maka proses pengalokasian anggaran dapat dilakukan kemudian setelah kriteria dan sasaran penerima jelas dan hal ini juga berlaku di korporasi petani.
3. Beberapa hal yang menjadi masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden terkait Korporasi Petani adalah:
 - a. Perpres Korporasi Petani disusun secara umum namun harus jelas apa dan siapa yang akan diatur karena mempertimbangkan juga adanya keberagaman komoditas yang akan dikembangkan di dalam korporasi petani dan nelayan.
 - b. Harus secara jelas mendefinisikan korporasi petani dan sasarannya siapa saja, petani dan nelayan yang mana.
 - c. Harus memuat peran dan dukungan dari berbagai pihak seperti dukungan K/L lintas sektor serta pihak lain yang dianggap dapat mendukung terwujudnya korporasi petani.
 - d. Aspek kelembagaan harus diperjelas dan hasil akhirnya merupakan suatu *improvement* dan bukan hal yang sama seperti yang biasa dilakukan.
 - e. Pengaturan tentang bagaimana bantuan disalurkan/diberikan walaupun bentuknya perseroan, namun tetap bisa ada pengaturan jika memberikan bantuan kepada petani.
 - f. Banyak yang isinya terkait fasilitasi atau bantuan pemerintah, maka yang paling penting bahwa ini pembinaan kepada swasta atau pelaku usaha,

sehingga batasan dari lembaga mana yang menjadi cakupan dari pembinaan korporasi petani sehingga tidak salah sasaran.

- g. Pengembangan koporasi juga dapat memuat pengembangan teknologi pertanian dan nelayan yang dapat dikembangkan di dalam korporasi petanidan nelayan.
- h. Mewujudkan korporasi petani yang terpenting adalah harus jelas adanya unsur keadilan, sehingga perlu diredesign sistem yang biasa dilakukan agar sistem lebih berkeadilan. Untuk itu beberapa hal harus secara tegas disampaikan dalam rancangan perpres korporasi petani untuk menjadi acuan k/l yaitu: adanya *business plan*, konsolidasi (petani, usaha, lahan) supaya bisa merangkul banyak petani, dan adanya akses pembiayaan yang luas untuk petani dan nelayan.

Lampiran 3.f. Pendampingan Pengembangan Korporasi Peternak Kabupaten Subang (Proses Pemilihan Direksi) Tanggal 27-28 Agustus 2021





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN
Jl. Emo Kurniaatmadja No.6 Telp 0260-411324 Fax. 026-417335
SUBANG 41214

BERITA ACARA
PELAKSANAAN ASESMEN DIREKSI PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS (PT)
KORPORASI PETANI DI KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang, telah dilaksanakan asesmen calon direksi untuk keperluan pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Brahman Gemilang Sejahtera kepada :

1. Nama : DENDI GEOVANA
Alamat : BTN Griya Cinangsi Asri C-91 RT.015/005, Desa Cinangsi, Kec. Cibogo Kab. Subang
2. Nama : FIJAR MAULID DWI PERMATA
Alamat : Kelurahan Sukamelang RT.16/10 Kecamatan Subang, Kab. Subang
3. Nama : IKHRAM HAFIZ RAHMADI
Alamat : -
4. Nama : H. YAHYU HIDAYAT, SPd.
Alamat : Jl. Jati RT. 04/05 Desa Cisalak, Kec. Cisalak, Kab. Subang.

Pelaksanaan asesmen tersebut telah berjalan sesuai dengan lancar dan disepakati oleh semua asesor dengan rekomendasi sebagai berikut:

1. Direktur Utama : H. TAHYU HIDAYAT, SPd.
2. Direktur Operasional : FIJAR MAULID DWI PERMATA
- Divisi Produksi : DENDI GEOVANA
- Divisi Pemasaran : IKHRAM HAFIZ RAHMADI

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nama Asesor / NIP	Instansi	Tanda Tangan
1. <u>Bambang Suliantoro</u> NIP.	<u>Dinas Peternakan & Kesehatan</u>	<u>[Signature]</u>
2. <u>VINNA FITRINA</u> NIP.	<u>BIRO PERENCANAAN KEMANTAN</u>	<u>[Signature]</u>
3. <u>ASMAULI NATA AFRI</u> NIP.	<u>DIKREAN PEH KEMANTAN</u>	<u>[Signature]</u>
4. <u>MUSTINI ELUNDA</u> NIP.	<u>DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN JAWA BARAT</u>	<u>[Signature]</u>
5. <u>DWI HAZANTI</u> NIP.	<u>PUSLUHTAN, BPPSDMP</u>	<u>[Signature]</u>
6. NIP.

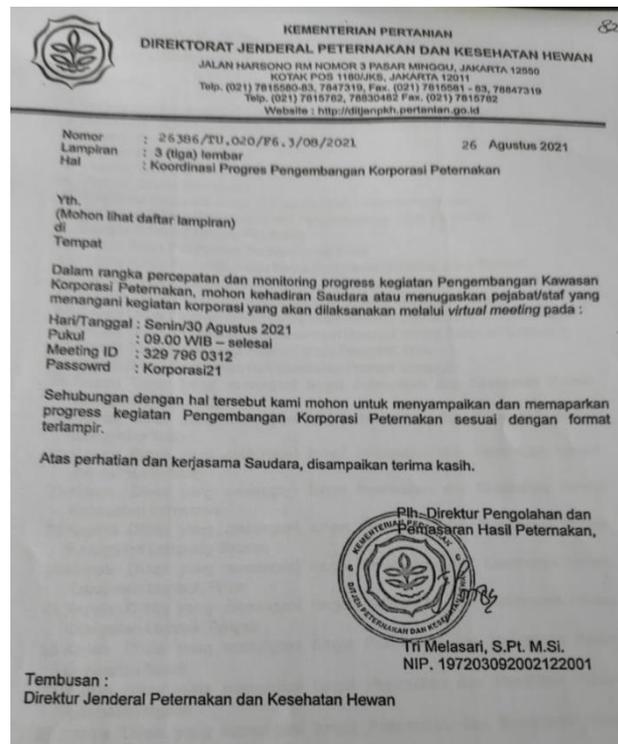
NOTULEN

Pendampingan Pengembangan Korporasi Peternak Kabupaten Subang Jakarta, 27-28 Agustus 2021

1. Dalam rangka pembentukan PT dalam pengembangan Korporasi Petani sesuai kesepakatan 3 koperasi yang bergabung yaitu Koperasi Brahman Sejahtera, Koperasi Surya Gemilang dan Koperasi Tani Jaya, akan membentuk PT yang bernama Brahman Gemilang Sejahtera.
2. Telah dibentuk Tim Asesor dalam pelaksanaan assessment direksi pembentukan PT dalam Pengembangan Korporasi Peternak Kab. Subang yang diwakili oleh Kementan (Biro Perencanaan, Ditjen PKH, dan Badan SDM Pertanian), Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Subang, dan PT. BRI sebagai PIC.
3. Telah dilakukan assessment Direksi Pembentukan Perseroan terbatas (PT) untuk mendukung pengembangan Korporasi Peternak di Kab. Subang.

4. Telah ditetapkan 4 (empat) orang peserta yang mengikuti assessment pemilihan jajaran direksi dalam pembentukan PT ini.
 - a. Telah diputuskan atau ditetapkan melalui Berita Acara dari Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan kab. Subang hasil pemilihan direksi yaitu :
 - b. Direktur Utama : Tahyu Hidayat
 - c. Direktur Operasional : Fijar Maulid Dwi Maulana
 - d. Divisi Produksi : Dendi Geovana
 - e. Divisi Pemasaran : Ikhran Hafiz Rahmadi
5. Jajaran direksi dan pendamping Korporasi akan segera :
 - a. melengkapi administrasi kelengkapan persyaratan ke notaris.
 - b. Mengidentifikasi kembali usaha-usaha yang ada, sebagai input dalam penyusunan bisnis plan PT.
 - c. Menyusun bisnisplan didampingi Dinas dan Kementan
 - d. Menetapkan bisnisplan.
6. Telah disusun diagram Pembentukan PT. Brahman Gemilang Sejahtera.

Lampiran 3.g. Pendampingan Pengembangan Korporasi Peternak Kabupaten Subang Tanggal 30 Agustus 2021



NOTULEN
Koordinasi Progress Pengembangan Korporasi Peternakan
Jakarta, 30 Agustus 2021

1. Koordinasi ini dilakukan dalam rangka percepatan dan monitoring progress kegiatan pengembangan Kawasan korporasi peternakan tahun 2021.
2. Pengembangan korporasi peternakan ini di laksanakan di 8 Lokasi pengembangan di 8 Provinsi, yaitu
 - a. Koperasi Jasa Usaha (KJU) KUBE LANGGENG BASUKI
 - b. Koperasi Peternak Wahyu Sejahtera
 - c. Koperasi Satria Lestari
 - d. Koperasi Brahman Sejahtera
 - e. KPT Maju Bersama
 - f. Koperasi Tunas Ridho Illahi
 - g. Koperasi Syariah Mandalika Baren Sampi
 - h. Koperasi PT. Bumi Berjaya Agriculture
 - i. UMKK Pinggupir
 - j. Koperasi Sinar Usaha Tani Mulya
3. Output pengembangan korporasi peternakan untuk tahun 2021, yaitu menyusun actionplan di setiap lokasi, dan disahkan oleh Bupati.
4. Pembahasan progress pengembangan Kawasan korporasi peternakan ini lebih pada :
 - a. data lokasi Kawasan setiap lokasi,
 - b. data kelembagaan, dimana setiap lokasi menyampaikan progress pembentukan badan hukum, perkembangan jumlah anggota, jumlah kelompok yang bergabung sebelum dan sesudah menjadi korporasi, serta kepengurusan dari kelembagaan yang berkembang saat ini.
 - c. Actionplan dan bisnisplan, masing-masing lokasi menyampaikan progress penyusunan actionplan dan bisnisplan serta perkembangan terkait penetapan/ditandatangani oleh Bupati untuk actionplan.
 - d. Skala usaha, lebih pada penjelasan perkembangan jenis usaha, dan kapasitas produksi, realisasi produksi serta perkembangan mutu hasil.
 - e. Akses Pembiayaan
 - f. Kemitraan, termasuk pola kemitraan yang telah terjalin dan perjanjian kemitraan yang sedang disiapkan.
 - g. Perkembangan pemasaran termasuk pengembangannya, offtaker/penjamin pasar hasil usaha dan perkembangan harga sebelum dan sesudah adanya korporasi.
 - h. Terakhir penjelasan atas kendala dan tindak lanjut kedepan.

Lampiran 3.h. Rapat Tindak Lanjut Kemitraan Pemasaran Benih Dan Beras Di Kawasan Food Estate



**Notulen Rapat Tindak Lanjut Kemitraan Pemasaran Benih Dan Beras Di
Kawasan Food Estate
30 Agustus 2021**

1. Menyiapkan kontrak kerjasama penyerapan gabah/beras petani dan bisnis perbenihan antara Gapoktan Bersama dan PT. RNI/Bulog
2. Menyiapkan rencana kerjasama dan mekanisme pengembangan bisnis perbenihan antara Gapoktan Bersama dan PT. Pertani/SHS
3. Melakukan pertemuan antara PT. RNI dengan seluruh pengelola/pengurus Gapoktan Bersama untuk sosialisasi standarisasi mutu benih dan beras serta menjelaskan mekanisme pelaksanaan kerjasama penyerapan gabah/beras dan bisnis perbenihan (tentative 3-5 September 2021)
4. Penandatanganan kontrak kerjasama penyerapan gabah/beras dan kerjasama bisnis perbenihan antara Gapoktan Bersama dengan PT. RNI/Bulog, dan PT Pertani/SHS (tentative 3-5 September 2021)

Lampiran 3.i. Rapat Evaluasi Progress Pelaksanaan Proyek Perubahan Tanggal 31 Agustus 2021

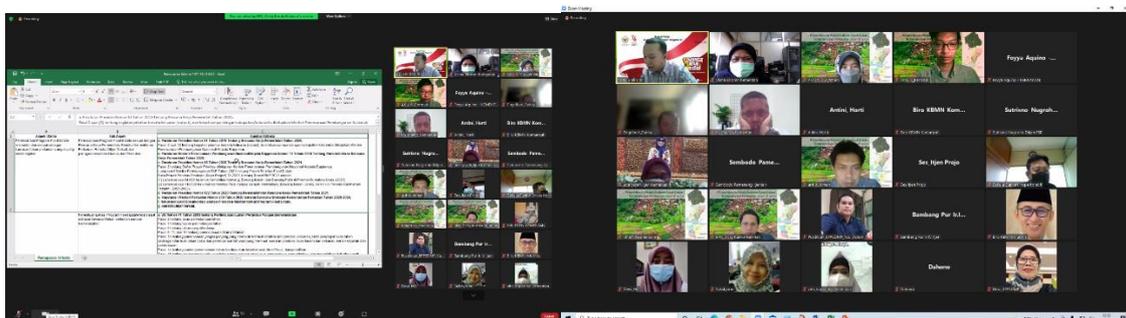
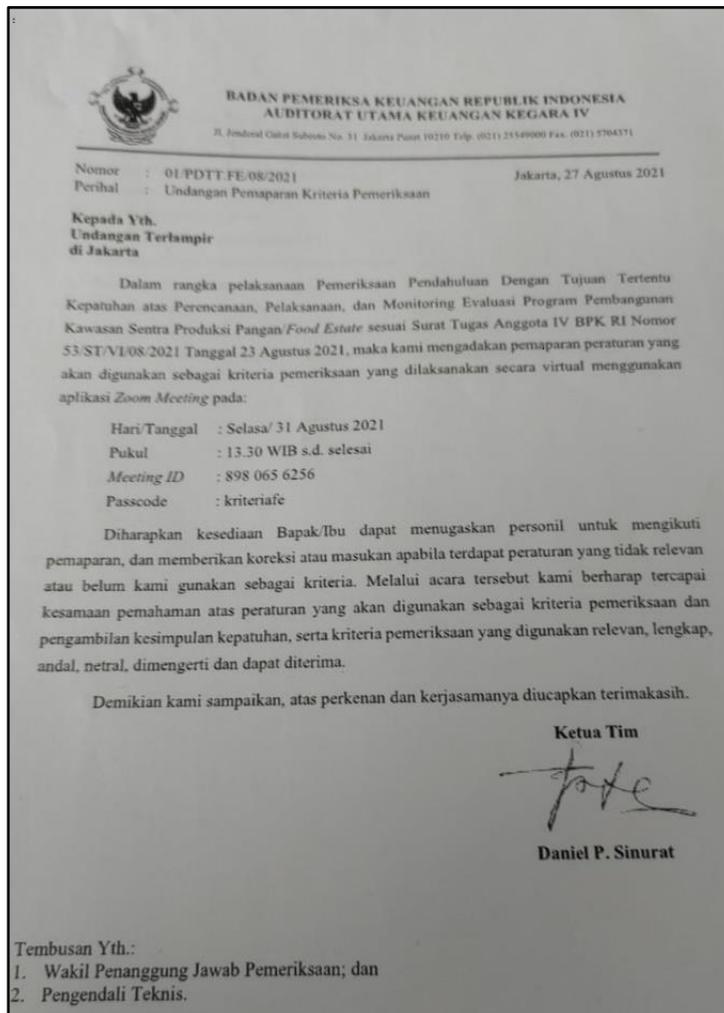


Output:

1. Proses pelaksanaan proyek perubahan dilakukan oleh masing-masing Penanggung Jawab bersama dengan tim sesuai dengan arahan dari *Project Leader*.
2. Arahan project leader dalam penyusunan proyek perubahan, dapat disampaikan sebagai berikut:
 - a. Penyusunan R. Perpres segera dilakukan mengingat Rancangan Perpres Korporasi Petani harus segera disampaikan kepada Presiden, untuk itu Kementerian Pertanian harus segera menyelesaikan draft rancangan dan menyampaikan kepada Bappenas.
 - b. Penyusunan draft Permentan harus disesuaikan dengan Rancangan Perpres Korporasi Petani, sehingga harus diperhatikan kembali dengan detail.
 - c. Penyusunan usulan mekanisme pengelolaan bantuan pemerintah secara korporasi, hendaknya dilakukan dengan berkoordinasi secara intens dengan bagian Anggaran, masing-masing Eselon I dan Biro Hukum untuk mendapatkan masukan terkait skema atau mekanismenya.
 - d. Penyusunan Pedoman Umum kelembagaan korporasi petani disusun dengan memperhatikan kembali UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Grand Design Korporasi Petani, Pedoman Umum Korporasi Petani, serta SOP Korporasi Petani.
3. Penyusunan video proyek perubahan harus disusun sejak awal, sehingga proses pelaksanaan juga dapat masuk dalam video yang akan ditampilkan.
4. Perlu disusun Ringkasan eksekutif terkait perkembangan Major Project Korporasi Petani yang disusun sesuai outline yang telah ditentukan, singkat, diperbanyak tampilan berupa grafik, diagram, tabel, yang dilengkapi dengan foto-foto kegiatan di lapangan.

5. Dipersiapkan rapat dengan anggota tim proyek perubahan untuk masing-masing output. Rapat direncanakan tanggal 13 September.
6. Persiapan untuk pelaksanaan pameran proyek perubahan dengan mempersiapkan, spanduk, leaflet, banner, video, produk-produk korporasi petani.

Lampiran 3.j. Rapat Koordinasi dengan BPK RI Tanggal 31 Agustus 2021



**Notulen Rapat Koordinasi dengan BPK RI
Jakarta, 31 Agustus 2021**

Pembahasan terkait Pemaparan Kriteria Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Kepatuhan Atas Perencanaan, Pelaksanaan, dan Monitoring Evaluasi Program Pembangunan Kawasan Sentra Produksi Pangan/Food Estate

Hasil Pembahasan:

1. Lebih pada pembahasan kriteria yang akan digunakan BPK RI dalam memeriksa Kegiatan *Food Estate* Tahun 2020.
2. Output yang diharapkan adalah kesamaan pemahaman atas peraturan yang akan digunakan sebagai kriteria pemeriksaan dan pengambilan kesimpulan kepatuhan, serta kriteria pemeriksanaan yang digunakan relevan, lengkap, andal, netral, dimengerti, dan dapat diterima.
3. Pemeriksaan dilakukan di 3 lokasi Pengembangan Food Estate berbasis Korporasi Petani ini yaitu Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur dan Sumatera Utara.
4. Pembahasan yang dilakukan lebih pada klarifikasi sumber kriteria yang digunakan dalam beberapa aspek pemeriksaan.
5. Sumber Kriteria untuk Renstra Eselon-I, yang digunakan yaitu 3 (tiga) unit Eselon-I yaitu Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen PSP dan Ditjen Hortikultura.
6. Sumber Kriteria untuk Notulensi arahan Presiden yang akan digunakan adalah Risalah Sldang Kabinet tgl 29 Juli 2020.

Lampiran 3.k. Penyampaian Usulan Draft Rancangan Perpres Korporasi Petani kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Tanggal 3 September



Permohonan Masukan Terhadap Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengembangan Korporasi Petani dan Nelayan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan



Penyampaian Masukan Terhadap Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengembangan Korporasi Petani dan Nelayan dari Kementerian pertanian kepada Kementerian PPN/Bappenas

BIRO PERENCANAAN
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

TANDA TERIMA PENERIMAAN SURAT

No	Nomor Surat/Asal Surat	Jumlah	Ditujukan Kepada
1	Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian Nomor B 1903/RC 020/A.1/06/2021, Tanggal 3 September 2021. Hal: penyampaian masukan terhadap Rancangan Peraturan Presiden tentang pengembangan Korporasi Petani dan Nelayan	1 Eks	Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian PPN/Bappenas
2	Draft Usulan Rancangan Peraturan Presiden tentang penumbuhan dan pengembangan Korporasi Petani dan Nelayan	1 Eks	Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian PPN/Bappenas
3	Naskah Kebijakan Rancangan Peraturan Presiden tentang penumbuhan dan pengembangan Korporasi Petani dan Nelayan	1 Eks	Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian PPN/Bappenas

Jakarta, 3 September 2021
Yang Menerima,



[Signature]
Nama Jelas
Widya Zahara

Tanda Terima Surat Penyampaian Masukan Terhadap Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengembangan Korporasi Petani dan Nelayan dari Kementerian pertanian kepada Kementerian PPN/Bappenas

D. Memperbaiki, melengkapi dan menyempurnakan draft revisi Perubahan peraturan menteri pertanian nomor 18 tahun 2018 tentang pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani

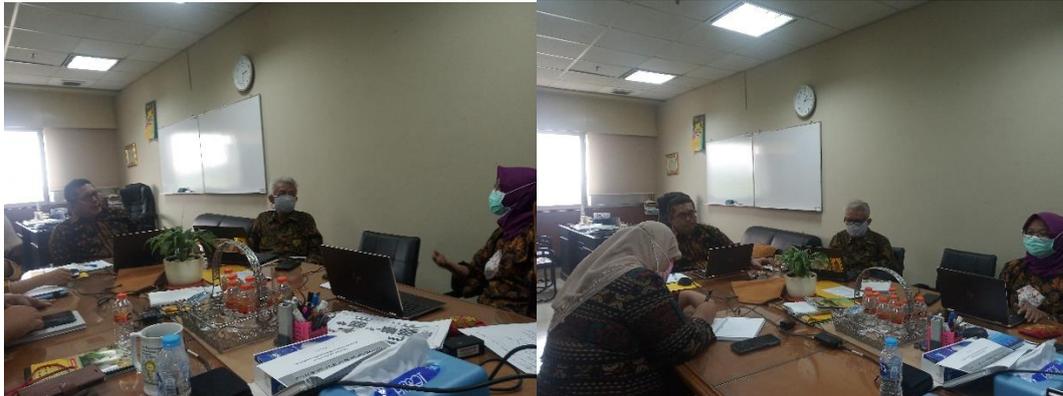
Lampiran 4.a. Rapat Evaluasi Progress Pelaksanaan Proyek Perubahan Tanggal 6 September



Output:

1. Penyusunan Ringkasan eksekutif terkait perkembangan Major Project Korporasi Petani agar tanggal 9 sudah selesai draftnya dan dapat dilakukan proses layputing untuk kemudian ditelaah dan dilakukan proses editing oleh *project leader*.
2. Mulai membuat cover untuk masing-masing output dan laporan proyek perubahan.
3. Segera dibentuk tim penyusunan video dan dibuat rencana kerja untuk pengambilan video. Untuk foto-foto kegiatan dapat disampaikan juga kepada tim penyusun video agar dimasukkan juga ke dalam video proyek perubahan sebagai proses penyusunan output.
4. Rapat progress penyusunan output perubahan dilaksanakan pada hari senin, 13 september pukul 09.00 WIB melalui *virtual meeting*.
5. Masing-masing Penanggung Jawab kegiatan penyusunan output agar menyusun laporan untuk masing-masing dan disiapkan cover laporan.

Lampiran 4.b. Rapat Koordinasi Tim Efektif Internal Biro Perencanaan Tanggal 10 September 2021



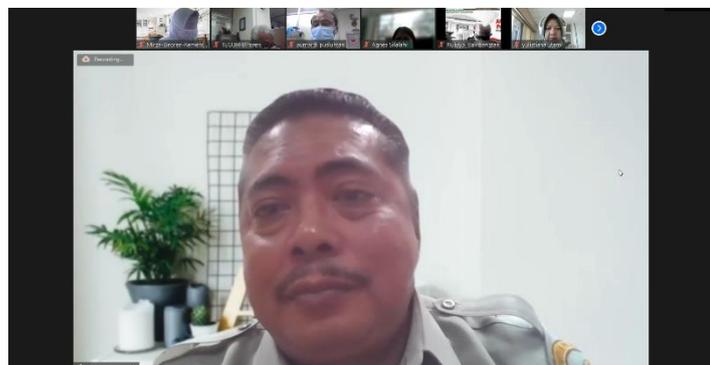
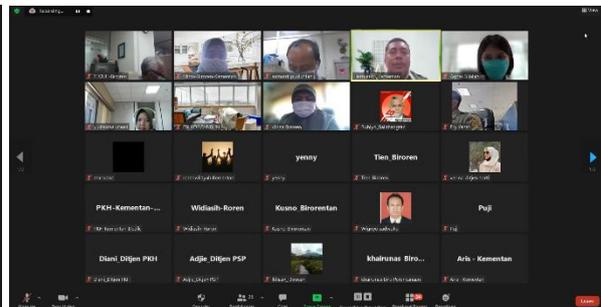
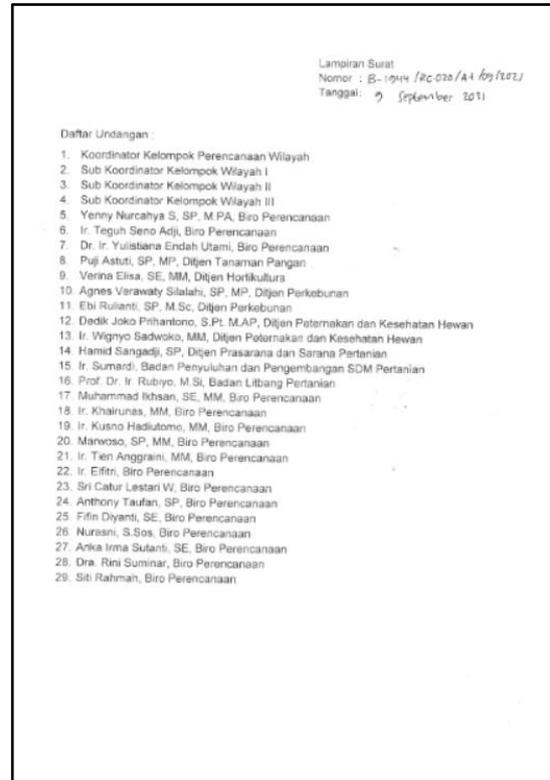
Ouput:

1. Draft Permentan Korporasi Petani telah disusun dengan menyesuaikan kembali dengan rancangan Perpres Korporasi petani yang telah disampaikan ke Bappenas.
2. Selanjutnya dilakukan pembahasan dengan tim efektif yang berasal dari eselon I dan bagian lingkup Biro Perencanaan. Draft Permentan yang telah disusun pada akhirnya dilakukan harmonisasi agar dapat ditetapkan sebagai permentan Korporasi Petani.
3. Dalam Permentan disebutkan dibutuhkan badan usaha ekonomi yang cukup, namun tidak perlu disebutkan kelembagaan ekonomi petani atau KEP.
4. Perlu penegasa bahwa penyusunan konsep Rancangan Peraturan Presiden tentang Penumbuhan dan Pengembangan Koporasi Petani sangat penting untuk mendukung hilirisasi produk pertanian serta membuka akses pasar untuk petani.
5. Ruang lingkup yang akan diatur dalam Peraturan Presiden meliputi pembentukan Korporasi Petani, penumbuhan dan pengembangan Korporasi Petani, penyediaan sistem digital ekosistem Petani dan Nelayan, penyediaan pendanaan dan pembiayaan korporasi, serta pembinaan dan pengawasan korporasi Petani.
6. Maksud disusunnya Peraturan Presiden adalah sebagai dasar pelaksanaan Penumbuhan dan Pengembangan Korporasi Petani untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup Petani. Strategi untuk mencapai tujuan meliputi :
 - a. memperkuat aspek legal kelembagaan ekonomi Petani;
 - b. meningkatkan daya saing usaha dan nilai tambah hasil pertanian dan perikanan;
 - c. meningkatkan kapasitas pengelolaan dan pembinaan usaha pertanian.
7. Korporasi Petani dilakukan dengan mendorong prakarsa Petani dan Nelayan dengan dilandasi asas pengembangan kesempatan usaha dan asas penciptaan

manfaat dan nilai tambah produk Korporasi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. peningkatan kemampuan dan kualitas anggota;
 - b. penyediaan sarana produksi;
 - c. peningkatan produksi;
 - d. pengolahan hasil;
 - e. pemasaran hasil;
 - f. keuangan mikro (simpan pinjam); dan
 - g. penguatan ketahanan pangan regional dan nasional
8. Usaha utama Korporasi Petani adalah budidaya pertanian dan perikanan, pengolahan hasil pertanian dan perikanan, dan pemasaran yang meliputi namun tidak terbatas pada kegiatan: Penyediaan sarana produksi; Pembiayaan; Jasa lainnya.
9. Korporasi Petani dapat berbentuk badan usaha Koperasi atau Perseroan Terbatas dan memiliki kepemilikan modal dasar mayoritas oleh: Sejumlah Petani yang tergabung dalam Poktan, Gapoktan, dan Gapoktan Bersama; dan/atau Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum.

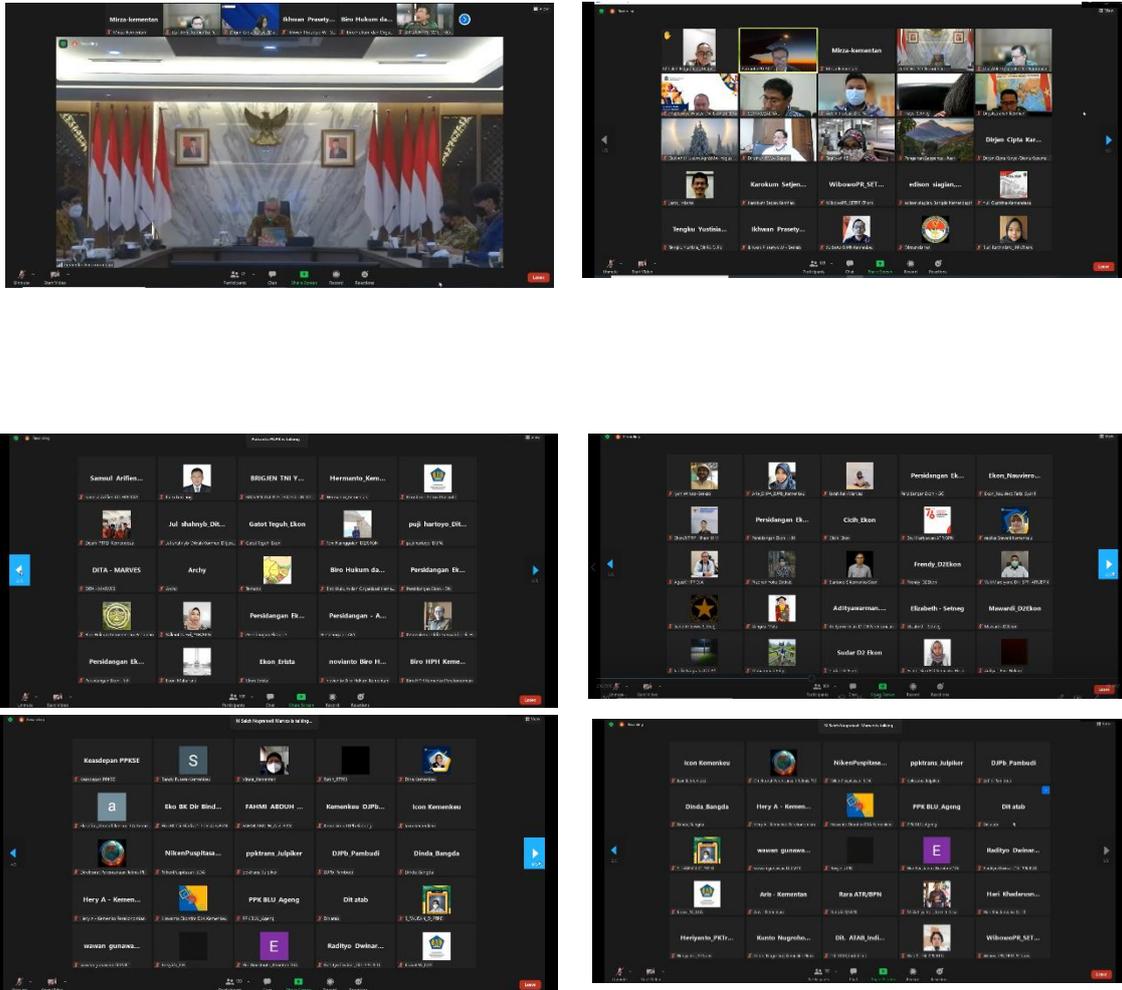
Lampiran 4.c.Rapat Tim Penyusunan Draft Revisi Permentan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani



**Notulen Hasil Pembahasan
Draf Final Permentan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani
13 September 2021**

1. Perlu dilakukan Trilateral Meeting antara Biro Perencanaan yang melibatkan Bagian kebijakan dan Program dan Bagian Perencanaan Wilayah, dengan mengundang Kementerian Pertanian dan Bappenas terkait RO tersendiri dan korporasi Petani dan Kementerian Keuangan yang beranggapan tidak diperlukan RO khusus terkait Korporasi Petani dan Nelayan.
2. Perlu mensinergikan manajemen kawasan yang tertuang di dalam Rancangan Permentan Korporasi Petani dengan kawasan *Food Estate* yang saat ini sedang dikembangkan atas arahan Prsiden RI.
3. Komoditas porang dapat diusulkan sebagai kawasan Tanaman Pangan yang saat ini menjadi salah satu komoditas unggulan Tanaman Pangan karena nilai ekonomisnya yang tinggi.
4. Pada aspek pembiayaan perlu dibuat dua kriteria pembiayaan yaitu pembiayaan syariah dan pembiayaan konvensional, yang keduanya dapat menjadi sumber pembiayaan dalam penumbuhan dan pengembangan korporasi petani.
5. Perlu adanya kriteria khusus untuk koperasi yang berbasis pesantren, karena pesantren menjadi keunikan sendiri di dalam pengembangan korporasi petani namun dapat dijadikan contoh bagi pondok pesantren lainnya yang ingin mengembangkan korporasi petani.
6. Aplikasi pertanian 4.0 perlu dikembangkan di masing-masing kawasan dengan standar minimal dari Badan Litbang. Hal ini mendorong pertanian yang modern dengan menerapkan teknologi informasi yang diperlukan untuk efisiensi pertanian.
7. Perlu penajaman dan perbaikan terkait mekanisme pendanaan korporasi petani.

Lampiran 4.d. Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (Food Estate) Tanggal 21 September 2021



Notulen Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (Food Estate) 21 September 2021

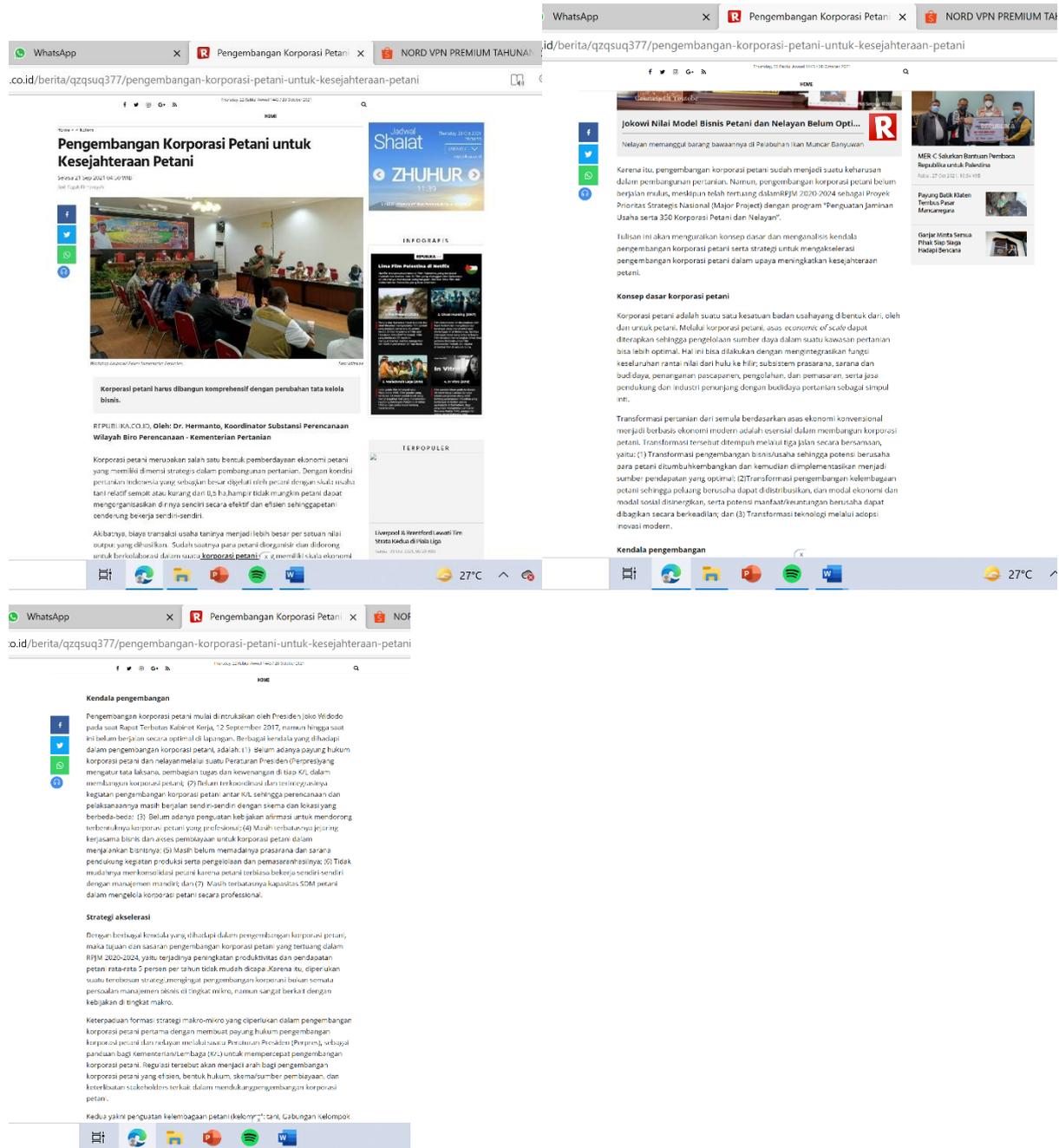
1. Berdasarkan hasil Ratas, hanya 1 Perpres terkait Food Estate, namun berdasarkan usulan Kemenko Marives yang mengusulkan untuk adanya Perpres lain terkait pembentukan BLU, maka harus disampaikan kembali kepada Presiden.
2. Pengusulan R Perpres tetap melalui izin prakarsa yang didahului dengan kesepakatan Menko dan selanjutnya untuk disampaikan kepada Presiden.

3. Perlu disampaikan kepada presiden, sehingga Kemen PUPR harus mempersiapkan argumentasi yang mengusulkan Kementan sebagai ketua pelaksana harian yang sebenarnya penunjukan oleh Presiden adalah Kemen PUPR.
4. Kemenhan menyarankan untuk tidak dimasukkan di dalam anggota karena sudah ditunjuk sebagai pengelola BCLS.

Tindak Lanjut:

Dalam waktu dekat akan diadakan usulan untuk rapat terbatas terkait food estate untuk memantau kegiatan dan perkembangan food estate.

Lampiran 4.e. Publikasi Pengembangan Korporasi Petani Melalui Harian Republika Online, Tanggal 21 September 2021



Artikel di atas dapat diakses pada <https://republika.co.id/berita/qzqsuq377/pengembangan-korporasi-petani-untuk-kesejahteraan-petani>

Pengembangan Korporasi Petani untuk Kesejahteraan Petani

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Dr. Hermanto, Koordinator Substansi Perencanaan Wilayah Biro Perencanaan - Kementerian Pertanian



Korporasi petani merupakan salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi petani yang memiliki dimensi strategis dalam pembangunan pertanian. Dengan kondisi pertanian Indonesia yang sebagian besar digeluti oleh petani dengan skala usaha tani relatif sempit atau kurang dari 0,5 ha, hampir tidak mungkin petani dapat mengorganisasikan dirinya sendiri secara efektif dan efisien sehingga petani cenderung bekerja sendiri-sendiri.

Akibatnya, biaya transaksi usaha taninya menjadi lebih besar per satuan nilai output yang dihasilkan. Sudah saatnya para petani diorganisir dan didorong untuk berkolaborasi dalam suatu **korporasi petani** yang memiliki skala ekonomi sehingga mampu meningkatkan efisiensi usahatannya dan kesejahteraannya.

Karena itu, pengembangan korporasi petani sudah menjadi suatu keharusan dalam pembangunan pertanian. Namun, pengembangan korporasi petani belum berjalan mulus, meskipun telah tertuang dalam RPJM 2020-2024 sebagai Proyek Prioritas Strategis Nasional (Major Project) dengan program “Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan”.

Tulisan ini akan menguraikan konsep dasar dan menganalisis kendala pengembangan korporasi petani serta strategi untuk mengakselerasi pengembangan korporasi petani dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani.

Konsep dasar korporasi petani

Korporasi petani adalah suatu kesatuan badan usahayang dibentuk dari, oleh dan untuk petani. Melalui korporasi petani, asas economic of scale dapat diterapkan sehingga pengelolaan sumber daya dalam suatu kawasan pertanian bisa lebih optimal. Hal ini bisa dilakukan dengan mengintegrasikan fungsi keseluruhan rantai nilai dari hulu ke hilir; subsistem prasarana, sarana dan budidaya, penanganan

pascapanen, pengolahan, dan pemasaran, serta jasa pendukung dan industri penunjang dengan budidaya pertanian sebagai simpul inti.

Transformasi pertanian dari semula berdasarkan asas ekonomi konvensional menjadi berbasis ekonomi modern adalah esensial dalam membangun korporasi petani. Transformasi tersebut ditempuh melalui tiga jalan secara bersamaan, yaitu: (1) Transformasi pengembangan bisnis/usaha sehingga potensi berusaha para petani ditumbuhkembangkan dan kemudian diimplementasikan menjadi sumber pendapatan yang optimal; (2) Transformasi pengembangan kelembagaan petani sehingga peluang berusaha dapat didistribusikan, dan modal ekonomi dan modal sosial disinergikan, serta potensi manfaat/keuntungan berusaha dapat dibagikan secara berkeadilan; dan (3) Transformasi teknologi melalui adopsi inovasi modern.

Kendala pengembangan

Pengembangan korporasi petani mulai diintruksikan oleh Presiden Joko Widodo pada saat Rapat Terbatas Kabinet Kerja, 12 September 2017, namun hingga saat ini belum berjalan secara optimal di lapangan. Berbagai kendala yang dihadapi dalam pengembangan korporasi petani, adalah: (1) Belum adanya payung hukum korporasi petani dan nelayan melalui suatu Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tata laksana, pembagian tugas dan kewenangan di tiap K/L dalam membangun korporasi petani; (2) Belum terkoordinasi dan terintegrasinya kegiatan pengembangan korporasi petani antar K/L sehingga perencanaan dan pelaksanaannya masih berjalan sendiri-sendiri dengan skema dan lokasi yang berbeda-beda; (3) Belum adanya penguatan kebijakan afirmasi untuk mendorong terbentuknya korporasi petani yang profesional; (4) Masih terbatasnya jejaring kerjasama bisnis dan akses pembiayaan untuk korporasi petani dalam menjalankan bisnisnya; (5) Masih belum memadainya prasarana dan sarana pendukung kegiatan produksi serta pengelolaan dan pemasaran hasilnya; (6) Tidak mudahnya menkonsolidasi petani karena petani terbiasa bekerja sendiri-sendiri dengan manajemen mandiri; dan (7) Masih terbatasnya kapasitas SDM petani dalam mengelola korporasi petani secara professional.

Strategi akselerasi

Dengan berbagai kendala yang dihadapi dalam pengembangan korporasi petani, maka tujuan dan sasaran pengembangan korporasi petani yang tertuang dalam RPJM 2020-2024, yaitu terjadinya peningkatan produktivitas dan pendapatan petani rata-rata 5 persen per tahun tidak mudah dicapai. Karena itu, diperlukan suatu terobosan strategi, mengingat pengembangan korporasi bukan semata persoalan manajemen bisnis di tingkat mikro, namun sangat berkaitan dengan kebijakan di tingkat makro.

Keterpaduan formasi strategi makro-mikro yang diperlukan dalam pengembangan korporasi petani pertama dengan membuat payung hukum pengembangan korporasi petani dan nelayan melalui suatu Peraturan Presiden (Perpres), sebagai panduan bagi Kementerian/Lembaga (K/L) untuk mempercepat pengembangan korporasi

petani. Regulasi tersebut akan menjadi arah bagi pengembangan korporasi petani yang efisien, bentuk hukum, skema/sumber pembiayaan, dan keterlibatan stakeholders terkait dalam mendukung pengembangan korporasi petani.

Kedua yakni penguatan kelembagaan petani (kelompok tani, Gabungan Kelompok Tani/Gapoktan) yang dilakukan secara integratif dan konsolidatif melalui; (a) Peningkatan kapasitas SDM petani; (b) Pengembangan investasi sosial; (c) Pengembangan sarana dan prasarana pendukung; (d) Peningkatan jejaring kerjasama bisnis; dan (e) Penguatan manajemen kelembagaan petani. Kelembagaan petani ini diupayakan menjadi basis utama dalam pengembangan korporasi petani.

Ketiga dengan pendampingan kepada petani, kelompok tani dan Gapoktan dalam proses awal pengembangan korporasi petani, fasilitasi bantuan sarana dan prasana, membangun tata kelola yang baik dalam sistem korporasi yang terbentuk. Hal ini sangat penting karena pengembangan korporasi petani membutuhkan dukungan lintas kementerian dan lembaga termasuk Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi.

Keempat, pelibatan sektor usaha swasta serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan mengintegrasikan bisnisnya dalam korporasi petani, yang sekaligus menjalankan fungsi pemberdayaan untuk kemandirian dan keberlanjutan korporasi petani. Kelima, menyempurnakan berbagai dokumen terkait dengan pengembangan korporasi petani khususnya Grand Design, Pedoman Umum, dan Petunjuk Pelaksanaan pengembangan korporasi petani supaya menjadi lebih mudah dipahami dan diimplementasikan oleh para pihak yang terlibat.

Dari semua uraian di atas dapat disimpulkan bahwa **membangun korporasi petani** bukanlah pekerjaan yang mudah karena spektrum korporasi petani mencakup berbagai aspek kelembagaan, legal, permodalan, organisasi, bisnis dan kebijakan yang harus disiapkan.

Korporasi petani harus dibangun secara komprehensif dengan menjalankan prinsip dan nilai korporasi petani serta melakukan perubahan dan percepatan tata kelola bisnis yang lebih modern melalui berbagai strategi yang mengedepankan upaya peningkatan daya saing, inovasi, dan kreativitas pengembangan tata kelola bisnis dengan mensinergikan keterlibatan stakeholder terkait dalam satu pola sikap dan pola tindak pengembangan korporasi petani untuk kesejahteraan petani.

Lampiran 4.f. Publikasi Pengembangan Korporasi Petani Melalui Harian Sinar Tani, Tanggal 21 September 2021



Korporasi petani menjadi salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi petani yang memiliki dimensi strategis dalam pembangunan pertanian. Dengan kondisi pertanian Indonesia yang sebagian besar digeluti petani dengan skala usaha tani relatif sempit atau kurang dari 0,5 ha, hampir tidak mungkin petani dapat mengorganisasikan dirinya sendiri secara efektif dan efisien.

Kondisi tersebut membuat petani cenderung bekerja sendiri-sendiri, sehingga biaya transaksi usahatani menjadi lebih besar per satuan nilai output yang dihasilkan. Karena itu menurut Koordinator Substansi Perencanaan Wilayah, Biro Perencanaan Kementerian Pertanian, Hermanto, sudah saatnya petani diorganisir dan didorong berkolaborasi dalam korporasi petani yang memiliki skala ekonomi, sehingga mampu meningkatkan efisiensi usahatannya dan kesejahteraannya.

Hermanto menilai, pengembangan korporasi petani sudah menjadi suatu keharusan dalam pembangunan pertanian. Namun, saat ini pengembangan korporasi petani belum berjalan mulus, meski telah tertuang dalam RPPM 2020-2024 sebagai Proyek Prioritas Strategis Nasional (Major Project) dengan program Penguatan Jaminan Usaha serta 350 korporasi Petani dan Nelayan.

Konsep Dasar Korporasi Petani
Menurutnya, korporasi petani adalah suatu kesatuan badan usaha yang dibentuk dari oleh dan untuk petani. Melalui korporasi petani, azas *economic of scale* dapat diterapkan, sehingga pengelolaan sumber daya dalam suatu kawasan pertanian bisa lebih optimal. Hal ini bisa dilakukan dengan mengintegrasikan fungsi keseluruhan rantai nilai dari hulu ke hilir, subsistem prasarana, sarana dan budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran. Termasuk jasa pendukung dan industri penunjang dengan bud-

idaya pertanian sebagai simpul inti. Transformasi pertanian dari semula berdasarkan azas ekonomi konvensional menjadi berbasis ekonomi modern adalah esensial dalam membangun korporasi petani ujarnya.

Transformasi tersebut ditempuh melalui tiga jalan secara bersamaan. *Pertama*, transformasi pengembangan bisnis/usaha, sehingga potensi berusaha para petani ditumbuhkembangkan, kemudian diimplementasikan menjadi sumber pendapatan yang optimal.

Kedua, transformasi pengembangan kelembagaan petani, sehingga peluang berusaha dapat didistribusikan dan modal ekonomi dan sosial disinergikan, serta potensi manfaat/keuntungan berusaha dapat dibagikan secara berkeadilan.

Ketiga, transformasi teknologi melalui adopsi inovasi modern.

Hermanto mengatakan, pengembangan korporasi petani mulai diinstruksikan Presiden Joko Widodo saat Rapat Terbatas Kabinet Kerja, 12 September 2017, hingga kini belum berjalan secara optimal di lapangan. Ada berbagai kendala yang dihadapi dalam pengembangan korporasi petani.

Pertama, belum adanya payung hukum korporasi petani dan nelayan melalui suatu Peraturan Presiden (Perpres) sebagai panduan Kementerian/Lembaga (K/L) untuk mempercepat pengembangan korporasi petani.

Regulasi tersebut akan menjadi arah bagi pengembangan korporasi petani yang efisien, bentuk hukum, skema/sumber pembiayaan, dan keterlibatan stakeholders terkait dalam mendukung pengembangan korporasi petani antar K/L, sehingga perencanaan dan pelaksanaannya masih berjalan

sendiri-sendiri dengan skema dan lokasi yang berbeda-beda.

Ketiga, belum adanya penguatan kebijakan afirmasi untuk mendorong terbentuknya korporasi petani yang profesional.

Keempat, masih terbatasnya jejaring kerjasama bisnis dan akses pembiayaan untuk korporasi petani dalam menjalankan bisnisnya.

Ke lima, masih belum memadainya prasarana dan sarana pendukung kegiatan produksi serta pengelolaan dan pemasaran hasilnya. *Keenam*, tidak mudahnya mengkonsolidasi petani, karena petani terbiasa bekerja sendiri-sendiri dengan manajemen mandiri. *Ketujuh*, masih terbatasnya kapasitas SDM petani dalam mengelola korporasi petani secara profesional.

Strategi Akselerasi
Dengan berbagai kendala pengembangan korporasi petani, memang tidak mudah mencapai tujuan dan sasaran pengembangan korporasi petani yang tertuang dalam RPPM 2020-2024 yaitu peningkatan produktivitas dan pendapatan petani rata-rata 5 persen per tahun. Diperlukan suatu terobosan strategi, mengingat pengembangan korporasi bukan semata persoalan manajemen bisnis di tingkat mikro. Namun sangat berkait kebijakan di tingkat makro, ujarnya.

Perlu keterpaduan formasi strategi makro-mikro dalam pengembangan korporasi petani. *Pertama*, membuat payung hukum pengembangan korporasi petani dan nelayan melalui suatu Peraturan Presiden (Perpres), sebagai panduan Kementerian/Lembaga (K/L) untuk mempercepat pengembangan korporasi petani.

Regulasi tersebut akan menjadi arah bagi pengembangan korporasi petani yang efisien, bentuk hukum, skema/sumber pembiayaan, dan keterlibatan stakeholders terkait dalam mendukung pengembangan korporasi petani," tuturnya.

Kedua lanjut Hermanto, pe-

nguatan kelembagaan petani (kelompok tani dan gabungan kelompok tani) secara integratif dan konsolidatif. Di antaranya melalui peningkatan kapasitas SDM petani, pengembangan investasi sosial, pengembangan sarana dan prasarana, membangun tata kelola yang baik dalam sistem korporasi yang terbentuk. "Ini sangat penting, karena pengembangan korporasi petani membutuhkan dukungan lintas kementerian dan lembaga termasuk Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi," tuturnya.

Keempat, pendampingan kepada petani, kelompok tani dan Gapoktan dalam proses awal pengembangan korporasi petani, fasilitasi bantuan sarana dan prasarana, membangun tata kelola yang baik dalam sistem korporasi yang terbentuk. "Ini sangat penting, karena pengembangan korporasi petani membutuhkan dukungan lintas kementerian dan lembaga termasuk Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi," tuturnya.

Keempat, menurut Hermanto, perlu pelibatan sektor usaha swasta serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan mengintegrasikan bisnisnya dalam korporasi petani. Sekaligus juga menjalankan fungsi pemberdayaan untuk kemandirian dan keberlanjutan korporasi petani.

Ke lima, menyempurnakan berbagai dokumen terkait dengan pengembangan korporasi petani khususnya *Grand Design*, *Pedoman Umum*, dan *Penunjuk Pelaksanaan* pengembangan korporasi petani. "Dengan dokumen ini akan menjadi lebih mudah dipahami dan diimplementasikan semua pihak yang terlibat," tegasnya.

Dengan berbagai kendala tersebut, Hermanto melihat membangun korporasi petani memang bukanlah pekerjaan yang mudah. Sebab, spektrum korporasi petani mencakup berbagai aspek kelembagaan, legal, pemadalan, organisasi, bisnis dan kebijakan yang harus disiapkan.

Korporasi petani harus dibangun secara komprehensif dengan menjalankan prinsip dan nilai korporasi petani, serta perubahan dan percepatan tata kelola bisnis yang lebih modern melalui berbagai strategi. Strategi itu mengedepankan upaya peningkatan daya saing, inovasi dan kreativitas pengembangan tata kelola bisnis.

"Terutama mensinergikan keterlibatan stakeholders terkait dalam satu pola sikap dan pola tindak pengembangan korporasi petani untuk kesejahteraan petani," tuturnya. ■ Yu/Hermanto/Ditjen PSP

Akselerasi Korporasi untuk Kesejahteraan Petani

Sinar Tani Edisi 15 - 21 September 2021 | No. 3911 Tahun LII

Korporasi petani merupakan salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi petani yang memiliki dimensi strategis dalam pembangunan pertanian. Dengan kondisi pertanian Indonesia yang sebagian besar digeluti oleh petani dengan skala usaha tani relatif sempit atau kurang dari 0,5 ha, hampir tidak mungkin petani dapat mengorganisasikan dirinya sendiri secara efektif dan efisien sehingga petani cenderung bekerja sendiri-sendiri.

Akibatnya, biaya transaksi usaha taninya menjadi lebih besar per satuan nilai output yang dihasilkan. Sudah saatnya para petani diorganisir dan didorong untuk berkolaborasi dalam suatu **korporasi petani** yang memiliki skala ekonomi sehingga mampu meningkatkan efisiensi usahatannya dan kesejahteraannya.

Karena itu, pengembangan korporasi petani sudah menjadi suatu keharusan dalam pembangunan pertanian. Namun, pengembangan korporasi petani belum berjalan mulus, meskipun telah tertuang dalam RPJM 2020-2024 sebagai Proyek Prioritas Strategis Nasional (Major Project) dengan program “Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan”.

Tulisan ini akan menguraikan konsep dasar dan menganalisis kendala pengembangan korporasi petani serta strategi untuk mengakselerasi pengembangan korporasi petani dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani.

Konsep dasar korporasi petani

Korporasi petani adalah suatu kesatuan badan usahayang dibentuk dari, oleh dan untuk petani. Melalui korporasi petani, asas economic of scale dapat diterapkan sehingga pengelolaan sumber daya dalam suatu kawasan pertanian bisa lebih optimal. Hal ini bisa dilakukan dengan mengintegrasikan fungsi keseluruhan rantai nilai dari hulu ke hilir; subsistem prasarana, sarana dan budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran, serta jasa pendukung dan industri penunjang dengan budidaya pertanian sebagai simpul inti.

Transformasi pertanian dari semula berdasarkan asas ekonomi konvensional menjadi berbasis ekonomi modern adalah esensial dalam membangun korporasi petani. Transformasi tersebut ditempuh melalui tiga jalan secara bersamaan, yaitu: (1) Transformasi pengembangan bisnis/usaha sehingga potensi berusaha para petani ditumbuhkembangkan dan kemudian diimplementasikan menjadi sumber pendapatan yang optimal; (2) Transformasi pengembangan kelembagaan petani sehingga peluang berusaha dapat didistribusikan, dan modal ekonomi dan modal sosial disinergikan, serta potensi manfaat/keuntungan berusaha dapat dibagikan secara berkeadilan; dan (3) Transformasi teknologi melalui adopsi inovasi modern.

Kendala pengembangan

Pengembangan korporasi petani mulai diintruksikan oleh Presiden Joko Widodo pada saat Rapat Terbatas Kabinet Kerja, 12 September 2017, namun hingga saat ini belum berjalan secara optimal di lapangan. Berbagai kendala yang dihadapi dalam pengembangan korporasi petani, adalah: (1) Belum adanya payung hukum korporasi petani dan nelayan melalui suatu Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tata laksana, pembagian tugas dan kewenangan di tiap K/L dalam membangun korporasi petani; (2) Belum terkoordinasi dan terintegrasinya kegiatan pengembangan korporasi petani antar K/L sehingga perencanaan dan pelaksanaannya masih berjalan sendiri-sendiri dengan skema dan lokasi yang berbeda-beda; (3) Belum adanya penguatan kebijakan afirmasi untuk mendorong terbentuknya korporasi petani yang profesional; (4) Masih terbatasnya jejaring kerjasama bisnis dan akses pembiayaan untuk korporasi petani dalam menjalankan bisnisnya; (5) Masih belum memadainya prasarana dan sarana pendukung kegiatan produksi serta pengelolaan dan pemasaran hasilnya; (6) Tidak mudahnya menkonsolidasi petani karena petani

terbiasa bekerja sendiri-sendiri dengan manajemen mandiri; dan (7) Masih terbatasnya kapasitas SDM petani dalam mengelola korporasi petani secara professional.

Strategi akselerasi

Dengan berbagai kendala yang dihadapi dalam pengembangan korporasi petani, maka tujuan dan sasaran pengembangan korporasi petani yang tertuang dalam RPJM 2020-2024, yaitu terjadinya peningkatan produktivitas dan pendapatan petani rata-rata 5 persen per tahun tidak mudah dicapai. Karena itu, diperlukan suatu terobosan strategi, mengingat pengembangan korporasi bukan semata persoalan manajemen bisnis di tingkat mikro, namun sangat berkait dengan kebijakan di tingkat makro.

Keterpaduan formasi strategi makro-mikro yang diperlukan dalam pengembangan korporasi petani pertama dengan membuat payung hukum pengembangan korporasi petani dan nelayan melalui suatu Peraturan Presiden (Perpres), sebagai panduan bagi Kementerian/Lembaga (K/L) untuk mempercepat pengembangan korporasi petani. Regulasi tersebut akan menjadi arah bagi pengembangan korporasi petani yang efisien, bentuk hukum, skema/sumber pembiayaan, dan keterlibatan stakeholders terkait dalam mendukung pengembangan korporasi petani.

Kedua yakni penguatan kelembagaan petani (kelompok tani, Gabungan Kelompok Tani/Gapoktan) yang dilakukan secara integratif dan konsolidatif melalui; (a) Peningkatan kapasitas SDM petani; (b) Pengembangan investasi sosial; (c) Pengembangan sarana dan prasarana pendukung; (d) Peningkatan jejaring kerjasama bisnis; dan (e) Penguatan manajemen kelembagaan petani. Kelembagaan petani ini diupayakan menjadi basis utama dalam pengembangan korporasi petani.

Ketiga dengan pendampingan kepada petani, kelompok tani dan Gapoktan dalam proses awal pengembangan korporasi petani, fasilitasi bantuan sarana dan prasana, membangun tata kelola yang baik dalam sistem korporasi yang terbentuk. Hal ini sangat penting karena pengembangan korporasi petani membutuhkan dukungan lintas kementerian dan lembaga termasuk Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi.

Keempat, pelibatan sektor usaha swasta serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan mengintegrasikan bisnisnya dalam korporasi petani, yang sekaligus menjalankan fungsi pemberdayaan untuk kemandirian dan keberlanjutan korporasi petani. Kelima, menyempurnakan berbagai dokumen terkait dengan pengembangan korporasi petani khususnya Grand Design, Pedoman Umum, dan Petunjuk Pelaksanaan pengembangan korporasi petani supaya menjadi lebih mudah dipahami dan diimplementasikan oleh para pihak yang terlibat.

Dari semua uraian di atas dapat disimpulkan bahwa **membangun korporasi petani** bukanlah pekerjaan yang mudah karena spektrum korporasi petani mencakup berbagai aspek kelembagaan, legal, permodalan, organisasi, bisnis dan kebijakan yang harus disiapkan.

Korporasi petani harus dibangun secara komprehensif dengan menjalankan prinsip dan nilai korporasi petani serta melakukan perubahan dan percepatan tata kelola bisnis yang lebih modern melalui berbagai strategi yang mengedepankan upaya peningkatan daya saing, inovasi, dan kreativitas pengembangan tata kelola bisnis dengan mensinergikan keterlibatan stakeholder terkait dalam satu pola sikap dan pola tindak pengembangan korporasi petani untuk kesejahteraan petani.

Lampiran 4.g. Bimtek pengembangan Desa Korporasi Sapi di Kab. Kediri Tanggal 28 September 2021



KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011
Telp. (021) 7815580-83, 7847319, Fax. (021) 7815581 - 83, 78847319
Telp. (021) 7815782, 78830482 Fax. (021) 7815782
Website : <http://ditjenpkh.pertanian.go.id>

Nomor : 20.612/TU.020/P6.3/09/2021 20 September 2021
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permohonan Narasumber Bimbingan Teknis Desa Korporasi Sapi

Kepada Yth.
Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian.

di Tempat

Dalam rangka peningkatan pengetahuan peternak penerima manfaat kegiatan pengembangan desa korporasi sapi, akan dilaksanakan Bimbingan Teknis Pengembangan Desa Korporasi Sapi yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 - 30 September 2021 di Kabupaten Banyuwangi (Sumatera Selatan), Kabupaten Boyolali (Jawa Tengah), Kabupaten Kediri (Jawa Timur) dan Kabupaten Morowali (Sulawesi Tengah). Sedangkan pelaksanaan bimtek pada minggu ke dua Oktober 2021 akan dilaksanakan di Kabupaten Aceh Besar (Aceh), Kabupaten Solok Selatan (Sumatera Barat), Kabupaten Sidrap (Sulawesi Selatan), Kabupaten Penajam Paser Utara (Kalimantan Timur) dan Kabupaten Cianjur (Jawa Barat). Salah satu tema yang akan disampaikan pada pelaksanaan bimtek tersebut adalah tentang **Korporasi Petani**.

Sehubungan dengan hal tersebut mohon kiranya kesediaan saudara untuk dapat menugaskan pejabat atau staf yang menangani korporasi petani sebagai salah satu narasumber pada kegiatan Bimtek Pengembangan Desa Korporasi Sapi tersebut. Untuk informasi dan konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi saudara Asmardi Nata Afri, S.Pt (081374083786).

Atas kesediaan dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Plt. Direktur Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Peternakan,

drh. Makmun, M. Sc
NIP. 19740308 200212 1 006



Bimbingan teknis ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan peternak dalam manajemen korporasi, agribisnis sapi potong, manajemen pembiakan dan penggemukan sapi potong, serta pengelolaan limbah sapi potong dalam rangka mewujudkan korporasi peternak.

Sasaran kegiatan bimbingan teknis yaitu peternak penerima manfaat kegiatan pengembangan 1000 desa sapi (pengurus dan anggota terpilih) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) di masing-masing desa lokasi kegiatan pengembangan 1000 desa sapi tahun 2021 atau unsur TNI AD lainnya di wilayah kecamatan/kabupaten.

Adapun hasil Pemaparan Materi Manajemen Korporasi Petani oleh Biroren pada Bimbingan Teknis Kegiatan Pengembangan Desa Korporasi Sapi dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Kementan dalam hal ini melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Kegiatan Pengembangan Desa Korporasi Sapi Tahun 2021 di Kabupaten Kediri memberikan bantuan berupa 1 paket kegiatan di masing-masing desa, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - a. Setiap desa terdiri dari 1 Kelompok Peternak yang menjadi calon penerima
 - b. Setiap Poktan/Gapoktan di masing-masing Desa mendapatkan bantuan 200 sapi potong, terdiri atas 100 sapi betina untuk usaha sapi pembiakan dan 100 sapi jantan untuk usaha penggemukan;
 - c. Setiap kelompok diwajibkan menyiapkan lahan untuk pakan seluas minimal 5 Ha untuk penanaman rumput pakan;
 - d. Setiap lokasi akan mendapatkan paket lainnya berupa kandang komunal untuk 100 ekor sapi, konsentrat pakan ternak untuk 4 bulan.
2. Pada kegiatan pengembangan desa korporasi pada usaha: a) Pembiakan, adanya bantuan 100 sapi betina untuk usaha sapi pembiakan dengan tujuan akan menghasilkan pedet yang pada saat umur 2 tahun, apabila pedet jantan akan dilakukan penggemukan sekitar 4 bulan selanjutnya siap untuk dipotong. Sedangkan untuk pedet betina akan dijadikan sebagai calon induk sapi, b) Penggemukan, 100 sapi jantan untuk usaha penggemukan dikelola oleh masing-masing poktan yang sekitar 4 bulan sudah dapat dipasarkan. Kondisi ini diharapkan dapat menjadi pemasukan sebagai tambahan modal bagi kelompok untuk perputaran dalam usaha pengembangan sapi. Pada kegiatan ini diperlukan menjalankan bisnis kolektif berjamaah yang membidangi dari hulu-hilir yang menghimpun peternak-peternak untuk berkonsolidasi agar berkorporasi. Dukungan dan kerjasama dengan pihak terkait seperti perbankan, pengusaha, mitra, petani, Polri/TNI serta aparat terkait baik di daerah maupun pusat sangat diperlukan.
3. Pada bimtek ini juga disampaikan usaha hilirisasi yang dapat dikembangkan pada saat bersamaan dengan usaha pembiakan dan penggemukan sapi seperti pengelolaan limbah kandang berbasis sirkular ekonomi berkelanjutan. Limbah

kandang yang terdiri dari kotoran sapi dan urin sapi dapat diolah untuk menghasilkan biogas, pupuk organik padat dan cair serta pupuk Kascing. Produk ini dapat menghasilkan potensi nilai ekonomi yang cukup besar kontribusi dalam usaha peternakan.

- 4 Dengan dilaksanakannya Bimbingan Teknis Kegiatan Pengembangan Desa Korporasi Sapi maka diharapkan peserta memahami teknis dan manajemen terkait pembiakan sapi potong, pakan, kesehatan hewan, pengolahan limbah ternak sapi, pemasaran, bisnis masing-masing bidang usaha yang akan dikembangkan, kerjasama tim dan kepemimpinan, pengembangan jejaring dan negosiasi, fungsi pembentuk lembaga yang berbadan hukum yang keseluruhan dibungkus dalam pengembangan korporasi peternak.
- 5 Mengingat paket bantuan Pengembangan Desa Korporasi Sapi pada Kabupaten Kediri ditujukan pada 5 poktan di 5 desa maka dalam pengembangan kelembagaan korporasi petani dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kondisi di kawasan tersebut. Masing-masing poktan di setiap desa akan mengembangkan usaha ternak sapi sesuai komisi yang sudah dirancang yaitu Kelembagaan, Pakan, Pemeliharaan Hewan dan Pemasaran dan Pengolahan. Namun poktan-poktan dari beberapa desa dapat membangun usaha bersama untuk mempersar skala usaha dan efisiensi yang dapat dibangun dalam kelembagaan korporasi peternak berbentuk koperasi. Dapat juga dalam pengembangan korporasi peternak sapi potong dengan menginisiasi dengan pembentuk unit manajemen kawasan korporasi (UMKK). UMKK terdiri dari atas perwakilan anggota kelompok peternak atau gabungan kelompok peternak yang dipilih secara musyawarah dan mufakat. Tim pengarah dari UMKK dapat berasal dari dinas atau instansi pemerintah, atau tokoh masyarakat yang berpengaruh dalam pengembangan kawasan peternak. UMKK akan berbentuk lembaga yang berbadan hukum koperasi.

Tindak Lanjut:

1. Pelaksanaan teknis dan manajemen pengelolaan usaha di poktan/desa, maka konsolidasi didalam poktan dan sudah harus siap dengan pembagian tugas sesuai bidang dengan manajemen yang baik karena dalam waktu dekat akan diterima bantuan paket kegiatan 200 ekor sapi/poktan/desa. Mengingat hal tersebut maka masing-masing komisi yang telah dibentuk per kelompok ternak dapat bekerja seoptimal mungkin agar sisi teknis dan bisnis dengan pengelolaan manajemen yang baik dapat diterapkan. Dalam hal ini juga agar sudah dapat dijelaskan porsi pembagian kerja dan nilai ekonomi yang dapat diterima oleh masing-masing peternak sesuai dengan peran kerjanya.
2. Perencanaan pengembangan di tingkat poktan/desa, untuk perluasan jumlah peternak yang berminat atau ingin bergabung dalam usaha peternakan sapi

perlu kejelasan mekanismenya termasuk dalam peningkatan populasi jumlah sapi pengemukan, pembiakan dan bidang usaha lainnya.

3. Konsolidasi poktan untuk membangun korporasi peternak, di 5 desa calon lokasi, agar segera disiapkan dalam mengembangkan korporasi sesuai tahapan penumbuhan/pengembangan yaitu: persiapan, konsolidasi, pembentukan Gapoktan Bersama/Koperasi/ Korperasi dan selanjutnya penguatan korporasi.
4. Perencanaan penbembangan bidang usaha di tingkat gapoknak (poknak bersama), juga sudah harus disiapkan. Secara umum bisnis yang dikembangkan adalah pengemukan sapi, budidaya sapi dan pengolahan limbah sapi, dan usaha tersebut berada pada poktan/desa. Sedangkan untuk bisnis lainnya yang dapat dijadikan bidang usaha yang akan dikelola ditingkat Gapoktan/Koperasi perlu dilakukan telaahan dengan memperhatikan efesiensi seperti pengadaan saprodi kebutuhan peternak, pakan ternak , pemasaran sapi dan produk lainnya, kerjasama dengan mitra. Demikian juga untuk perolehan pembiayaan seperti KUR, asuransi, atau berasal dari beberapa petani yang berkemampuan atau perorangan dan sumber lainnya .
5. Dalam pengembangan korporasi peternak diperlukan bimbingan dan pendampingan dari Kementan, Kemenkop, K/L terkait, pemda, perguruan tinggi, praktisi usaha peternakan yang berhasil dalam pengembangan usaha peternakan dengan konsep korporasi peternak. Dukungan kerjasama dengan pihak terkait seperti perbankan, pengusaha, mitra, petani, Polri/TNI serta aparat terkait baik didaerah mapun pusat sangat diperlukan.
6. Perkembangan berikutnya setelah kelembagaan peternak dalam bentuk badan hukum (koperasi) dapat membangun badan usaha berbadan hukum PT dengan beberapa alternatif seperti gabungan antar koperasi peternak dengan swsta, BUMN, BUMD atau dengan sesama koperasi peternak. Badan usaha tersebut kepemilikannya/saham sebagian besar merupakan kepemilikan peternak. Demikian juga dengan bidang usaha yang dikembangkan agar dapat memberikan dukungan yang saling memberikan keuntungan yang profesional dan berkeadilan pada para pihak yang mendirikan korporasi tersebut.

Lampiran 4.h. Bimtek pengembangan Desa Korporasi Sapi di Kab. Boyolali
Tanggal 28 September 2021



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011
Telp. (021) 7815580-83, 7847319, Fax. (021) 7815581 - 83, 78847319
Telp. (021) 7815782, 78830482 Fax. (021) 7815782
Website : <http://ditjenpkh.pertanian.go.id>

Nomor : 20.612/TU.020/P6.3/09/2021 20 September 2021
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permohonan Narasumber Bimbingan Teknis Desa Korporasi Sapi

Kepada Yth.
Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian.

di Tempat

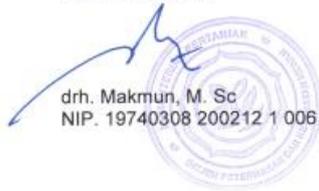
Dalam rangka peningkatan pengetahuan peternak penerima manfaat kegiatan pengembangan desa korporasi sapi, akan dilaksanakan Bimbingan Teknis Pengembangan Desa Korporasi Sapi yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 - 30 September 2021 di Kabupaten Banyuwangi (Sumatera Selatan), Kabupaten Boyolali (Jawa Tengah), Kabupaten Kediri (Jawa Timur) dan Kabupaten Morowali (Sulawesi Tengah). Sedangkan pelaksanaan bimtek pada minggu ke dua Oktober 2021 akan dilaksanakan di Kabupaten Aceh Besar (Aceh), Kabupaten Solok Selatan (Sumatera Barat), Kabupaten Sidrap (Sulawesi Selatan), Kabupaten Penajam Paser Utara (Kalimantan Timur) dan Kabupaten Cianjur (Jawa Barat). Salah satu tema yang akan disampaikan pada pelaksanaan bimtek tersebut adalah tentang **Korporasi Petani**.

Sehubungan dengan hal tersebut mohon kiranya kesediaan saudara untuk dapat mengasikan pejabat atau staf yang menangani korporasi petani sebagai salah satu narasumber pada kegiatan Bimtek Pengembangan Desa Korporasi Sapi tersebut. Untuk informasi dan konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi saudara Asmardi Nata Afri, S.Pt (081374083786).

Atas kesediaan dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Pt. Direktur Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Peternakan,

drh. Makmun, M. Sc
NIP. 19740308 200212 1 006



Bimbingan teknis korporasi peternak sapi potong di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan Bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Bimbingan Teknis ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan sosialisasi dan peningkatan pengetahuan dan kapasitas SDM peternak.

Kegiatan pengembangan Desa Korporasi sapi Tahun 2021 dilaksanakan menjadi dua tahap, dilaksanakan dengan sasaran perwakilan dari kelompok calon penerima manfaat kegiatan Desa Korporasi Sapi Tahun 2021. Tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 28-30 September 2021 di Kab. Boyolali (Prov. Jawa Tengah), Kab. Kediri (Prov. Jawa Timur), Kab. Morowali (Prov. Sulawesi Tengah), dan Kab. Banyuwangi (Prov. Sumatera Selatan). Adapun hasil Bimbingan Teknis Korporasi Sapi Kab. Boyolali dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Bimbingan Teknis Korporasi Peternak Sapi Kab. Boyolali, Prov. Jawa Tengah dilaksanakan pada hari Selasa-Kamis, 28-30 September 2021 yang dibuka oleh perwakilan dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan, Kementerian Pertanian. Kegiatan pada hari pertama terdiri dari dua tema besar yaitu terkait pengelolaan limbah sapi potong baik dari sisi teknis pengelolaan dan manajemen korporasi petani.
2. Peserta rapat terdiri dari peternak dan babinsa dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Peternak dari Kecamatan Andong yang berasal dari 5 desa terpilih
 - b. Babinsa Kec. Andong, merupakan anggota TNI yang akan melakukan pendampingan pelaksanaan Desa Korporasi .
3. Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Desa Korporasi Sapi Kab. Boyolali dilaksanakan di Kec, Andong, dengan maksud untuk mempermudah mobilisasi dan konsolidasi petani serta usaha tani peternak dalam satu kawasan peternakan sapi potong. Untuk itu, dalam satu kecamatan terdiri dari 5 desa yang tergabung dalam satu kawasan, untuk pengembangan korporasi sapi potong.
4. Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan bantuan berupa 1 paket kegiatan di masing-masing desa, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - a. Setiap desa terdiri dari 1 Kelompok Peternak atau 1 Kelompok Gabungan Kelompok Peternak yang menjadi cpcl;
 - b. Setiap Poktan/Gapoktan di masing-masing Desa mendapatkan bantuan 200 sapi potong, terdiri atas 100 sapi Betina untuk usaha sapi pembiakan dan 100 sapi jantan untuk usaha penggemukan;
 - c. Setiap kelompok diwajibkan menyiapkan lahan untuk pakan seluas minimal 5 Ha untuk penanaman rumput pakan;
 - d. Setiap lokasi akan mendapatkan paket lainnya berupa kandang komunal untuk 100 ekor sapi, konsentrat pakan ternak untuk 4 bulan.

5. Selanjutnya, dalam rangka pengembangan korporasi peternak sapi potong Kab. Boyolali, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama dengan Pemda dan peternak sapi, harus menyusun road map dan rencana aksi serta menyusun model bisnis dan proses bisnis.
6. Saat ini telah terbentuk 4 Kelompok Peternak dan 1 Gabungan Kelompo, Peternak di 5 Desa anggota korporasi peternak Kab. Boyolali yang akan dikonsolidasikan dalam bentuk korporasi peternak melalui transformasi kelembagaan petani menjadi Gapoktan Bersama berbadan hukum (koperasi atau Perseroan Terbatas). Selanjutnya proses konsolidasi akan dilakukan dengan mengelola usaha inti yaitu sapi potong dengan melakukan konsolidasi usaha dalam satu manajemen.
7. Gapoktan bersama akan membentuk koperasi untuk mengkonsolidasikan usaha peternak. Selanjutnya koperasi dapat membentuk Perseroan Terbatas (PT) untuk membentuk korporasi petani. PT dibentuk untuk memperkuat dan memudahkan dalam pengembangan usaha atau bisnis yang dijalankan oleh korporasi petani.

Tindak Lanjut:

1. Poktan dan gapoktan anggota korporasi sapi Kab. Boyolali bersama-sama melakukan konsolidasi peternak dan konsolidasi usaha membentuk Gapoktan Bersama. Selanjutnya Gapoktan Bersama akan diarahkan untuk membentuk koperasi sebagai badan hukumnya serta menyusun struktur organisasinya.
2. Ditjen PKH dan dan Pemda Provinsi/Kabupaten serta peternak bersama-sama menyusun:
 - a. Struktur organisasi gapoktan bersama dan koperasi
 - b. Road Map Pengembangan Korporasi Sapi Potong Kab. Boyolali untuk selanjutnya didetilkkan dalam rencana aksi pengembangan korporasi sapi potong.
 - c. Model Bisni dan Proses bisnis yang akan dikembangkan secara bertahap

Lampiran 4.i. Bimtek pengembangan Desa Korporasi Sapi di Kab. Morowali
Tanggal 30 September 2021



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011
Telp. (021) 7815580-83, 7847319, Fax. (021) 7815581 - 83, 78847319
Telp. (021) 7815782, 78830482 Fax. (021) 7815782
Website : <http://ditjenpkh.pertanian.go.id>

Nomor : 20.612/TU.020/P6.3/09/2021 20 September 2021
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permohonan Narasumber Bimbingan Teknis Desa Korporasi Sapi

Kepada Yth.
Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian.

di Tempat

Dalam rangka peningkatan pengetahuan peternak penerima manfaat kegiatan pengembangan desa korporasi sapi, akan dilaksanakan Bimbingan Teknis Pengembangan Desa Korporasi Sapi yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 - 30 September 2021 di Kabupaten Banyuasin (Sumatera Selatan), Kabupaten Boyolali (Jawa Tengah), Kabupaten Kediri (Jawa Timur) dan Kabupaten Morowali (Sulawesi Tengah). Sedangkan pelaksanaan bimtek pada minggu ke dua Oktober 2021 akan dilaksanakan di Kabupaten Aceh Besar (Aceh), Kabupaten Solok Selatan (Sumatera Barat), Kabupaten Sidrap (Sulawesi Selatan), Kabupaten Penajam Paser Utara (Kalimantan Timur) dan Kabupaten Cianjur (Jawa Barat). Salah satu tema yang akan disampaikan pada pelaksanaan bimtek tersebut adalah tentang **Korporasi Petani**.

Sehubungan dengan hal tersebut mohon kiranya kesediaan saudara untuk dapat menugaskan pejabat atau staf yang menangani korporasi petani sebagai salah satu narasumber pada kegiatan Bimtek Pengembangan Desa Korporasi Sapi tersebut. Untuk informasi dan konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi saudara Asmardi Nata Afri, S.Pt (081374083786).

Atas kesediaan dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Plt. Direktur Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Peternakan,

drh. Makmun, M. Sc
NIP. 19740308 200212 1 006





1. Pada bimtek ini juga disampaikan usaha hilirisasi yang dapat dikembangkan pada saat bersamaan dengan usaha pembiakan dan penggemukan sapi seperti pengelolaan limbah kandang berbasis sirkular ekonomi berkelanjutan. Limbah kandang yang terdiri dari kotoran sapi dan urin sapi dapat diolah untuk menghasilkan biogas, pupuk organik padat dan cair serta pupuk Kascing. Produk ini dapat menghasilkan potensi nilai ekonomi yang cukup besar kontribusi dalam usaha peternakan.
2. Dengan dilaksanakannya Bimbingan Teknis Kegiatan Pengembangan Desa Korporasi Sapi maka diharapkan peserta memahami teknis dan manajemen terkait pembiakan sapi potong, pakan, kesehatan hewan, pengolahan limbah ternak sapi, pemasaran, bisnis masing-masing bidang usaha yang akan dikembangkan, kerjasama tim dan kepemimpinan, pengembangan jejaring dan negosiasi, fungsi pembentuk lembaga yang berbadan hukum yang keseluruhan dibungkus dalam pengembangan korporasi peternak.
3. Mengingat paket bantuan Pengembangan Desa Korporasi Sapi pada Kabupaten Kediri ditujukan pada 5 poktan di 5 desa maka dalam pengembangan kelembagaan korporasi petani dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kondisi di kawasan tersebut. Masing-masing poknak di setiap desa akan mengembangkan usaha ternak sapi sesuai komisi yang sudah dirancang yaitu Kelembagaan, Pakan, Pemeliharaan Hewan dan Pemasaran dan Pengolahan. Namun poktan-poktan dari beberapa desa dapat membangun usaha bersama untuk mempersar skala usaha dan efisiensi yang dapat dibangun dalam kelembagaan korporasi peternak berbentuk koperasi. Dapat juga dalam pengembangan korporasi peternak sapi potong dengan menginisiasi dengan pembentukan unit manajemen kawasan korporasi (UMKK). UMKK terdiri dari atas perwakilan anggota kelompok peternak atau gabungan kelompok peternak yang dipilih secara musyawarah dan mufakat. Tim pengarah dari UMKK dapat berasal dari dinas atau instansi pemerintah, atau tokoh masyarakat yang berpengaruh dalam

pengembangan kawasan peternak. UMKK akan berbentuk lembaga yang berbadan hukum koperasi.

Tindak Lanjut:

1. Pelaksanaan teknis dan manajemen pengelolaan usaha di poktan/desa, maka konsolidasi didalam poktan dan sudah harus siap dengan pembagian tugas sesuai bidang dengan manajemen yang baik karena dalam waktu dekat akan diterima bantuan paket kegiatan 200 ekor sapi/poktan/desa. Mengingat hal tersebut maka masing-masing komisi yang telah dibentuk per kelompok ternak dapat bekerja seoptimal mungkin agar sisi teknis dan bisnis dengan pengelolaan manajemen yang baik dapat diterapkan. Dalam hal ini juga agar sudah dapat dijelaskan porsi pembagian kerja dan nilai ekonomi yang dapat diterima oleh masing-masing peternak sesuai dengan peran kerjanya.
2. Perencanaan pengembangan di tingkat poktan/desa, untuk perluasan jumlah peternak yang berminat atau ingin bergabung dalam usaha peternakan sapi perlu kejelasan mekanismenya termasuk dalam peningkatan populasi jumlah sapi pengemukan, pembiakan dan bidang usaha lainnya.
3. Konsolidasi poktan untuk membangun korporasi peternak, di 5 desa calon lokasi, agar segera disiapkan dalam mengembangkan korporasi sesuai tahapan penumbuhan/pengembangan yaitu: persiapan, konsolidasi, pembentukan Gapoktan Bersama/Koperasi/ Korperasi dan selanjutnya penguatan korporasi.

Lampiran 4.j. Bimtek pengembangan Desa Korporasi Sapi di Kab. Banyuasin
Tanggal 30 September 2021



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011
Telp. (021) 7815580-83, 7847319, Fax. (021) 7815581 - 83, 78847319
Telp. (021) 7815782, 78830482 Fax. (021) 7815782
Website : <http://ditjenpkh.pertanian.go.id>

Nomor : 20.612/TU.020/P6.3/09/2021 20 September 2021
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permohonan Narasumber Bimbingan Teknis Desa Korporasi Sapi

Kepada Yth.
Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian.

di Tempat

Dalam rangka peningkatan pengetahuan peternak penerima manfaat kegiatan pengembangan desa korporasi sapi, akan dilaksanakan Bimbingan Teknis Pengembangan Desa Korporasi Sapi yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 - 30 September 2021 di Kabupaten Banyuasin (Sumatera Selatan), Kabupaten Boyolali (Jawa Tengah), Kabupaten Kediri (Jawa Timur) dan Kabupaten Morowali (Sulawesi Tengah). Sedangkan pelaksanaan bimtek pada minggu ke dua Oktober 2021 akan dilaksanakan di Kabupaten Aceh Besar (Aceh), Kabupaten Solok Selatan (Sumatera Barat), Kabupaten Sidrap (Sulawesi Selatan), Kabupaten Penajam Paser Utara (Kalimantan Timur) dan Kabupaten Cianjur (Jawa Barat). Salah satu tema yang akan disampaikan pada pelaksanaan bimtek tersebut adalah tentang **Korporasi Petani**.

Sehubungan dengan hal tersebut mohon kiranya kesediaan saudara untuk dapat menugaskan pejabat atau staf yang menangani korporasi petani sebagai salah satu narasumber pada kegiatan Bimtek Pengembangan Desa Korporasi Sapi tersebut. Untuk informasi dan konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi saudara Asmardi Nata Afri, S.Pt (081374083786).

Atas kesediaan dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Plt. Direktur Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Peternakan,

drh. Makmun, M. Sc
NIP. 19740308 200212 1 006





Bimbingan Teknis Kegiatan Pengembangan Desa Korporasi Sapi Tahun 2021 di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan pada tanggal 30 September 2021 bertempat di Kantor Desa Panca Mulya, Kecamatan Air Kumbang, Kab. Banyuasin. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan Bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Materi Bimbingan Teknis Kegiatan Pengembangan Desa Korporasi Sapi di Kabupaten Banyuasin adalah: Manajemen Pemeliharaan Indukan Sapi Potong, Manajemen Pakan Indukan Sapi Potong, Manajemen Pakan Penggemukan Sapi Potong, Persiapan Usaha Pengolahan Pupuk Organik, Manajemen Kesehatan Hewan Sapi Indukan dan Penggemukan, Manajemen Kesejahteraan Hewan Sapi Indukan dan Sapi Penggemukan, Agribisnis Sapi Potong (perencanaan bisnis, pelaporan usaha, pemasaran, pengembangan usaha), Manajemen Korporasi, Pengelolaan Limbah Sapi Potong (biogas, bioslurry, pupuk organik padat). Nara sumber berasal dari BPTU HPT Sembawa, Dit.PPHNak, Biro Perencanaan dan professional Dr. drh. Langgeng Priyatno, Dr. Nanang Purus, Suhadi (KPT MS), Arfan Abrar

Bimbingan teknis ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan peternak dalam manajemen korporasi, agribisnis sapi potong, manajemen pembiakan dan penggemukan sapi potong, serta pengelolaan limbah sapi potong dalam rangka mewujudkan korporasi peternak.

Sasaran kegiatan bimbingan teknis yaitu peternak penerima manfaat kegiatan pengembangan 1000 desa sapi (pengurus dan anggota terpilih) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) di masing-masing desa lokasi kegiatan pengembangan 1000 desa sapi tahun 2021 atau unsur TNI AD lainnya di wilayah kecamatan/kabupaten.

Adapun hasil Pemaparan Materi Manajemen Korporasi Petani oleh Biroren pada Bimbingan Teknis Kegiatan Pengembangan Desa Korporasi Sapi dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Desa Korporasi Sapi Kab. Banyuasin dilaksanakan di desa Panca Mulya Kec, Air Kumbang. Penetapan desa terpilih diharapkan agar mudah dalam mobilisasi dan konsolidasi petani dalam usaha

peternakan sapi dalam satu kawasan. Untuk itu, dalam satu kecamatan terdiri dari 5 desa yang tergabung dalam satu kawasan sebagai cikal untuk pengembangan korporasi sapi potong.

2. Dalam hal ini, peserta Bimbingan Teknis Kegiatan Pengembangan Desa Korporasi Sapi Tahun 2021 di Kabupaten Banyuwasin diikuti 20 orang dari poktan-poktan dari 5 desa yaitu Panca Mulya, Muara Baru, Tirta Makmur, Sido Makmur dan Budi Mulya. Pada masing-masing desa diwakilkan pada 1 kelompok peternak yaitu Cemerlang, Jaya Bersama, Tunas Mandiri, Makmur Barokah dan Karya Muda. Masing-masing kelompok telah mempunyai komisi/bidang usaha yang terdiri dari komisi: Kelembagaan, Pakan, Pemeliharaan Hewan dan Pemasaran dan Pengolahan dan pada masing-masing komisi telah ditetapkan ketua. Untuk terperinci dapat dilihat pada table berikut ini:

No	Desa	Nama Kelompok	Komisi	Nama Peserta
1	Panca Mulya	Cemerlang	Kelembagaan	Agung Sugiarto
			Pakan	Jumadi
			Pemeliharaan Hewan	Budi Hartono
			Pemasaran dan Pengolahan	Hamdan
2	Muara Baru	Jaya Bersama	Kelembagaan	Parman
			Pakan	Sujiwo
			Pemeliharaan Hewan	Solikin
			Pemasaran dan Pengolahan	Muhamad Yahya
3	Tirta Makmur	Tunas Mandiri	Kelembagaan	Wahyudi
			Pakan	Subangun
			Pemeliharaan Hewan	Binhur
			Pemasaran dan Pengolahan	Jakimin
4	Sido makmur	Makmur Barokah	Kelembagaan	Agus Raharjo

			Pakan	Bahrudin
			Pemeliharaan Hewan	Jakimin
			Pemasaran dan Pengolahan	B. Nadhir
5	Budi Mulya	Karya Muda	Kelembagaan	Taryono
			Pakan	Sakino
			Pemeliharaan Hewan	Kuswantoro
			Pemasaran dan Pengolahan	Dwi Basuki

Selain peserta peternak, juga didampingi oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang juga ikut dalam bimbingan teknis tersebut.

3. Kementan dalam hal ini melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Kegiatan Pengembangan Desa Korporasi Sapi Tahun 2021 di Kabupaten Banyuasin memberikan bantuan berupa 1 paket kegiatan di masing-masing desa, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - e. Setiap desa terdiri dari 1 Kelompok Peternak yang menjadi calon penerima
 - f. Setiap Poktan/Gapoktan di masing-masing Desa mendapatkan bantuan 200 sapi potong, terdiri atas 100 sapi betina untuk usaha sapi pembiakan dan 100 sapi jantan untuk usaha penggemukan;
 - g. Setiap kelompok diwajibkan menyiapkan lahan untuk pakan seluas minimal 5 Ha untuk penanaman rumput pakan;
 - h. Setiap lokasi akan mendapatkan paket lainnya berupa kandang komunal untuk 100 ekor sapi, konsentrat pakan ternak untuk 4 bulan.
4. Pada kegiatan pengembangan desa korporasi pada usaha: a) Pembiakan, adanya bantuan 100 sapi betina untuk usaha sapi pembiakan dengan tujuan akan menghasilkan pedet yang pada saat umur 2 tahun, apabila pedet jantan akan dilakukan penggemukan sekitar 4 bulan selanjutnya siap untuk dipotong. Sedangkan untuk pedet betina akan dijadikan sebagai calon untuk induk sapi, b) Penggemukan, 100 sapi jantan untuk usaha penggemukan dikelola oleh masing-masing poktan yang sekitar 4 bulan sudah dapat dipasarkan. Kondisi ini diharapkan dapat menjadi pemasukan sebagai tambahan modal bagi kelompok untuk perputaran dalam usaha pengembangan sapi. Pada kegiatan ini diperlukan menjalankan bisnis kolektif berjamaah yang membidangi dari hulu-hilir yang menghimpun peternak-peternak untuk berkonsolidasi agar berkorporasi. Dukungan dan kerjasama dengan pihak terkait seperti perbankan,

pengusaha, mitra, petani, Polri/TNI serta aparat terkait baik di daerah maupun pusat sangat diperlukan.

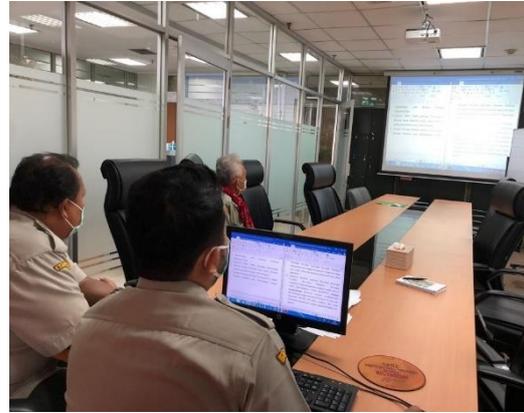
5. Pada bimtek ini juga disampaikan usaha hilirisasi yang dapat dikembangkan pada saat bersamaan dengan usaha pembiakan dan penggemukan sapi seperti pengelolaan limbah kandang berbasis sirkular ekonomi berkelanjutan. Limbah kandang yang terdiri dari kotoran sapi dan urin sapi dapat diolah untuk menghasilkan biogas, pupuk organik padat dan cair serta pupuk Kascing. Produk ini dapat menghasilkan potensi nilai ekonomi yang cukup besar kontribusi dalam usaha peternakan.
6. Dengan dilaksanakannya Bimbingan Teknis Kegiatan Pengembangan Desa Korporasi Sapi maka diharapkan peserta memahami teknis dan manajemen terkait pembiakan sapi potong, pakan, kesehatan hewan, pengolahan limbah ternak sapi, pemasaran, bisnis masing-masing bidang usaha yang akan dikembangkan, kerjasama tim dan kepemimpinan, pengembangan jejaring dan negosiasi, fungsi pembentukan lembaga yang berbadan hukum yang keseluruhan dibungkus dalam pengembangan korporasi peternak.
7. Mengingat paket bantuan Pengembangan Desa Korporasi Sapi pada Kabupaten Banyuwangi ditujukan pada 5 poktan di 5 desa maka dalam pengembangan kelembagaan korporasi petani dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kondisi di kawasan tersebut. Masing-masing poktan di setiap desa akan mengembangkan usaha ternak sapi sesuai komisi yang sudah dirancang yaitu Kelembagaan, Pakan, Pemeliharaan Hewan dan Pemasaran dan Pengolahan. Namun poktan-poktan dari beberapa desa dapat membangun usaha bersama untuk mempersar skala usaha dan efisiensi yang dapat dibangun dalam kelembagaan korporasi peternak berbentuk koperasi. Dapat juga dalam pengembangan korporasi peternak sapi potong dengan menginisiasi dengan pembentukan unit manajemen kawasan korporasi (UMKK). UMKK terdiri dari atas perwakilan anggota kelompok peternak atau gabungan kelompok peternak yang dipilih secara musyawarah dan mufakat. Tim pengarah dari UMKK dapat berasal dari dinas atau instansi pemerintah, atau tokoh masyarakat yang berpengaruh dalam pengembangan kawasan peternak. UMKK akan berbentuk lembaga yang berbadan hukum koperasi.

Tindak Lanjut:

1. Pelaksanaan teknis dan manajemen pengelolaan usaha di poktan/desa, maka konsolidasi didalam poktan dan sudah harus siap dengan pembagian tugas sesuai bidang dengan manajemen yang baik karena dalam waktu dekat akan diterima bantuan paket kegiatan 200 ekor sapi/poktan/desa. Mengingat hal tersebut maka masing-masing komisi yang telah dibentuk per kelompok ternak dapat bekerja seoptimal mungkin agar sisi teknis dan bisnis dengan pengelolaan manajemen yang baik dapat diterapkan. Dalam hal ini juga agar sudah dapat dijelaskan porsi pembagian kerja dan nilai ekonomi yang dapat diterima oleh masing-masing peternak sesuai dengan peran kerjanya.

2. Perencanaan pengembangan di tingkat poktan/desa, untuk perluasan jumlah peternak yang berminat atau ingin bergabung dalam usaha peternakan sapi perlu kejelasan mekanismenya termasuk dalam peningkatan populasi jumlah sapi pengemukan, pembiakan dan bidang usaha lainnya.
3. Konsolidasi poktan untuk membangun korporasi peternak, di 5 desa calon lokasi, agar segera disiapkan dalam mengembangkan korporasi sesuai tahapan penumbuhan/pengembangan yaitu: persiapan, konsolidasi, pembentukan Gapoktan Bersama/Koperasi/ Korperasi dan selanjutnya penguatan korporasi.
4. Perencanaan penbembangan bidang usaha di tingkat gapoknak (poknak bersama), juga sudah harus disiapkan. Secara umum bisnis yang dikembangkan adalah pengemukan sapi, budidaya sapi dan pengolahan limbah sapi, dan usaha tersebut berada pada poktan/desa. Sedangkan untuk bisnis lainnya yang dapat dijadikan bidang usaha yang akan dikelola ditingkat Gapoktan/Koperasi perlu dilakukan telaahan dengan memperhatikan efesiensi seperti pengadaan saprodi kebutuhan peternak, pakan ternak , pemasaran sapi dan produk lainnya, kerjasama dengan mitra. Demikian juga untuk perolehan pembiayaan seperti KUR, asuransi, atau berasal dari beberapa petani yang berkemampuan atau perorangan dan sumber lainnya .
5. Dalam pengembangan korporasi peternak diperlukan bimbingan dan pendampingan dari Kementan, Kemenkop, K/L terkait, pemda, perguruan tinggi, praktisi usaha peternakan yang berhasil dalam pengembangan usaha peternakan dengan konsep korporasi peternak. Dukungan kerjasama dengan pihak terkait seperti perbankan, pengusaha, pemitra, petani, Polri/TNI serta aparat terkait baik didaerah mapun pusat sangat diperlukan.
6. Perkembangan berikutnya setelah kelembagaan peternak dalam bentuk badan hukum (koperasi) dapat membangun badan usaha berbadan hukum PT dengan beberapa alternatif seperti gabungan antar koperasi peternak dengan swsta, BUMN, BUMD atau dengan sesama koperasi peternak. Badan usaha tersebut kepemilikannya/saham sebagian besar merupakan kepemilikan peternak. Demikian juga dengan bidang usaha yang dikembangkan agar dapat memberikan dukungan yang saling memberikan keuntungan yang profesional dan berkeadilan pada para pihak yang mendirikan korporasi tersebut.

Lampiran 4.k. Rapat Finalisasi Draft Revisi Permentan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani Tanggal 30 September 2021

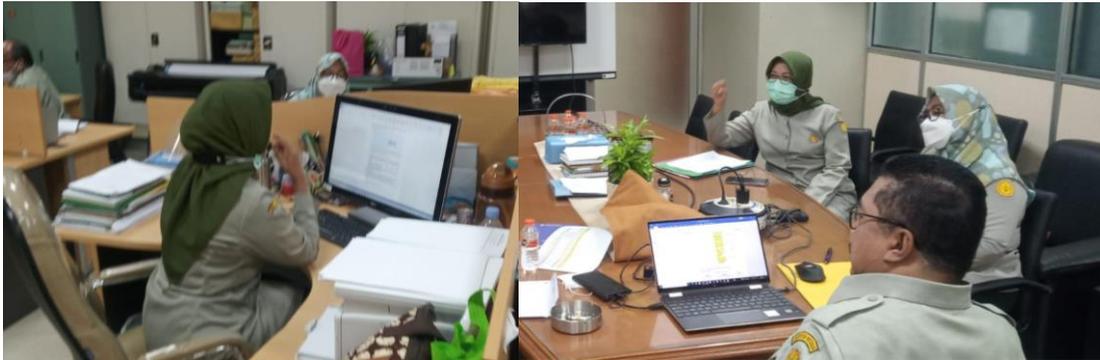


Ouput Pembahasa Draft Final Permentan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani:

1. Pada pembahasan ini, dibahas tentang beberapa perubahan sebagai salah satu penyelerasan antara draf revisi permentan 18/2018 dengan draf peraturan Presiden. Berdasarkan penyelerasan tersebut dibahas beberapa poin penting penyelerasan substansi antara lain definisi korporasi, Manajemen Kawasan, Penambahan Kriteria Kawasan dengan pembiayaan dan pendanaan
2. Pada definisi korporasi di sesuaikan dengan draf Perpres menjadi Korporasi Petani adalah kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum yang dibangun melalui konsolidasi petani, lahan/ternak, dan usaha untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing dan kesejahteraan petani.
3. Penambahan Ayat terkait dengan penjelasan Peruntukan Kawasan Pertanian dapat dikembangkan untuk program pengembangan Kawasan Food Estate, Kawasam Pertanian 4,0, Kawasan integrated farming
4. Penambahan ayat untuk pemilihan dan penetapan major project korporasi yang diusulkan untuk dilakukan oleh Direktur Jenderal lingkup kementerian Pertanian
5. Penambahan pasal baru terkait dengan bentuk fasilitas yang dapat diberikan kepada korporasi yaitu meliputi Insentif Perpajakan dan kemudahan izin berusaha dan akses.

E. Perbaiki mekanisme dan Pola Penyaluran Bantuan kepada Kelompok Tani dan Gapoktan untuk Dikelola Secara Korporasi

Lampiran 5.a. Penjaringan Masukan Pedum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Mendukung Pengembangan Korporasi Petani Tanggal 21 September 2021



Output:

Koordinasi ini dilakukan dalam rangka menjaring masukan untuk penyusunan Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Mendukung Korporasi Petani. Peserta pertemuan adalah Eselon I lingkup Kementerian Pertanian yang melaksanakan kegiatan bantuan pemerintah.

Diskusi

1. Yessy – Ditjen Hortikultura
 - Secara umum, Pedoman Umum Bantuan Pemerintah yang ada saat ini tidak terlalu bermasalah.
 - Persoalan utama yang sering ditemui dalam pelaksanaan bantuan pemerintah adalah proses identifikasi bantuan tidak dilaksanakan secara memadai. Akibatnya ketika bantuan pemerintah diterima oleh petani, spesifikasinya bisa tidak sesuai dengan yang dibutuhkan di lapangan
 - Perlu dicari solusi bagaimana melaksanakan identifikasi kebutuhan bantuan pemerintah yang dapat atau sesuai kebutuhan.

2. Yenny – Biro Perencanaan, Setjen
 - Perlu dipastikan bahwa koperasi dapat menerima bantuan pemerintah
 - Perlu mendorong Balai Besa Mekanisasi Pertanian (BB Mektan) – Badan Litbang Pertanian untuk segera menyusun standar minimal kebutuhan pertanian presisi (pertanian 4.0). Dengan demikian Eselon I lingkup Kementan yang memiliki tugas mengimplementasikan pertanian 4.0 mengetahui jenis bantuan pemerintah yang harus disediakan dan dimasukkan dalam Juknis Bantuan Pemerintah.

3. Agnes – Ditjen Perkebunan
 - Perlu kejelasan definisi korporasi, selanjutnya disosialisasikan kepada petugas pelaksana pengadaan. Hal ini agar petugas pelaksanaan pengadaan memiliki keyakinan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan bantuan pemerintah (peraturan pengadaan bantuan pemerintah memiliki aturan yang jelas)
Sebagai contoh: petugas pengadaan dan pembinaan korporasi petani di Dinas Pertanian provinsi/kabupaten/kota masih merasa kekhawatiran melanggar kewenangan tugas, dikarenakan pembinaan dan pendampingan kepada koperasi (yang menjadi salah satu bentuk korporasi) merupakan kewenangan Dinas Koperasi.

4. Puji Astuty – Ditjen Tanaman Pangan
 - Mengusulkan agar lokasi korporasi petani dapat segera ditetapkan, sehingga memberikan keyakinan dan kepastian kepada petugas perencana dalam mengalokasikan kegiatan dan fasilitasi bantuan pemerintah.
 - Apabila lokasi korporasi petani telah ditetapkan secara peraturan, maka dapat memperkecil potensi untuk pindah lokasi. Kepastian lokasi juga dapat membantu perencanaan penumbuhan dan pengembangan korporasi petani.

5. Sangadji – Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
 - Salah satu kendala terkait kegiatan bantuan pemerintah adalah belum tersusunnya KRO dan RO untuk kegiatan korporasi petani. Hal ini

menyulitkan para petugas perencana untuk mengalokasikan kegiatan dan anggaran untuk pengembangan korporasi petani

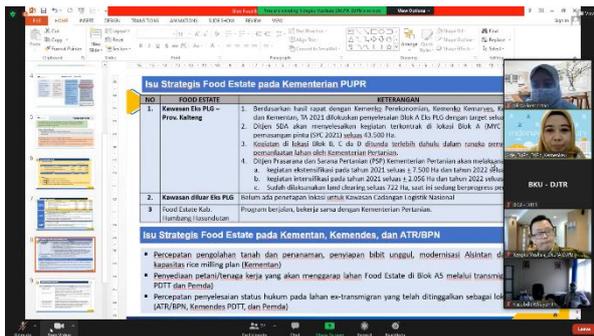
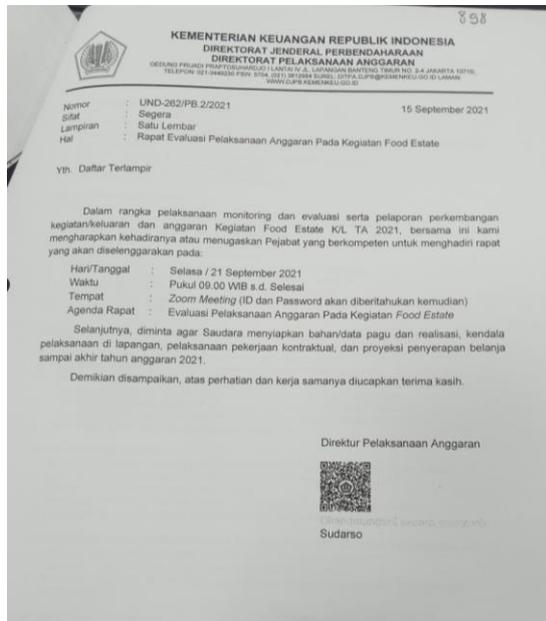
- Karena kondisi ini, Ditjen PSP mengalokasikan kegiatan dan anggaran pada KRO dan RO yang lain. Akibatnya, Ditjen PSP masih terhitung kurang memberikan dukungan untuk pengembangan korporasi petani.

6. Dedik – Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

- Menanggapi pernyataan dari pihak pemeriksa bahwa pemerintah tidak bisa mengatur penggunaan dan pengelolaan banper setelah banper disalurkan kepada masyarakat atau petani, dengan alasan banper bersifat hibah – hal ini bisa direspon dengan jawaban bahwa kinerja Eselon I tidak berhenti sampai output saja (bantuan disalurkan dilengkapi BAST), namun sampai outcome, dampak dan manfaat.
- Berdasarkan penilaian kinerja tersebut, maka Pemerintah memiliki alasan yang cukup untuk membuat pedoman yang diperuntukkan bagi para perencana, petugas pendamping, dan petani dalam melakukan pengelolaan bantuan pemerintah.

Tindak lanjut pertemuan dan pembahasan adalah: perlunya disusun pedoman umum yang dapat menjadi acuan bagi para pelaksana kegiatan banper dalam mengatur dan mengelola bantuan pemerintah.

Lampiran 5.b. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran pada Kegiatan *Food Estate* Tanggal 21 September

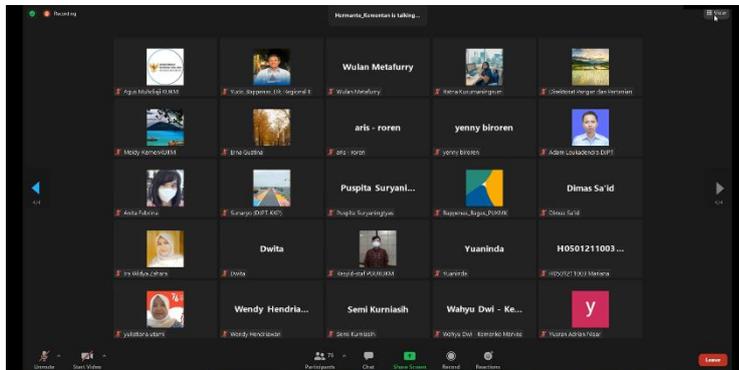


Notulen Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran pada Kegiatan *Food Estate* 21 September 2021

1. Kegiatan *Food Estate* Kalimantan Tengah dilakukan di lahan seluas 30.000 ha, Sumatera Utara 1.000 ha dan NTT 5.000 ha.
2. Tahun 2021, total kegiatan intensifikasi untuk *food estate* Kalimantan tengah seluas 14.135 ha.
3. Anggaran untuk kegiatan *food estate* mengalami *refocusing* akibat penghematan APBN, walaupun *food estate* termasuk salah satu kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional.

4. Realokasi Anggaran Food Estate di Prov. Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 semula pagi awal sebesar Rp.6.087.869.646,00 mengalami beberapa kali refocusing menjadi:
 - a. Refocusing I: Rp.2.579.229.569
 - b. Refocusing III: Rp.654.023.687
 - c. Refocusing IV: Rp.91.357.720
 - d. Realokasi untuk Tindak Lanjut Direktif Baru: 912.073.153
 - e. Sisa Anggaran (dalam proses realokasi pemanfaatan): Rp. 545.992.195
5. Berdasarkan hasil rapat dengan kementerian Perekonomian, Kemenko Marves, Kementerian PUPR dan kementerian Pertanian, Tahun Anggaran 2021 difokuskan penyelesaian Blok A eks PLG dengan target seluas 43.500 ha.
6. Kementerian telah bersinergi dengan Kementerian PUPR terutama untuk penyelesaian beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan.
7. Kegiatan difokuskan di Blok A sehingga kegiatan lain tertunda, karena kegiatan kementan baru dapat dilaksanakan setelah kegiatan PUPR selesai untuk mempersiapkan lahan dan jaringan irigasi.

Lampiran 5.c. Diskusi dan Pembahasan Penyusunan Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian Tanggal 27 September 2021



Output:

NOTULEN

Diskusi dan Pembahasan Penyusunan Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian Jakarta, 27 September 2021

Koordinasi ini dilakukan dalam rangka membahas penyusunan konsep pedoman umum bantuan pemerintah kementerian Pertanian Tahun 2022. Pertemuan juga dimaksudkan untuk membahas penyusunan Pedum Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian Tahun 2022, setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga.

Dengan adanya perpres tersebut, maka Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga harus mendapat persetujuan presiden sebelum peraturan itu ditetapkan. Dilihat dari salinan dokumen yang diunggah laman resmi Sekretariat Kabinet, Perpres 68 Tahun 2021 ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 2 Agustus 2021. Pasal 3 Ayat (1) Perpres Nomor 68 Tahun 2021, menyatakan bahwa "Setiap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang akan ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga wajib mendapatkan Persetujuan Presiden".

Peserta pertemuan adalah:

1. Bagian Perencanaan Anggaran
2. Bagian Perencanaan Wilayah
3. Biro Hukum

Diskusi

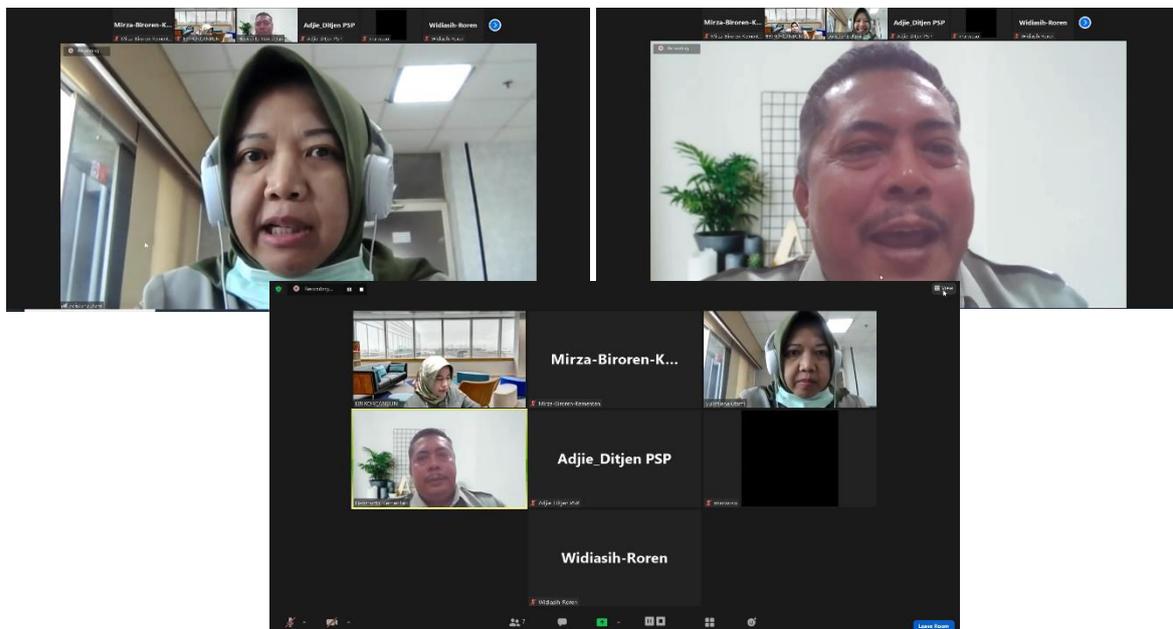
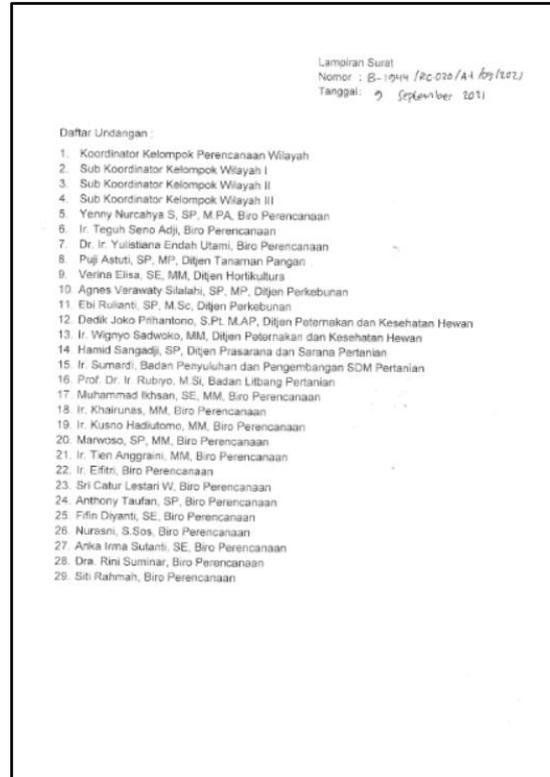
- Selama ini, sesuai arahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 tahun 2015 dan PMK Nomor 173 Tahun 2016 tentang Bantuan Pemerintah, bahwa K/L diminta menyusun Pedoman Umum Bantuan Pemerintah untuk unit organisasi masing-masing.
- Kementerian Pertanian menyusun Pedum Bantuan Pemerintah Kementan setiap tahun.
- Dengan terbitnya Perpres Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, maka Kementerian Pertanian mempertimbangkan untuk tidak menyusun Pedum Banper Kementan setiap tahun.
- Ke depan, dimulai di tahun 2022, Kementan akan menyusun Pedum Banper yang berlaku multiyears. Pasal dan ayat dalam Pedum akan didesain secara umum, sehingga tidak perlu dirubah setiap tahun.
- Pengaturan dan penjelasan lebih detil dari yang tercantum dalam Pedum, akan dicantumkan pada Petunjuk Teknis atau Petunjuk Pelaksanaan yang disusun oleh Eselon I pelaksana bantuan pemerintah.
- Untuk Pedum Banper TA 2022, Pedum mencantumkan program dan kegiatan (dengan asumsi tidak ada perubahan setiap tahun). Detil pengaturan setelah kegiatan, dicantumkan dalam Juknis/Juklak Eselon I.
- KRO dan RO tidak dicantumkan dalam Pedum, melainkan dalam Juknis/Juklak Eselon I.
- Lampiran Pedum Banper dibuat seringkas mungkin.
- Usulan Bagian Perencanaan Wilayah bahwa perlu klausul yang mengatur pengelolaan bantuan pemerintah – Biro Hukum menyarankan untuk dimasukkan dalam Surat Edaran Menteri Pertanian saja. Hal ini akan memudahkan apabila ada perubahan dalam klausul pengelolaan banper.

Tindak lanjut pertemuan adalah:

1. Tim Penyusun Konsep Pedum Banper akan mencermati kembali pasal dan ayat dalam konsep Pedum Banper TA 2022
2. Mengundang Eselon I untuk membahas konsep Pedum Banper TA 2022.

Bagian Perencanaan Wilayah diminta melakukan pembahasan bersama Eselon I untuk menyusun konsep Pedum Pengelolaan Bantuan Pemerintah.

Lampiran 5.d. Rapat Koordinasi Pembahasan Penyusunan Pedum Pengelolaan Bantuan Pemerintah mendukung Korporasi Petani Tanggal 13 Oktober 2021



NOTULEN
Rapat Koordinasi Pembahasan Penyusunan Pedum Pengelolaan
Bantuan Pemerintah Mendukung Korporasi Petani
Jakarta, 13 September 2021

Koordinasi ini dilakukan dalam rangka pembahasan penyusunan konsep pengelolaan bantuan pemerintah mendukung Korporasi Petani.

Peserta pertemuan adalah Tim Kecil Penyusun:

1. Hermanto – Biro Perencanaan
2. Yulistiana Utami – Biro Perencanaan
3. Hamid Sangadji – Ditjen PSP
4. Ebi – Ditjen Perkebunan
5. Marwoso – Biro Perencanaan
6. Kusno Hadiutomo – Biro Perencanaan
7. Tien Anggraini – Biro Perencanaan

Diskusi

Hermanto – Bagian Perencanaan Wilayah, Biro Perencanaan

- Dalam rangka pengembangan korporasi petani, salah satunya diperlukan dokumen pendukung berupa pedoman umum.
- Rapat ini akan membahas penyusunan:
 1. Pedum Pengembangan Kelembagaan Petani
 2. Pedum Pengelolaan Banper Mendukung Korporasi Petani
- Kedua pedum ini diperlukan dalam upaya akselerasi pengembangan korporasi petani

Ebi – Ditjen Perkebunan

- Bagaimana bentuk kerjasama penggunaan bantuan pemerintah. Perlu bantuan pengaturan untuk tertib administrasinya.

Hermanto – Bagian Perencanaan Wilayah, Biro Perencanaan

- Penerima bantuan bisa pada aspek hulu dan hilir
- Peraturan banper menyebutkan bahwa tidak ada pengalihan asset dari penerima ke pihak lain
- Untuk mengelola aset, bisa dikelola secara bersama, bisa bagi hasil, atau sewa

- Diperlukan adanya rambu-rambu yang dapat menjadi pegangan korporasi petani dalam mengelola asset gapoktan dan koperasi
- Harapan mentan: asset menjadi penyertaan modal --- sampai hari ini, harapan mentan tersebut belum dapat dilaksanakan. Aturannya belum jelas.
- Pemanfaatan akan diprioritaskan oleh internal penerima, baru kemudian dimanfaatkan secara eksternal

Sangadji – Ditjen PSP

- Di Ditjen PSP, belum diakomodir akun untuk kegiatan dan anggaran guna mendukung korporasi
- Korporasi bagian dari major project – namun belum ada RO nya
- Permentan Korporasi – harus per subsector dan per komoditas – perlu jadi referensi
- Pedoman ini diharapkan jadi pedoman pelaksanaan kegiatan pengembangan korporasi petani
- Apabila korporasi diterima secara perencanaan, maka hulu dan hilir jadi dapat terintegrasi
- Saran: ditambahkan dalam Pedum: sistem pelaporan, kebutuhan anggaran/sumber pembiayaan
- Tantangan bagi kita semua: bagaimana banper bisa dikawal, supaya terwujud korporasi petani

Kusno – Bagian Kebijakan dan Program, Biro Perencanaan

- masing-masing es1 sdh membuat juklak tentang pengadaan dan penyaluran
- Usul: banper untuk korporasi dan banper untuk non korporasi, dapat dipisahkan
- Peralatan untuk kelompok hulu dibedakan untuk kelompok hilir

Marwoso – Bagian Perencanaan Anggaran, Biro Perencanaan

- Pedum Banper merupakan turunan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Dalam PMK sudah cukup detil pengaturan pelaksanaan kegiatan banper.
- Kita harus hati-hati, apakah koperasi dan korporasi bisa menerima banper.
- Usul: perlu mencari sumber pembiayaan lain (selain APBN) untuk fasilitasi Banper petani. Contoh: KUR

Hermanto – Bagian Perencanaan Wilayah, Biro Perencanaan

- Banper untuk korporasi sampai saat ini masih bingung bagaimana mengelolanya
- Korporasi memiliki dua pilihan: PT dan Koperasi
- Secara peraturan, PT tidak bisa menerima banper. Sementara, koperasi masih dimungkinkan menerima banper
- Konsep Gapoktan Bersama dimunculkan sebagai jalan tengah, merespon konsep koperasi dan PT untuk menerima banper
- Bantuan dapat disalurkan lewat Gapoktan Bersama --- bagaimana pengelolaan banper di Gapoktan Bersama?

Tien Anggraini – Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Biro Perencanaan

- Di sisi perencanaan, yang di setuju di e proposal, adalah petani dan poktan yang sudah tercantum dalam aplikasi simluhtan.
- Untuk poktan atau gapoktan yang belum terdaftar di aplikasi simluhtan, agar BPPSDMP menyelesaikan persoalan ini.
- Mekanisme banper itu rumit – apakah cocok diberikan ke start up?
- Apakah koperasi bias menerima bantuan pemerintah?

Hermanto – Bagian Perencanaan Wilayah, Biro Perencanaan

- Sepakat bahwa PT tidak bisa menerima bantuan pemerintah, sementara Koperasi masih bisa terima bantuan pemerintah
- Start up – perlu difasilitasi, karena OJK tidak bisa bantu apa2, makanya perlu kehadiran pemerintah
- Dalam arahan presiden – pemerintah perlu hadir melakukan pendampingan dalam penumbuhan dan pengembangan korporasi petani
- Khusus FE, di kalteng – gapoktannya sudah masuk di simluhtan
- Di lapangan --- faktanya bantuan pemerintah sudah dimanfaatkan oleh korporasi, namun aturan pengelolaannya belum jelas atau belum ada.

Ebi – Ditjen Perkebunan

- Bun sedang mempersiapkan pedoman pengelolaan banper lingkup perkebunan
- Perlu menyusun dengan hati-hati untuk persyaratan/prasyarat penerima banper

- Ditjen Perkebunan mendesain semua kegiatan yang akan masuk di kabupaten bandung, dikemas dalam bentuk korporasi. Bagaimana menjelaskan dalam pedum bahwa yg dikerjakan perkebunan tidak masuk ranah perindustrian
- Perlu dituliskan standar minimal untuk bantuan pemerintah

Hermanto – Bagian Perencanaan Wilayah, Biro Perencanaan

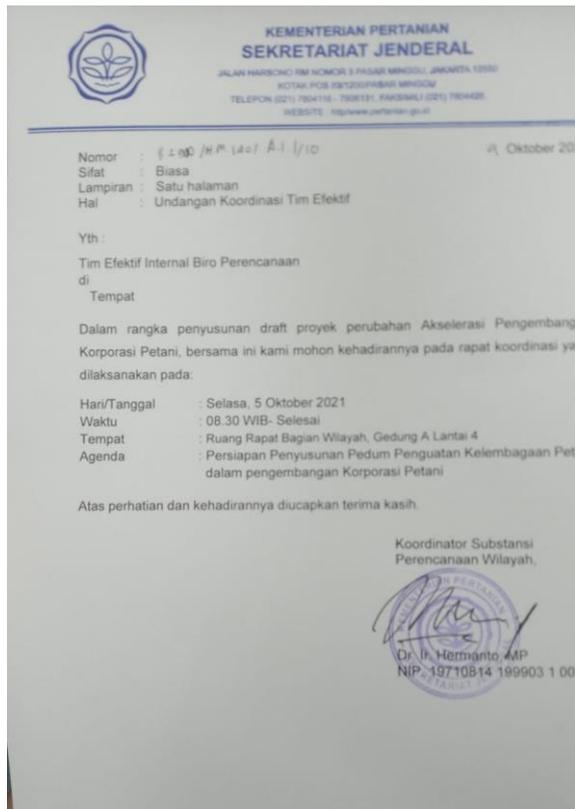
- Draft pedum pengelolaan banper ini akan dikonsultasikan ke DJA, Kemenkeu

Tindak Lanjut pertemuan yaitu:

1. Konsep Pedum Pengelolaan Bantuan Pemerintah disampaikan ke Eselon I (anggota Tim Penyusun) untuk mendapatkan masukan.
2. Masukan ditunggu dalam waktu 1 minggu ke depan.

F. Penyusunan draft Pedum penguatan kelembagaan petani dalam pengembangan korporasi petani

Lampiran 6.a. Rapat Koordinasi Tim Efektif Internal Biro Perencanaan Persiapan Penyusunan Pedum Penguatan Kelembagaan petani dalam Pengembangan Korporasi Petani



NOTULEN
Rapat Koordinasi Pembahasan Penyusunan Pedum Penguatan Kelembagaan
petani dalam Pengembangan Korproasi Petani
Jakarta, 5 Oktober 2021

Koordinasi ini dilakukan dalam rangka pembahasan penyusunan konsep pengelolaan bantuan pemerintah mendukung Korporasi Petani. Peserta pertemuan adalah Tim Kecil Penyusun pedum. Hasil pertemuan sebagai berikut:

1. Outline
 - BAB I. PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Tujuan dan Sasaran
 - 1.3. Ruang Lingkup
 - BAB II. PENGUATAN KAPASITAS TEKNIS
 - 2.1. Konsolidasi Di Tingkat Poktan
 - 2.2. Konsolidasi Di Tingkat Gapoktan
 - 2.3. Konsolidasi Di Tingkat Gabungan Gapoktan
 - BAB III. PENGUATAN TATA KELOLA
 - 3.1. Peningkatan Kapasitas Manajemen Organisasi
 - 3.2. Peningkatan Kapasitas Manajemen Usahatani
 - BAB IV. PENGUATAN LEGALITAS KELEMBAGAAN
 - 4.1. Status Legalitas Kelembagaan Ekonomi Petani
 - 4.2. Percepatan Legalitas Kelembagaan Ekonomi Petani
 - BAB V. PENUTUP
2. Guna melakukan percepatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani dalam bentuk Poktan dan Gapoktan menjadi Badan Usaha Milik Petani (BUMP) sebagai kelembagaan ekonomi yang berbadan hukum serta memiliki kapasitas usaha tani yang berdaya saing, maka dibutuhkan keberadaan Pedoman Penguatan Kelembagaan Petani di Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani.
3. Ruang lingkup dari Pedoman Penguatan Kelembagaan Petani di Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani ini dibatasi pada upaya mentransformasikan kelembagaan petani Poktan dan Gapoktan sebagai pelaku utama di tingkat lapangan untuk menjadi kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum dalam melaksanakan kegiatan usaha tani yang berorientasi pada penumbuhan dan pengembangan korporasi petani di kawasan pertanian. Secara khusus ruang lingkup dari Pedoman Penguatan Kelembagaan Petani di Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani

Lampiran 6.b. Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I Pembahasan Penetapan Lokasi Korporasi Petani dan Nelayan (KPN) Percontohan Tanggal 8 Oktober 2021



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PANGAN DAN AGRIBISNIS
 Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710 Telepon 021-3521857 Fax. 021-3521853

Nomor : TAN.05.01/676/D.II.M.EKON/10/2021 6 Oktober 2021
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Hal : Rapat Koordinasi Korporasi Petani dan Nelayan

Kepada Yth.
 (mohon berkenan melihat daftar lampiran)
 di Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti Rapat Koordinasi Penguatan Peran Koperasi Pertanian yang dilaksanakan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pada tanggal 28 September 2021 dengan pokok tindak lanjut Penetapan Pilot Project Korporasi Petani dan Nelayan (KPN) Percontohan, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 08 Oktober 2021
 Waktu : 13.30 WIB s/d selesai
 Zoom Meeting : Meeting ID: 225 333 5297, Password: pangan5
 Agenda Rapat : Pembahasan Penetapan Pilot Project Korporasi Petani dan Nelayan (KPN) Percontohan

Mengingat pentingnya acara dimaksud, mohon kehadiran Saudara tidak diwakilii, namun apabila berhalangan harap menggunakan pejabat yang diberi kewenangan mengambil keputusan. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdr. Kunto Nugroho (087886026137).

Demikian, terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.


 Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis
Muehdhalifah Mahmud
 NIP.19640913 199003 2 001

Tembusan Yth. :
 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (sebagai laporan);
 2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Lampiran I
 Nomor : TAN.05.01/676/D.II.M.EKON/10/2021
 Tanggal : 6 Oktober 2021

DAFTAR UNDANGAN
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
 1. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan
 2. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi
 3. Deputi Sumber Daya Maritim

Kementerian PPN/Bappenas
 4. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam
 5. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Kementerian Dalam Negeri
 6. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah

Kementerian Keuangan
 7. Direktur Jenderal Anggaran

Kementerian Pertanian
 8. Direktur Jenderal Tanaman Pangan
 9. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
 10. Direktur Jenderal Perkebunan
 11. Direktur Jenderal Hortikultura
 12. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian

Kementerian Kelautan dan Perikanan
 13. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
 14. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
 15. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
 16. Kepala Biro Perencanaan KKP

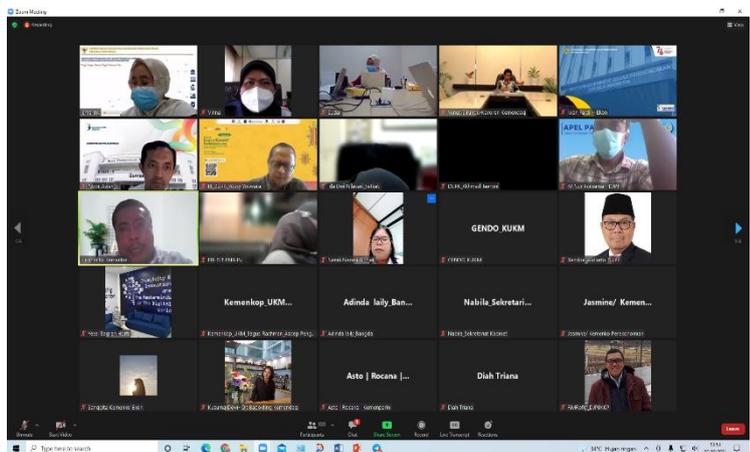
Kementerian Desa dan PDTT
 17. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
 18. Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
 19. Kepala Biro Perencanaan Kemendes PDTT

Kementerian Koperasi dan UKM
 20. Deputi Bidang Perkooperasian
 21. Kepala Biro Perencanaan Kemkeno dan UKM
 22. Direktur Utama LPDB KUMKM

Kementerian BUMN
 23. Wakil Menteri BUMN I

Kementerian Perdagangan
 24. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
 25. Kepala Biro Perencanaan Kemendag

Kementerian Perindustrian
 26. Direktur Jenderal Industri Agro
 27. Kepala Biro Perencanaan Kemenperin



**Notulen Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I Pembahasan Penetapan Lokasi
Korporasi Petani dan Nelayan (KPN) Percontohan
8 Oktober 2021**

Telah disepakati:

- a. Lokasi KPN Percontohan Utama
 - i. Koperasi Citra Kirana/ PT. Tasbiha Mulia Tani, Kab. Demak (komoditas Padi)
 - ii. PT. Java Preanger Lestari Mandiri, Kab. Bandung (Komoditas Perkebunan/Kopi)
- b. Lokasi KPN Percontohan Lainnya
 - i. Koperasi Brahman Sejahtera Kab. Subang (Komoditas Peternakan/Sapi Potong)
 - ii. Koperasi Tani Mulus, Kab. Indramayu (Komoditas Padi)
 - iii. Koperasi Pondoik Pesantren Al-Ittifaq, Kab. Bandung (Komoditas Hortikultura)
- c. Untuk mendukung pengembangan KPN Percontohan ini diharapkan sinergitas program, kegiatan, dan anggaran melalui pembagian peran sesuai Tugas dan Fungsi masing-masing Eselon-I dari Kementerian/Lembaga terkait
- d. Lokasi pengembangan KPN di luar KPN Percontohan Utama dan KPN Percontohan lainnya akan menjadi kegiatan regular dari K/L dan bisa menjadi cikal bakal KPN yang ditetapkan pada tahun-tahun berikutnya.

Lampiran 6.c. Progress Penyusunan Rencana Bisnis PT. Tani Mulus Emas Tanggal 12 Oktober 2021

 <p>KEMENTERIAN PERTANIAN SEKRETARIAT JENDERAL JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 KOTAK POS 58120/PASAR MINGGU TELEPON (021) 7904116 - 7904131, FAKSIMILI (021) 7904428 WEBSITE : http://www.pertanian.go.id</p>	Lampiran Surat Nomor : Tanggal :
Nomor : 021/2124/SL.040/A1/01.0021 Sifat : Lampiran : satu lembar Hal : Undangan Rapat 7 Oktober 2021	
Yth. (mohon berkenan melihat daftar terlampir) di- Tempat	Daftar Undangan : 1. Asisten Deputi Pengembangan dan Pembaruan Perkoperasian 2. Sekretaris Ditjen Tanaman Pangan 3. Direktur Komersial, PT RNI 4. Direksi PT Tani Mulus Emas 5. Koordinator Substansi Perencanaan Wilayah 6. Sub Koordinator Wilayah I 7. Yenny Nurcahya Salampessy, SP,MPA (Perencana Madya) 8. Sri Catur LW (Fungsional Umum)
Dalam rangka tindak lanjut penyusunan rencana bisnis Korporasi Petani Padi di Kabupaten Indramayu mohon kehadiran Saudara atau menugaskan Pejabat/Staf yang menangani kegiatan korporasi petani untuk hadir pada pertemuan yang akan dilaksanakan pada: Hari/tanggal : Selasa/ 12 Oktober 2021 Pukul : 09.30 WIB – selesai Tempat : Ruang Rapat PT Tani Mulus Emas DESA EMAS Group Office 12A FL MENARA 165 Building, Jl. TB. Simalupang Kav. 1, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560 Agenda : Progress penyusunan rencana bisnis PT Tani Mulus Emas Mengingat pandemi Covid 19 belum berakhir, acara rapat diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.	
 <p>Kepala Biro Perencanaan Dr. Ir. I Ketut Karyasa, M.Si NIP. 19690419 199803 1 002</p>	
Tembusan: Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian	



Notulen Progress Penyusunan Rencana Bisnis PT. Tani Mulus Emas 12 Oktober 2021

Bersama ini kami sampaikan hasil rapat tindak lanjut penyusunan rencana bisnis korporasi petani PT Tani Mulus Emas yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2021 di Wsima 165 Jaksel. Rapat dipimpin oleh Koordinator Perencanaan Wilayah dan dihadiri oleh Ketua Yayasan Gerakan Desa Emas, Wakil dari Direksi PT Tani Mulus Emas, wakil dari PT RNI dan Kementerian Koperasi. Adapun agenda rapat

adalah tindak lanjut penyusunan rencana bisnis korporasi PT Tani Mulus Emas. Adapun hasil rapat adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Menko dengan Eselon I K/L pada tanggal 8 Oktober 2021, Korporasi petani padi Kab. Indramayu, PT Tani Mulus Emas, menjadi salah satu Korporasi Petani/Nelayan Percontohan lainnya bersama dengan 4 lokasi lainnya. Lokasi tersebut merupakan Proyek Percontohan Nasional yang harus dikembangkan hingga tahun 2022. Lokasi ini masih pada tahap penumbuhan sehingga perlu dipersiapkan untuk dikembangkan secara optimal.
2. Untuk itu dalam rangka mempercepat pelaksanaan penumbuhan Korporasi Petani ini, perlu adanya dukungan dan sinergitas antar K/L untuk pengembangan korporasi petani. Beberapa Aspek kegiatan dalam pelaksanaan sinergitas ini yang harus menjadi perhatian adalah konsolidasi lahan, konsolidasi kelembagaan, konsolidasi usaha, akses input, akses alsintan, penguatan system irigasi, akses pembiayaan, pengoneksian dengan offtaker/pasar, adopsi GAP, GHP dan GMP sesuai kebutuhan Pasar, Akses Teknologi Proses Lanjutan, Efisiensi Sistem Logistik (Rantai Pasok) dan Pemanfaatan Transportasi Besar/Penyediaan Sarana Prasarana Jalan Desa.
3. Sampai saat ini di Korporasi PT Tani Mulus Emas, konsolidasi lahan yang telah dilakukan sudah mencapai 6.000 ha dan ditargetkan mencapai 10.000 ha dengan melakukan konsolidasi petani, kelembagaan petani dan manajemen usaha.
4. Pembiayaan menjadi salah satu titik kritis dalam pengembangan korporasi petani sehingga dimungkinkan dukungan dari pihak investor/swasta untuk sumber pembiayaan (modal kerja dan modal investasi) baik sebagai pemegang saham dan atau joint venture.
5. Dalam merancang model bisnis Korporasi petani disusun dengan menggunakan model bisnis Canvas (BMC). Dalam model bisnis ini harus dibangun sinergi yang kuat antara petani, koperasi, korporasi petani dengan *off taker* sehingga dapat diciptakan nilai manfaat bersama secara berkeadilan.
6. Saat ini RNI melalui Program *MAKMUR* telah menginisiasi program bersama dengan PT Pupuk Indonesia (PIHC) untuk memfasilitasi pengelolaan usahatani petani di tingkat on-farm dengan beberapa komponen fasilitasi diantaranya penyediaan sarana produksi, fasilitas pembiayaan KUR sampai dengan maksimal 500 juta untuk seumur hidup, asuransi gagal panen atau gagal bayar
7. Korporasi PT Tani Mulus Emas saat ini telah merancang rencana bisnis korporasi petani disamping bisnis perdagangan Beras yang saat ini sudah berjalan. Bisnis lain yang prospektif seperti bisnis perbenihan, distributor pupuk serta pengelolaan resi Gudang juga akan dirintis. Meskipun demikian sampai saat ini kendala pembiayaan masih menjadi masalah dalam pengembangan usaha.
8. Masih banyak petani Indramayu yang memiliki tunggakan KUT sehingga sulit untuk mendapat fasilitasi KUR, sedangkan untuk modal kerja maupun Investasi

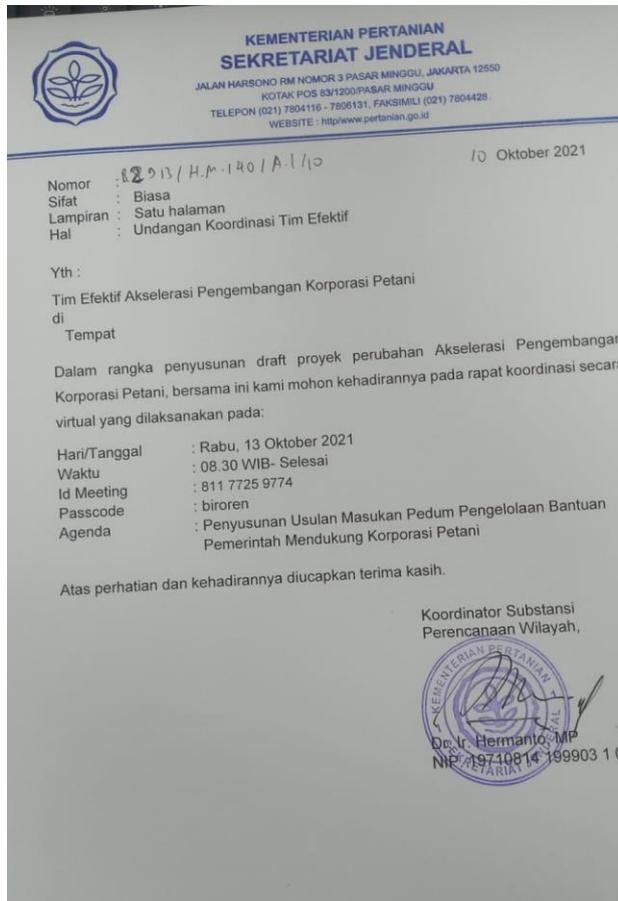
masih sangat kurang. Sumber Pembiayaan seperti LPDB masih sulit diperoleh karena masih meminta agunan berupa barang yang sulit untuk dipenuhi oleh pengelola koperasi.

9. Korporasi Petani PT Tani Mulus Emas saat ini akan menyiapkan database petani serta manajemen usahatani melalui digitalisasi *core system* yang terintegrasi antara e-commerce, e-procurement, jasa distribusi dan pembiayaan agar lebih cepat mencapai target luasan 10.000 ha.

Tindak lanjut

1. Terkait dengan pembiayaan modal kerja dan investasi korporasi petani, Kementerian Koperasi dan UMKM diharapkan dapat membantu melalui koperasi dengan memberikan relaksasi fasilitasi pembiayaan dari LPDB seperti penyederhanaan administrasi untuk pengajuan pinjaman sehingga koperasi mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan modal kerja dan modal investasi. Salah satu upaya yang disarankan untuk dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM terkait dengan relaksasi tersebut adalah memasukkan klausul penyederhanaan pengajuan pinjaman baik melalui Bank dan LPDB dalam rancangan Peraturan Presiden tentang Korporasi Petani.
2. Mendetilkkan matrik dukungan K/L untuk korporasi petani (Sebagaimana matrik terlampir)
3. Menyusun model bisnis dengan menggunakan model bisnis canvas (Sebagaimana format terlampir)
4. Pengisian matriks dan BMC secara parallel akan didampingi oleh RNI dan Kementerian Pertanian.

Lampiran 6.d. Rapat Koordinasi Pembahasan Penyusunan Pedum Kelembagaan Petani dalam Pengembangan Korporasi Petani Tanggal 13 Oktober 2021

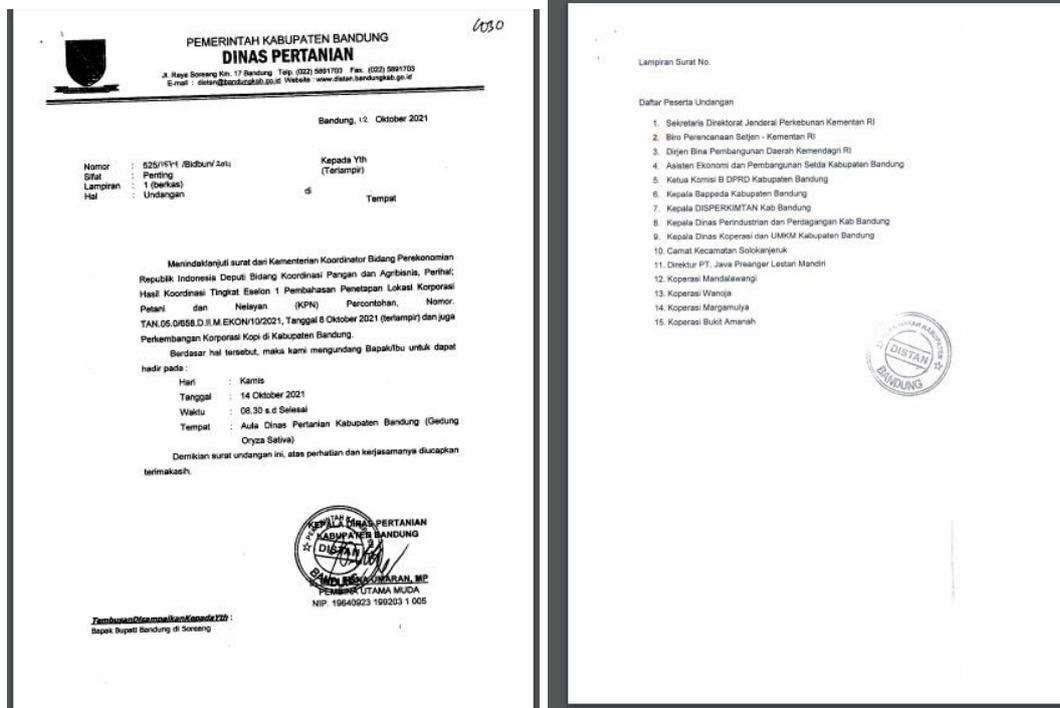


NOTULEN
Rapat Koordinasi Pembahasan Penyusunan Pedoman Penguatan Kelembagaan
petani dalam Pengembangan Korporasi Petani
Jakarta, 13 Oktober 2021

Koordinasi ini dilakukan dalam rangka pembahasan penyusunan konsep pengelolaan bantuan pemerintah mendukung Korporasi Petani. Peserta pertemuan adalah Tim Kecil Penyusun pedoman. Hasil pertemuan sebagai berikut:

1. Ruang lingkup rancangan Pedoman Penguatan Kelembagaan Petani ini hanya dibatasi pada percepatan proses transformasi manajemen Poktan dan Gapoktan sebagai kelembagaan petani untuk menjadi kelembagaan ekonomi petani dalam rangka mendukung pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani di lokasi major project korporasi petani tahun 2020-2024.
2. Proses penyusunan pedoman dibutuhkan data dan informasi yang lengkap dari hasil evaluasi dinamika pelaksanaan major project korporasi petani yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 dan 2021 serta pelaksanaan pilot project korporasi petani tahun 2019 dan tahun 2020.
3. Kontribusi dari instansi Eselon I yang membidang komoditas di lingkup Kementerian Pertanian sangat dibutuhkan agar Pedoman Penguatan Kelembagaan Petani ini dapat dilaksanakan berdasarkan kendala dan permasalahan (*lesson learned*) pelaksanaan *major project* korporasi petani.
4. Rancangan Pedoman Penguatan Kelembagaan Petani masih merupakan rancangan awal yang membutuhkan koreksi dan penajaman terhadap tujuan dan sasaran serta sistematika dan kisi-kisi penuangannya agar mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan pengembangan korporasi petani hingga aparat teknis di tingkat lapangan.

Lampiran 6.e. Rapat Koordinasi Pembahasan Perkembangan Major Project Korporasi Petani Bandung Tanggal 14 Oktober 2021



Dalam upaya akselerasi dan percepatan implementasi korporasi petani PT JPLM, diperlukan upaya-upaya strategis yang mampu memberikan percepatan terhadap akselerasi kinerja PT JPLM, salah satunya dengan mengikuti pameran guna memperluas peluang pasar sekaligus memperoleh potensial buyer, khususnya pasar ekspor. Dalam kaitan tersebut, PT JPLM pada tanggal 15-18 September 2021, PT JPLM telah ikut serta dalam kegiatan pameran Coffee Expo di Istanbul.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan pameran tersebut, telah dilakukan pertemuan guna menindaklanjuti hal tersebut melalui Rapat Koordinasi di Dinas Pertanian Kabupaten Bandung pada tanggal 14 Oktober 2021.

Adapun poin-poin dari hasil pertemuan Rapat Koordinasi Tindak lanjut tersebut, yaitu :

1. Melalui kegiatan Coffex 2021 telah diperoleh 10 calon buyer potensial, yang berasal dari berbagai negara, utamanya dari Timur Tengah dan Eropa.
2. Terdapat dua potensial buyer, yaitu Delfiano Coffee yang berminat untuk melakukan transaksi dengan kapasitas 20 kontainer kopi arabica per tahun, selain itu juga dari OJA TV yang rencananya di akhir November akan melakukan pemesanan sebanyak 10 kontainer kopi robusta.
3. Ditjen Perkebunan akan melakukan pemetaan terkait dengan wilayah-wilayah yang memungkinkan untuk dijadikan sumber raw material cherry dengan mengacu kepada kesamaan komoditas kopi yang diminta.
4. Pemerintah Kabupaten Bandung berkomitmen untuk mendukung penuh korporasi petan kopi PT JPLM, dan akan segera membantu proses pembebasan dan tukar guling lahan, mengingat calon lahan berdirinya Center of Excellent masih terpisah-pisah walaupun dalam satu areal.
5. Biru Marmara Group akan berkoordinasi secara lebih intens dengan calon buyer terkait dengan Letter of Interest (LOI), termasuk di dalamnya mekanisme pembayaran, pengangkutan dan spesifikasi produk secara lebih detail.
6. PT JPLM akan melakukan estimasi perhitungan biaya operasional yang dikeluarkan untuk menentukan besaran margin yang bisa diperoleh.
7. PT JPLM akan segera melakukan RUPS guna memasukkan Biru Marmara Group sebagai salah satu investor.
8. Biro Perencanaan dan Biro KLN agar melakukan koordinasi dengan KJRI Istanbul dan Kedutaan Besar Indonesia di Turki untuk membantu kelancaran proses administrasi *Government to Government (G to G)*.

Lampiran 6.f. Penajaman Rancangan Pengembangan Korporasi Petani Subang Tanggal 15 Oktober 2021


 REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
 KOTAK POS 831200 PASAR MINGGU
 TELEPON (021) 7804116 - 7806131, FAKSIMILI (021) 78063056
 WEBSITE <http://www.pertanian.go.id>

Nomor : B-2164/RC.040/A.1/10/2021 13 Oktober 2021
 Sifat : Segera
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Hal : Rapat Koordinasi

Yth.
 (mohon perkenan melihat daftar terlampir)
 di -
 Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti Hasil Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I Pembahasan Penetapan Lokasi Korporasi Petani dan Nelayan (KPN) Percontohan Nasional pada tanggal 8 Oktober 2021, maka Korporasi Petani Sapi Potong Kab. Subang terpilih menjadi salah satu KPN Percontohan Lainnya bersama empat lokasi lainnya, sebagaimana hasil rapat terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan koordinasi bersama, untuk mempersiapkan Korporasi Petani Sapi Potong Kab. Subang sebagai lokasi KPN Percontohan Nasional. Oleh sebab itu, mohon kesediaan Saudara untuk menugaskan pejabat/staf yang menangani perencanaan/kegiatan korporasi petani untuk mengikuti kegiatan koordinasi bersama yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Jum'at/15 Oktober 2021
 Waktu : 08.30 - selesai
 Tempat : Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Jawa Barat
 Gedung BPKAD Ruang Rapat Lantai 5,
 Jl. Kawalyaan Indah Raya No.6, Jatisari, Buahbatu, Bandung

Agenda : Persiapan Pelaksanaan *Major Project* Korporasi Petani Subang Tahun 2022

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Perencanaan


 Nur Kariyasa, M. Si
 NIP. 19690419 199803 1 002

Tembusan:
 Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian

Lampiran Surat
 Nomor : B-2164/RC.040/A.1/10/2021
 Tanggal : 13 Oktober 2021

Daftar Undangan:

1. Sekretaris Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ditjen PKH
2. Direktur PPH Peternakan, Ditjen PKH
3. Asisten Deputi Pengembangan dan Pembaruan Perkeroperasian, Kemenkop UKM
4. Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (PT. BRI)
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
6. Kepala Dinas Peternakan Kab. Subang
7. Kepala Bappeda Kab. Subang
8. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Subang
9. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Subang
10. Direktur PT. Brahman Gemilang Sejahtera
11. Ketua Koperasi Brahman Sejahtera
12. Ketua Koperasi Tani Jaya
13. Ketua Koperasi Surya Gemilang
14. Koordinator Perencanaan Wilayah, Biro Perencanaan
15. Sub Koordinator Wilayah III, Biro Perencanaan
16. Manager UMKK Brahman Sejahtera



Notulensi Penajaman Rancangan Pengembangan Korporasi Petani Subang

Tanggal 15 Oktober 2021

Bersama ini kami laporkan sampaikan hasil rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Major Project Korporasi Petani Sapi Potong Subang di Ruang Rapat Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. Rapat dipimpin oleh Plt. Koordinator Perencanaan Wilayah dan dihadiri oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, Perwakilan dari direktorat lingkup Ditjen PKH Kementan, Kepala Dinas Peternakan Kab. Subang, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Perkoperasian Kab. Subang, Kepala Bappeda Kab. Subang, perwakilan dari PT BRI Pusat dan Cabang Subang, Perwakilan dari Kementerian Koperasi dan UKM, serta Direksi PT. Brahman Gemilang Sejahtera beserta ketua Koperasi Korporasi Sapi Subang. Adapun agenda rapat adalah persiapan pelaksanaan Major Project Korporasi Petani Sapi Potong Subang untuk TA 2022. Adapun hasil rapat adalah sebagai berikut:

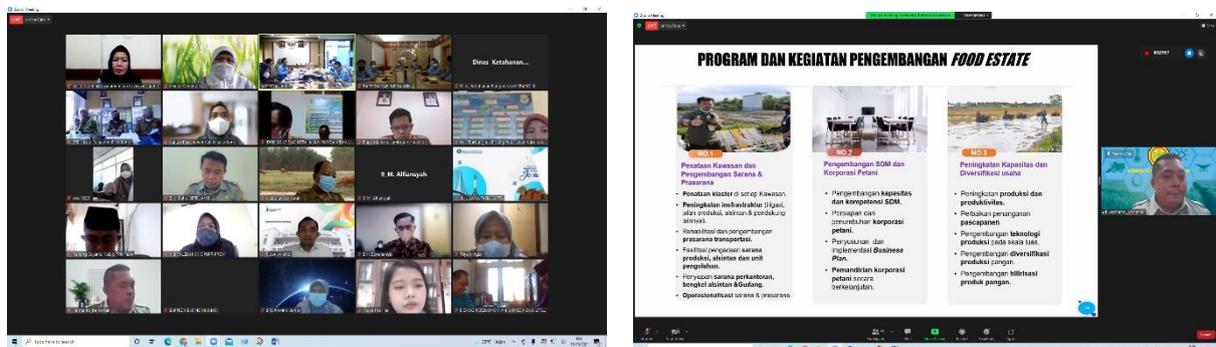
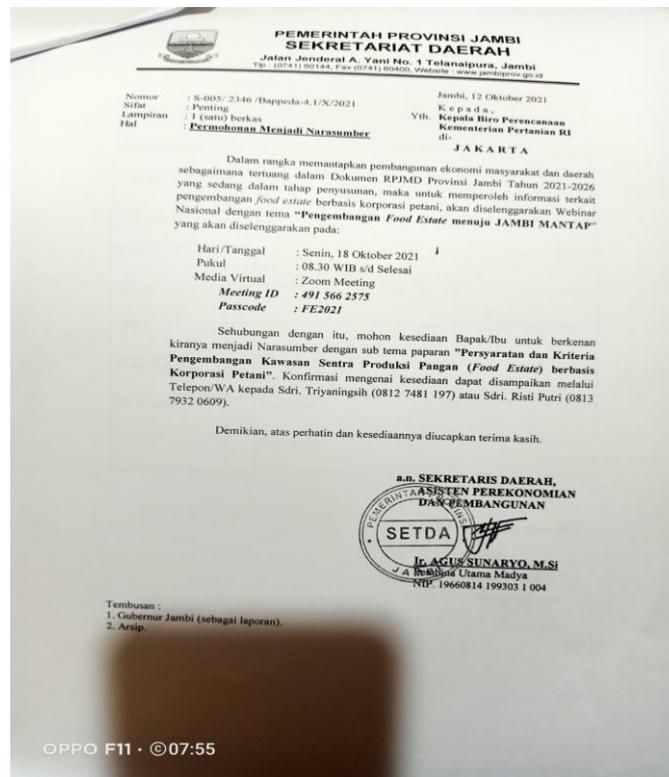
1. Berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Menko dengan Eselon I K/L pada tanggal 8 Oktober 2021, Korporasi petani sapi Kab. Subang, PT. Brahman Gemilang Sejahtera menjadi salah satu Korporasi Petani/Nelayan Percontohan lainnya bersama dengan 4 lokasi lainnya. Lokasi tersebut merupakan Proyek Percontohan Nasional yang harus dikembangkan hingga tahun 2022. Lokasi ini masih pada tahap penumbuhan sehingga perlu dipersiapkan untuk dikembangkan secara optimal.
2. Untuk itu dalam rangka mempercepat pelaksanaan penumbuhan Korporasi Petani ini, perlu adanya dukungan dan sinergitas antar K/L untuk pengembangan korporasi petani. Beberapa Aspek kegiatan dalam pelaksanaan sinergitas ini yang harus menjadi perhatian adalah konsolidasi lahan, konsolidasi petani, inovasi teknologi, sinergi, akses pembiayaan, oftaker, digitalisasi, dan dukungan logistik.
3. Sampai saat ini di Korporasi PT Brahman Gemilang Sejahtera, konsolidasi ternak yang telah dilakukan sudah mencapai 1.200 ekor dan ditargetkan mencapai 5.000 ekor dengan pola kandang komunal/ *ranch* dengan melakukan konsolidasi petani, kelembagaan petani dan manajemen usaha.
4. Dalam merancang model bisnis Korporasi petani disusun dengan menggunakan model bisnis Canvas (BMC). Dalam model bisnis ini harus dibangun secara sinergi yang kuat antara petani, koperasi, korporasi petani dengan *off taker* sehingga dapat diciptakan nilai manfaat bersama secara berkeadilan. Model bisnis ini akan di fasilitasi oleh PT. BRI sebagai PIC Korporasi Petani Subang.
5. Dalam rangka mempercepat persiapan pelaksanaan KPN Percontohan lainnya nasional, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Subang akan segera melakukan pendampingan ketiga koperasi untuk melengkapi persyaratan dalam penerimaan fasilitasi LPDB.
6. PT. BRI sebagai PIC Korporasi Petani Subang akan terlibat di beberapa pilar yaitu menyusun konsep model bisnis dengan K/L lain. Selain itu, dalam rangka

pengembangan digitalisasi di lokasi Korporasi Petani, PT. BRI akan merumuskan konsepnya dengan K/L lain, yang pelaksanaannya pada tahun 2022.

Tindak lanjut

1. Lakukan konsolidasi internal tim masing-masing dengan memetakan kembali permasalahan yang akan menjadi rencana aksi 2022 dengan mengacu ke 8 pilar.
2. Konsolidasi kembali hasil dari konsolidasi tim untuk menjadikan usulan Subang, yang akan disepakati antar K/L.
3. Konsolidasi lakukan di tingkat daerah, sehingga ada sinergi di lintas satker karena terkait dengan sinergi di lintas K/L untuk major project KPN percontohan ini.
4. Merumuskan model bisnis secara ringkas dengan menggunakan model canvas, dikoordinir oleh BRI sebagai bahan untuk disampaikan lintas K/L.
5. Konsolidasi peternak masih menjadi tugas dari Dinas Peternakan Kab. Subang dan Direksi PT. Brahman Gemilang Sejahtera untuk segera dapat dilakukan.
6. Ditjen PKH, Kementan akan segera berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan PT. BRI dalam rangka penyiapan model bisnis serta merancang pertemuan selanjutnya guna mempercepat persiapan korporasi petani Subang untuk Tahun Anggaran 2022.

Lampiran 6.g. Pembahasan Pengembangan Food Estate berbasis Korporasi Petani Menuju JAMBI MANTAB Tanggal 18 Oktober 2021



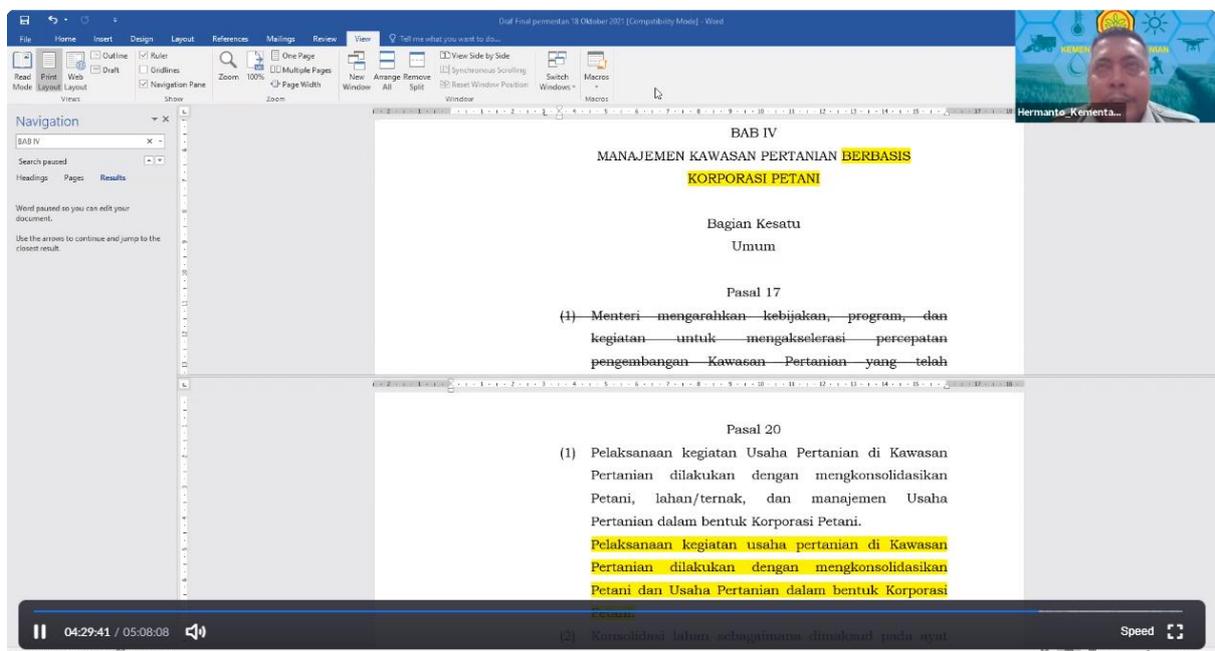
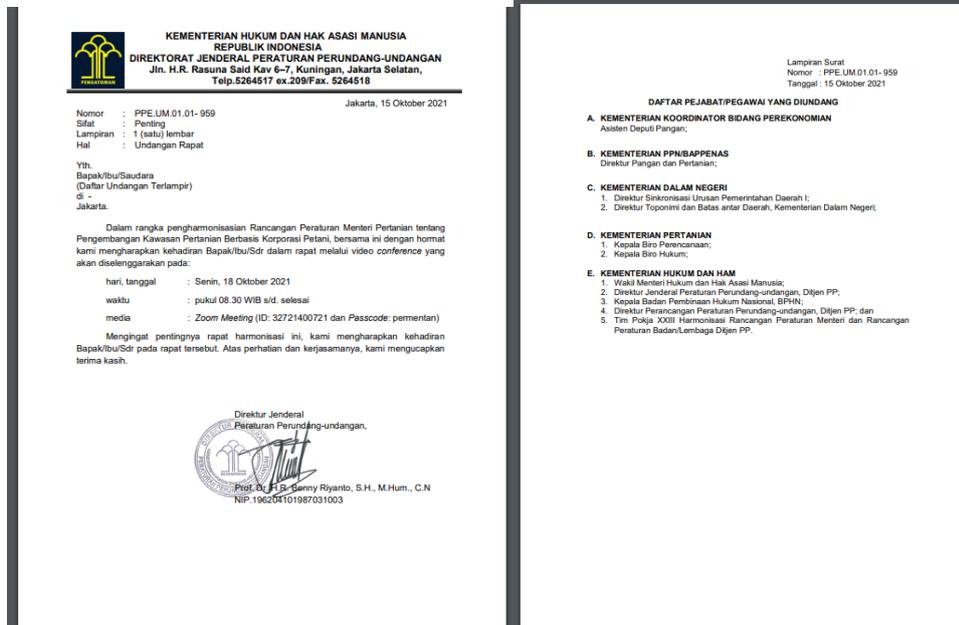
Notulensi Pengembangan Food Estate berbasis Korporasi Petani Menuju JAMBI MANTAB 18 Oktober 2021

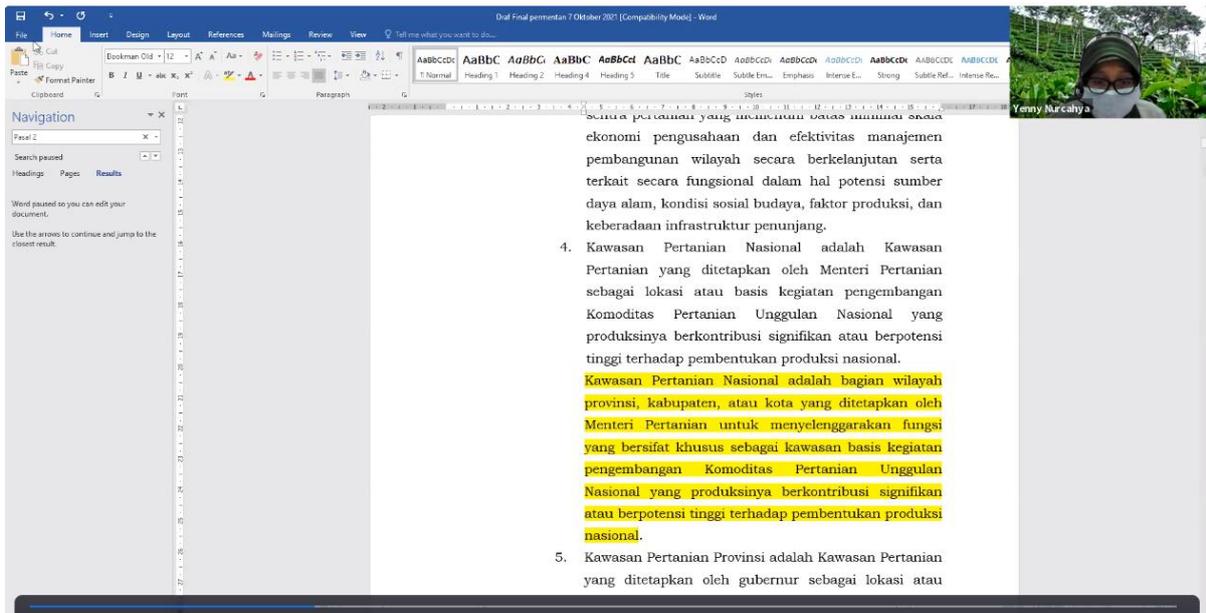
Webinar di buka oleh Asisten Administrasi Umum Provinsi Jambi, dihadiri oleh UPTD lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, dengan narasumber dari Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas dan Biro Perencanaan Kementan.

Beberapa hasil pembahasan yaitu :

1. Agroekologi sangat penting dalam kriteria awal, kecuali ada introduksi teknologi yang tepat untuk melihat karakteristik wilayah.
2. Prinsip dan kriteria yang mendasar dalam pengembangan kawasan sntra produksi pangan antarlain : Prinsip keberlanjutan, prinsip integratif, prinsip resilian, prinsip inklusif, dan prinsip maju dan modern. Proses perumusan AOI Food Estate yaitu Data dan peta hingga disepakati AOI yang akan dikembangkan lalu kemudian disusun Masterplan.
3. Beberapa Kriteria dalam pemilihan lokasi Food Estate antalain: lokais yang berada pada satu kawasan pertanian yang sudah ditetapkan oleh Kementan atau Pemda; karakteristik dan kondisi lahan sesuai untuk pengembangan komoditas pangan, sudah biasa diusahakan; status lahan yang clear dan clean; sudah tersedia prasarana dan sarana; lokasi dan lahan sudah tertata cukup baik; areal yang sesuai dengan penerapan mekanisasi pertanian. Sudah ada informasi karakteristik bio-fisik lahan, iklim, prasarana dan sarana; lokasi cukup strategis.
4. Dilakukan pemaparan oleh semua Kab. Lokus Food Estate di Provinsi Jambi untuk pengembangan 2022.
5. Masukan dr Biro Perencanaan : Perlu di jelaskan terkait sinergi program di lokus food estate; Perlu keterlibatan K/L di tingkat pusat perlu di jelaskan; Perlu segera di susun masterplan food estate oleh Provinsi sehingga jelas rencana pengembangan secara makro dan lalu di turunkan di kab mana saja yang akan dikembangkan sebagai lokus.

Lampiran 6.h. Harmonisasi Rancangan Permentan tentang Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani Tanggal 18 Oktober 2021



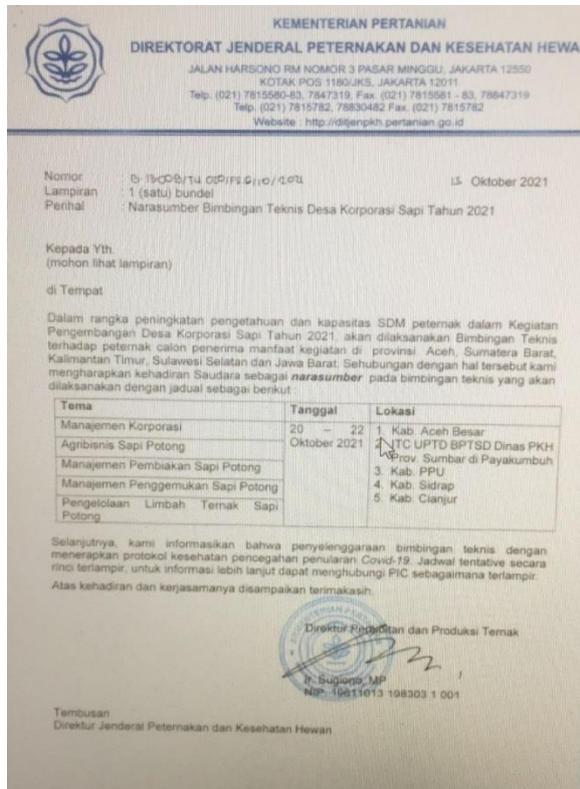


**Notulen Rancangan Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/2018
tentang
Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani
18 Oktober 2021**

6. Pada pembahasan kedua ini telah mulai dibahas pasal-perpasal mulai dari Bab Kawasan Pertanian dan Korporasi Petani. Pada pembahasan Kawasan pertanian beberapa perbaikan yang disepakati adalah definisi terkait dengan Kawasan Pertanian nasional, Kawasan Pertanian Provinsi dan Kawasan Pertanian Kabupaten. Selain itu terdapat penekanan pada peruntukan pengembangan Kawasan pertanian untuk Kawasan *Food Estate*, Kawasan *Integrated Farming* dan Kawasan lain yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
7. Pada harmonisasi kedua ini juga perlu diperjelas kembali pengembangan kawasan pertanian yang tidak terpisahkan dengan korporasi sehingga perlu didefinisikan secara jelas yang dimaksud dengan pengembangan Kawasan pertanian berbasis korporasi petani.
8. Dikarenakan penjelasan substansi pengembangan Kawasan pertanian berbasis korporasi petani dilakukan tidak dalam pengertian terpisah antara Kawasan pertanian dengan korporasi petani, sehingga perlu di restrukturisasi kembali urutan pasal per pasal.
9. Dari pembahasan harmonisasi kedua ini maka baru terselesaikan Bagian yang terkait dengan Kawasan pertanian sedangkan untuk bagian korporasi dan selanjutnya akan dilanjutkan pada harmonisasi ketiga dengan melakukan restrukturisasi konstruksi batang tubuh draf revisi peraturan menteri.

- Penumbuhan kelembagaan Petani menjadi Korporasi ini merupakan penjabaran pengembangan korporasi petani sebagai bentuk kelembagaan petani yang merupakan model bisnis baru untuk petani melalui konsolidasi petani, kelembagaan dan manajemen usaha.
- Transformasi kelembagaan petani menjadi korporasi petani ini merubah kelembagaan petani menjadi kelembagaan ekonomi petani yang mana skaling up, dari monokultur menjadi multi komoditas, dari yang awalnya hanya berteknologikan tradisional menjadi mekanisasi, modernisasi dan system digitalisasi.

Lampiran 6.j. Bimtek korporasi petani di Kabupaten Solok Selatan, 20 Oktober 2021



Bimbingan Teknis Petani dan Pengelola Korporasi Peternak Kabupaten Solok Selatan 19-21 Oktober 2021

1. Bimtek dilaksanakan pada tanggal 19-21 Oktober 2021. Pelaksanaan tidak di kabupaten solok selatan sebagai calon lokasi korporasi peternak, tetapi dilaksanakan di kabupaten Payakumbuh dengan pertimbangan di lokasi payakumbuh merupakan sentra Kawasan ternak sehingga para peternak dari

kabupaten Solok dapat melakukan kunjungan lapang serta studi banding di lokasi peternakan di kabupaten payakumbuh

2. Didalam pelaksanaan bimbingan teknis ini, dilaksanakan pelatihan terkait manajemen korporasi serta Teknik peternakan sapi dan pengelolaan pakan ternak serta limbah ternak. Dalam bimbingan teknik ini juga dilaksanakan kunjungan lapang serta studi banding di Kawasan peternakan di kabupaten Payakumbuh
3. Pelaksanaan bimtek diikuti oleh 25 anggota kelompok tani di satu kecamatan di kabupaten Solok Selatan. Sebagian besar anggota kelompok tani belum memahami teknik pengelolaan peternakan sapi, sehingga perlu diberikan pemahaman lebih dalam tentang manajemen pengelolaan ternak termasuk aspek penggemukan sapi serta pengelolaan limbah ternak dan pemberian pakan ternak.

Lampiran 6.k. Bimtek pengembangan Desa Korporasi Sapi di Kab. Sidrap
Tanggal 20 Oktober 2021



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011
Telp. (021) 7815580-83, 7847319, Fax. (021) 7815581 - 83, 78847319
Telp. (021) 7815782, 78830482 Fax. (021) 7815782
Website : <http://ditjenpkh.pertanian.go.id>

Nomor : B-13003/TA.020/FK.6/110/2021 13 Oktober 2021
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : Narasumber Bimbingan Teknis Desa Korporasi Sapi Tahun 2021

Kepada Yth.
(mohon lihat lampiran)

di Tempat

Dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kapasitas SDM peternak dalam Kegiatan Pengembangan Desa Korporasi Sapi Tahun 2021, akan dilaksanakan Bimbingan Teknis terhadap peternak calon penerima manfaat kegiatan di provinsi Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Jawa Barat. Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharapkan kehadiran Saudara sebagai **narasumber** pada bimbingan teknis yang akan dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut :

Tema	Tanggal	Lokasi
Manajemen Korporasi	20 - 22 Oktober 2021	1. Kab. Aceh Besar
Agribisnis Sapi Potong		2. ITC UPTD BPTSD Dinas PKH Prov. Sumbar di Payakumbuh
Manajemen Pembiakan Sapi Potong		3. Kab. PPU
Manajemen Penggemukan Sapi Potong		4. Kab. Sidrap
Pengelolaan Limbah Ternak Sapi Potong		5. Kab. Cianjur

Selanjutnya, kami informasikan bahwa penyelenggaraan bimbingan teknis dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan *Covid-19*. Jadwal tentative secara rinci terlampir, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi PIC sebagaimana terlampir.

Atas kehadiran dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak

Ir. Sugiono, MP
NIP. 19611013 198303 1 001



Bimbingan teknis korporasi peternak sapi potong di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan Bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Bimbingan Teknis ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan sosialisasi dan peningkatan pengetahuan dan kapasitas SDM peternak. Adapun hasil Bimbingan Teknis Korporasi Sapi Kab. Sidrap dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Bimbingan Teknis Korporasi Peternak Sapi Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan pada hari Selasa-Kamis, 28-30 September 2021 yang dibuka oleh perwakilan dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan, Kementerian Pertanian. Kegiatan pada hari pertama terdiri dari dua tema besar yaitu terkait pengelolaan limbah sapi potong baik dari sisi teknis pengelolaan dan manajemen korporasi petani.
2. Peserta rapat terdiri dari peternak dan babinsa dengan rincian sebagai berikut: Peternak yang berasal dari 5 desa terpilih yang akan melakukan pendampingan pelaksanaan Desa Korporasi .
3. Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Desa Korporasi Sapi Kab. Sidrap dengan maksud untuk mempermudah mobilisasi dan konsolidasi petani serta usaha tani peternak dalam satu kawasan peternakan sapi potong. Untuk itu, dalam satu kecamatan terdiri dari 5 desa yang tergabung dalam satu kawasan, untuk pengembangan korporasi sapi potong.
4. Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan bantuan berupa 1 paket kegiatan di masing-masing desa, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - a. Setiap desa terdiri dari 1 Kelompok Peternak atau 1 Kelompok Gabungan Kelompok Peternak yang menjadi cpcl;
 - b. Setiap Poktan/Gapoktan di masing-masing Desa mendapatkan bantuan 200 sapi potong, terdiri atas 100 sapi Betina untuk usaha sapi pembiakan dan 100 sapi jantan untuk usaha penggemukan;
 - c. Setiap kelompok diwajibkan menyiapkan lahan untuk pakan seluas minimal 5 Ha untuk penanaman rumput pakan;

- d. Setiap lokasi akan mendapatkan paket lainnya berupa kandang komunal untuk 100 ekor sapi, konsentrat pakan ternak untuk 4 bulan.
5. Selanjutnya, dalam rangka pengembangan korporasi peternak sapi potong Kab. Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama dengan Pemda dan peternak sapi, harus menyusun road map dan rencana aksi serta menyusun model bisnis dan proses bisnis.
6. Saat ini telah terbentuk 4 Kelompok Peternak dan 1 Gabungan Kelompok, Peternak di 5 Desa anggota korporasi peternak Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dikonsolidasikan dalam bentuk korporasi peternak melalui transformasi kelembagaan petani menjadi Gapoktan Bersama berbadan hukum (koperasi atau Perseroan Terbatas). Selanjutnya proses konsolidasi akan dilakukan dengan mengelola usaha inti yaitu sapi potong dengan melakukan konsolidasi usaha dalam satu manajemen.
7. Gapoktan bersama akan membentuk koperasi untuk mengkonsolidasikan usaha peternak. Selanjutnya koperasi dapat membentuk Perseroan Terbatas (PT) untuk membentuk korporasi petani. PT dibentuk untuk memperkuat dan memudahkan dalam pengembangan usaha atau bisnis yang dijalankan oleh korporasi petani.

Lampiran 6.I. Bimtek pengembangan Desa Korporasi Sapi di Kab. Aceh Besar Tanggal 20 Oktober 2021



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 1180/JS, JAKARTA 12011
Telp. (021) 7815580-83, 7847319, Fax. (021) 7815581 - 83, 78847319
Telp. (021) 7815782, 78830482 Fax. (021) 7815782
Website : <http://ditjenpkh.pertanian.go.id>

Nomor : 15-13708/14.020/F2.0110/1021
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : Narasumber Bimbingan Teknis Desa Korporasi Sapi Tahun 2021

15 Oktober 2021

Kepada Yth.
(mohon lihat lampiran)

di Tempat

Dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kapasitas SDM peternak dalam Kegiatan Pengembangan Desa Korporasi Sapi Tahun 2021, akan dilaksanakan Bimbingan Teknis terhadap peternak calon penerima manfaat kegiatan di provinsi Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Jawa Barat. Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharapkan kehadiran Saudara sebagai **narasumber** pada bimbingan teknis yang akan dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut :

Tema	Tanggal	Lokasi
Manajemen Korporasi	20 – 22 Oktober 2021	1. Kab. Aceh Besar
Agribisnis Sapi Potong		2. ITC UPTD BPTSD Dinas PKH Prov. Sumbar di Payakumbuh
Manajemen Pembiakan Sapi Potong		3. Kab. PPU
Manajemen Penggemukan Sapi Potong		4. Kab. Sidrap
Pengelolaan Limbah Ternak Sapi Potong		5. Kab. Cianjur

Selanjutnya, kami informasikan bahwa penyelenggaraan bimbingan teknis dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19. Jadwal tentative secara rinci terlampir, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi PIC sebagaimana terlampir. Atas kehadiran dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Direktorat Perencanaan dan Produksi Ternak
Ir. Sugiono, MP
NIP. 19611013 198303 1 001



Bimbingan teknis korporasi peternak sapi potong di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan Bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Bimbingan Teknis ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan sosialisasi dan peningkatan pengetahuan dan kapasitas SDM peternak. Pengembangan Desa Korporasi Sapi Tahun 2021 dilaksanakan dengan kegiatan budidaya penggemukan dan pembiakan sapi bakalan asli/lokal/asal impor dan sapi indukan asal impor yang dikelola dengan konsep berbasis korporasi peternak, yang

dialokasikan di 9 (sembilan) provinsi. Teknis kegiatan ini diatur didalam Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 9548/Kpts/PK.010/F/07/2021 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program dan Kegiatan Pengembangan Desa Korporasi Sapi Tahun Anggaran 2021.

Untuk keberhasilan kegiatan ini, maka Sumber Daya Manusia (SDM) peternak sebagai komunitas pelaku korporasi perlu memiliki kompetensi dalam manajemen korporasi, agribisnis sapi potong, manajemen pembiakan dan penggemukan sapi potong, serta pengelolaan limbah sapi potong. Sehubungan dengan hal tersebut salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Bimbingan Teknis. Agar bimbingan teknis dapat berjalan secara baik dan efektif maka disusun Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengembangan Desa Korporasi Sapi Tahun 2021.

Lampiran 6.I. Bimtek pengembangan Desa Korporasi Sapi di Kab. PPU Tanggal 20 Oktober 2021



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 1180/UKS, JAKARTA 12011
Telp. (021) 7815580-83, 7847319, Fax. (021) 7815581 - 83, 78847319
Telp. (021) 7815782, 78830482 Fax. (021) 7815782
Website : <http://ditjenpkh.pertanian.go.id>

Nomor : 16-13/008/14.020/PS.G/10/2021 15 Oktober 2021
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : Narasumber Bimbingan Teknis Desa Korporasi Sapi Tahun 2021

Kepada Yth.
(mohon lihat lampiran)
di Tempat

Dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kapasitas SDM peternak dalam Kegiatan Pengembangan Desa Korporasi Sapi Tahun 2021, akan dilaksanakan Bimbingan Teknis terhadap peternak calon penerima manfaat kegiatan di provinsi Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Jawa Barat. Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharapkan kehadiran Saudara sebagai *narasumber* pada bimbingan teknis yang akan dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut :

Tema	Tanggal	Lokasi
Manajemen Korporasi	20 – 22 Oktober 2021	1. Kab. Aceh Besar
Agribisnis Sapi Potong		2. ITC UPTD BPTSD Dinas PKH Prov. Sumbar di Payakumbuh
Manajemen Pembiakan Sapi Potong		3. Kab. PPU
Manajemen Penggemukan Sapi Potong		4. Kab. Sidrap
Pengelolaan Limbah Ternak Sapi Potong		5. Kab. Cianjur

Selanjutnya, kami informasikan bahwa penyelenggaraan bimbingan teknis dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19. Jadwal tentative secara rinci terlampir, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi PIC sebagaimana terlampir. Atas kehadiran dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Direktur Perencanaan dan Produksi Ternak
Ir. Sugiono, MP
NIP. 19611013 198303 1 001



1. Bimtek dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2021. Pelaksanaan di Kab. PPU Provinsi Kalimantan Timur.
2. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan Bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Bimbingan Teknis ini dilakukan dengan tujuan untuk

melakukan sosialisasi dan peningkatan pengetahuan dan kapasitas SDM peternak.

3. Didalam pelaksanaan bimbingan teknis ini, dilaksanakan pelatihan terkait manajemen korporasi serta Teknik peternakan sapi dan pengelolaan pakan ternak serta limbah ternak. Dalam bimbingan teknik ini juga dilaksanakan kunjungan lapang serta studi banding di Kawasan peternakan di kabupaten PPU
4. Pelaksanaan bimtek diikuti oleh 25 anggota kelompok tani di satu kecamatan di kabupaten PPU. Sebagian besar anggota kelompok tani belum memahami teknik pengelolaan peternakan sapi, sehingga perlu diberikan pemahaman lebih dalam tentang manajemen pengelolaan ternak termasuk aspek penggemukan sapi serta pengelolaan limbah ternak dan pemberian pakan ternak.

ternak serta limbah ternak. Dalam bimbingan teknik ini juga dilaksanakan kunjungan lapang serta studi banding di Kawasan peternakan di kabupaten Cianjur

3. Pelaksanaan bimtek diikuti oleh 25 anggota kelompok tani di satu kecamatan di kabupaten Cianjur. Sebagian besar anggota kelompok tani belum memahami teknik pengelolaan peternakan sapi, sehingga perlu diberikan pemahaman lebih dalam tentang manajemen pengelolaan ternak termasuk aspek penggemukan sapi serta pengelolaan limbah ternak dan pemberian pakan ternak.
4. Pengembangan Desa Korporasi Sapi Tahun 2021 dilaksanakan dengan kegiatan budidaya penggemukan dan pembiakan sapi bakalan asli/lokal/asal impor dan sapi indukan asal impor yang dikelola dengan konsep berbasis korporasi peternak, yang dialokasikan di 9 (sembilan) provinsi. Teknis kegiatan ini diatur didalam Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 9548/Kpts/PK.010/F/07/2021 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program dan Kegiatan Pengembangan Desa Korporasi Sapi Tahun Anggaran 2021.
5. Untuk keberhasilan kegiatan ini, maka Sumber Daya Manusia (SDM) peternak sebagai komunitas pelaku korporasi perlu memiliki kompetensi dalam manajemen korporasi, agribisnis sapi potong, manajemen pembiakan dan penggemukan sapi potong, serta pengelolaan limbah sapi potong. Sehubungan dengan hal tersebut salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Bimbingan Teknis. Agar bimbingan teknis dapat berjalan secara baik dan efektif maka disusun Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengembangan Desa Korporasi Sapi Tahun 2021.
6. Kegiatan desa korporasi sapi tahun 2021 di provinsi Jawa Barat terdapat di kecamatan Cugenang dan Gekbrong, kabupaten Cianjur . Nama kelompok sebagai berikut di kecamatan Cugenang:
 1. Kelompok Sari Tani Desa Wangunjaya
 2. Kelompok Sumber Arum Desa Talaga
 3. Kelompok Sakalam Jaya Desa SarampadNama kelompok di kecamatan Gekbrong sebagai berikut :
 1. Kelompok Gede Harepan Desa Gekbrong
 2. Kelompok Makmur Desa Cikahuripan

Lampiran 6.n. Koordinasi Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tanggal 22 Oktober 2021



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3, BAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12530 KOTAK POS 72164JKPM
TELEPON (021) 781586 – 781588, FAKS (021) 784286
SITUS : www.bppsp.pertanian.go.id

Lampiran Surat Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian
Nomor : 17183/STU.020/1.2/10/2021
Tanggal : 15 Oktober 2021

Nomor : 17183/STU.020/1.2/10/2021
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Koordinasi Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tahun 2021

15 Oktober 2021

Yth. Kepala Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
di
Tempat

Dalam rangka koordinasi dan peningkatan sinergitas pelaksanaan kegiatan penguatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian Tahun 2021 dan Rencana Program serta Anggaran Kegiatan Penyuluhan Pertanian Tahun 2022, maka Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian c.q Pusat Penyuluhan Pertanian akan menyelenggarakan Pertemuan Koordinasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.

Sehubungan dengan hal itu, kami mengundang Saudara sebagai narasumber dalam pertemuan tersebut yang akan dilaksanakan pada:

hari/tanggal : Kamis, 21 Oktober 2021
jadwal : 13.30 WITA – selesai (jadwal terlampir)
tempat : The Anvaya Beach Resort Hotel
Jl. Kartika Plaza, Tuban, Kuta, Kabupaten Badung,
Bali 80361
Telp. (0361) 2090477

Untuk mencegah penyebaran Covid-19 selama pertemuan berlangsung dimohon Saudara tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Saudara, diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian,

Bustanul Arifin Caya, M.D.M.
NIP. 196501101990031004

Tembusan Yth :
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.

Jadwal Tentatif Pertemuan Koordinasi Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tahun 2021 dan 2022

Waktu (WITA)	Acara	Narasumber/ Pembicara	Moderator
Kamis, 21 Oktober 2021			
14.00 – 17.00	Registrasi Peserta		
17.00 – 19.30	Isholma		
19.30 – 21.00	Pembukaan dan Arahan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian
Jumat, 22 Oktober 2021			
08.00 – 09.30	Evaluasi Kegiatan Penyuluhan Pertanian melalui Dana Dekonsentrasi Tahun 2021 dan Rencana Kegiatan Penyuluhan Tahun 2022	Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian	Koordinator Poksi Program dan Evaluasi
09.30 – 09.45	Rehat Kopi		
09.45 – 12.00	Panel Kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Program Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	Inspektur I, Inspektoriat Jenderal Kementerian Pertanian	Koordinator Kelembagaan dan Ketenagaan
	Kebijakan Penguatan Infomasi dan Teknologi melalui Pengembangan SIMLUHTAN	Kepala Pusat Data dan Informasi	Koordinator Penyelenggaraan
12.00 – 13.30	Isholma		
13.30 – 15.15	Penumbuhkembangan Kelembagaan Petani menjadi Korporasi	Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian	Koordinator Penyuluhan Pertanian
15.15 – 15.30	Rehat Kopi		
15.30 – 17.00	Review Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Pertanian melalui Dana Dekonsentrasi TA 2021	Koordinator Program dan Evaluasi	Koordinator Penyuluhan Pertanian
Sabtu, 23 Oktober 2021			
08.00 – 10.00	Rumusan Hasil dan Rencana Tindaklanjut	Koordinator Program dan Evaluasi	Koordinator Penyuluhan Pertanian
10.00 – 10.30	Penutupan	Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian	Koordinator Program dan Evaluasi



Output :

- Koordinasi penguatan penyelenggaraan penyuluh ini dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan peningkatan sinergitas pelaksanaan kegiatan penguatan penyelenggaraan penyuluh pertanian Tahun 2021, dan rencana program serta anggaran kegiatan penyuluhan pertanian Tahun 2022.
- Penumbuhan kelembagaan Petani menjadi Korporasi ini merupakan penjabaran pengembangan korporasi petani sebagai bentuk kelembagaan petani yang merupakan model bisnis baru untuk petani melalui konsolidasi petani, kelembagaan dan manajemen usaha.

- Transformasi kelembagaan petani menjadi korporasi petani ini merubah kelembagaan petani menjadi kelembagaan ekonomi petani yang mana skaling up, dari monokultur menjadi multi komoditas, dari yang awalnya hanya berteknologikan tradisional menjadi mekanisasi, modernisasi dan system digitalisasi.
- 8 pilar dalam korporasi petani yaitu konsolidasi lahan, konsolidasi manajemen, inovasi teknologi, sinergi, akses pembiayaan, off taker, digitalisasi dan dukungan logistik.

KARTU KENDALI PROSES COACHING PKN TK. II
ANGKATAN XVIII TAHUN 2021

Nama : Hermanto
 NDH : 20
 Instansi : Setjen Kementerian Pertanian
 Coach : Ir. Brisma Renaldi, MM
 Mentor : Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc

No	Tanggal <i>Coaching</i>	Isu/Permasalahan yang dihadapi	Media Komunikasi	Hasil <i>Coaching</i>	Tanda Tangan Coach*
1	23 Juli 2021	<i>Logical thinking</i>	Vicon	Arahan <i>logical thinking</i>	 Spec-21
2	5 Agustus 2021	Penjelasan proyek perubahan	Vicon	Menyusun RPP	 Spec-21
3	6 Agustus 2021	Presentasi Hasil Penyusunan <i>Logical Thinking</i>	Vicon	Masukan terkait <i>logical thinking Farmer Forum"</i>	 Spec-21
4	12 Agustus 2021	Konsultasi RPP	Off line	penambahan data, dan tujuan	 Spec-21
5	16 Agustus 2021	Persiapan seminar RPP	Vicon	Kesiapan presentasi RPP	 Spec-21
6	18 Agustus 2021	Penjelasan seminar RPP	Vicon	Presentasi seminar RPP	 Spec-21

7	19 Agustus 2021	Seminar Rancangan Perubahan	Vicon	Masukan Penguji: Seperti apa tata kelola baru yg akan dibangun?	
8	22 Agustus 2021	Evaluasi Seminar RPP	Vicon	Penyusunan Laporan Proper	
9	29 Agustus	Implementasi Proyek Perubahan	Vicon	SK Tim efektif, dukungan stakeholders	
10	12 September	Tahapan Kegiatan dan pemimpin strategis	Vicon	Tahapan Kegiatan dan pemimpin strategis	
11	14 September	Pembuatan video	Off Line	Progress Video	
12	17 September	Video VKN	Vicon	Video VKN	
13	25 September	Laporan Prpper	Off Line	Menyusun laporan Proper	
14	10 Oktober	Peran Pemimpin Strategis	Vicon	Peran <i>Project Leader</i> mengantisipasi kendala	
15	23 Oktober	Pembuatan Video dan Laporan Proyek Perubahan	Offline	Menayangkan Video dan draft Laporan	

*) *Coaching* yang sah adalah yang sudah ditandatangani *coach*